



BUPATI TOJO UNA-UNA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang transparan dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Keuangan ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan teknis dari penyelenggara keuangan daerah yang telah diberikan amanat untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Selain itu, LKPD juga berfungsi untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Laporan ini juga penting dalam membantu menilai ketaatan entitas pelaporan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan yang disusun bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una atas pengelolaan sumber daya yang ada. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah, seperti keputusan terkait investasi, pembiayaan, dan optimalisasi pendapatan dari aset produktif. Laporan Keuangan yang disusun meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar mengenai sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya selama satu periode pelaporan.
- 2) Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terkait Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2024.
- 3) Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi mengenai aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan. Laporan ini menggambarkan saldo awal,



penerimaan, pengeluaran, serta saldo akhir kas yang dikelola selama Tahun Anggaran 2024.

- 4) Laporan Operasional (LO), yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, yang tercermin dalam pendapatan, beban, serta surplus/defisit operasional. Penyajian laporan ini juga dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- 5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), yang menyajikan pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, penggunaan SAL, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, serta saldo anggaran lebih akhir, disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi mengenai pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit pada periode yang bersangkutan, serta koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi tersebut antara lain berasal dari perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan mendasar (misalnya terkait persediaan pada periode sebelumnya), serta perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang memberikan penjelasan naratif atau rincian lebih lanjut dari angka-angka yang tercantum dalam LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Catatan ini bertujuan untuk memudahkan para pengguna dalam memahami laporan keuangan secara lebih mendalam.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
 - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 24) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 1);
 - 25) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024;
 - 26) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
 - 27) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 25 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una Tahun 2022 Nomor 6);
 - 28) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024; dan
 - 29) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 44 Tahun 2023 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 44).



1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan sistematika penulisan laporan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD, yang menjelaskan tentang ekonomi makro, serta kebijakan keuangan.
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah dan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan akuntansi, yang menjelaskan entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah.
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan, yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari (1) rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana serta (2) pengungkapan atas pos-pos dan aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah.
- Bab VII Penutup.



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kondisi perekonomian suatu daerah. Indikator ini berperan penting dalam menentukan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, serta menjadi bahan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi regional.

Pada tahun 2024, PDRB Kabupaten Tojo Una-Una atas dasar harga berlaku mencapai Rp7.354,21 juta, sedangkan atas dasar harga konstan (harga tahun 2010) tercatat sebesar Rp4.300,77 juta. Dari distribusi PDRB menurut lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar, yakni sebesar 39,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Tojo Una-Una. Sebaliknya, sektor dengan kontribusi terendah adalah pengadaan listrik dan gas serta jasa perusahaan, yang hanya menyumbang 0,04 persen.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Tojo Una-Una mengalami peningkatan laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2024 sebesar 3,71 persen, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 3,34 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perekonomian daerah yang dapat menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan ke depan. Terakhir, di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2024, perekonomian terbesar disumbang dari konsumsi rupa sebesar 4.309.870,00 juta rupiah. Kemudian disusul oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar 1.985.506,00 juta rupiah, dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1.530.900,00 juta rupiah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tojo Una-Una atas dasar harga berlaku merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja ekonomi daerah berdasarkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha. Data PDRB ini mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi serta kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian daerah dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tojo Una-Una (miliar rupiah), 2020–2024

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022*	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.161,01	2.302,53	2.488,43	2.642,51	2.881,41
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	81,42	84,47	94,17	102,48	101,01
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	469,55	472,48	479,47	488,85	509,69
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2,19	2,3	2,48	2,69	2,89
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	10,38	10,71	11,12	11,90	12,20
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	390,74	416,3	452,02	485,52	503,76



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022*	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	453,95	506,89	573,89	639,09	722,09
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	119,49	125,35	164,6	184,39	194,52
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	38,34	44,01	49,07	54,69	60,88
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	304,37	331,15	349,32	372,57	393,20
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	106,91	123,32	132,89	135,7	153,89
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	243,88	251,39	269,63	305,21	333,83
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	2,00	2,07	2,20	2,42	2,57
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	530,2	564,56	582,15	618,98	655,62
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	381,74	387,19	395,97	415,05	454,21
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	219,6	241,77	253,94	268,52	285,02
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	70,86	72,51	75,13	81,88	87,44
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	5.586,63	5.938,99	6.376,49	6.812,42	7.354,21

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan perkembangan riil perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una dari tahun ke tahun tanpa terpengaruh oleh perubahan harga atau inflasi. Dengan menggunakan harga konstan 2010, data PDRB ini mencerminkan perubahan volume produksi dan aktivitas ekonomi yang terjadi pada berbagai lapangan usaha dalam periode 2020–2024, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tojo Una-Una (miliar rupiah), 2020–2024

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022*	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1.424,94	1.475,21	1.507,24	1.530,91	1.582,70
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	58,11	59,13	61,69	64,14	60,25
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	335,43	337,64	337,55	338,36	339,58
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2,13	2,2	2,34	2,50	2,68
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	6,79	7,02	7,19	7,49	7,52
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	260,01	274,1	293,87	305,48	306,78



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022*	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	328,34	358,54	389,33	417,19	450,31
H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	85,51	88,83	109,49	118,28	127,36
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	24,48	27,72	30,54	33,07	36,33
J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	259,47	280,05	294,5	314,69	331,00
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	67,7	74,46	73,54	73,62	83,26
L Real Estat/ Real Estate Activities	164,26	166,27	174,97	185,06	188,31
M,N Jasa Perusahaan/ Business Activities	1,41	4,45	1,51	1,60	1,60
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	297,69	311,85	309,25	319,99	330,65
P Jasa Pendidikan/ Education	236,02	238,85	238,66	246,36	257,25
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	122,63	128,76	132,89	137,05	142,39
R,S,T,U Jasa Lainnya/ Other Services Activities	45,68	46,51	48,11	50,96	52,78
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	3.720,60	3.878,59	4.012,69	4.146,74	4.300,77

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Tojo Una-Una memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi daerah serta kontribusi relatif masing-masing sektor terhadap total PDRB dalam kurun waktu 2020–2024, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tojo Una-Una (persen), 2020–2024

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022*	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing	38,68	38,77	39,03	38,79	39,18
B Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	1,46	1,42	1,48	1,50	1,37
C Industri Pengolahan/ Manufacturing	8,40	7,96	7,52	7,18	6,93
D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,19	0,18	0,17	0,17	0,17
F Konstruksi/ Construction	6,99	7,01	7,09	7,13	6,85



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022*	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	8,13	8,53	9,00	9,38	9,82
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	2,14	2,11	2,58	2,71	2,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,69	0,74	0,77	0,80	0,83
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5,45	5,58	5,48	5,47	5,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,91	2,08	2,08	1,99	2,09
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,37	4,23	4,23	4,48	4,54
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	9,49	9,51	9,13	9,09	8,91
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,83	6,52	6,21	6,09	6,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	3,93	4,07	3,98	3,94	3,88
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,27	1,22	1,18	1,20	1,19
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan dinamika perkembangan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una dari tahun ke tahun dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga atau inflasi. Data ini memberikan wawasan mengenai sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan positif maupun perlambatan dalam periode 2020–2024. sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tojo Una-Una (persen), 2020–2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022*	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	-0,65	3,53	2,17	1,57	3,38
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-25,02	1,76	4,33	3,96	-6,06
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	-0,28	0,66	-0,03	0,24	0,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	4,56	3,10	6,58	6,58	7,38
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	5,61	3,41	2,49	4,16	0,35
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	-18,98	5,42	7,21	3,95	0,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	-6,05	9,20	8,59	7,16	7,94



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022*	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles					
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-30,18	3,89	23,26	8,03	7,67
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-10,76	13,24	10,17	8,28	9,88
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	7,87	7,93	5,16	6,86	5,18
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	17,07	9,99	-1,24	0,10	13,10
L Real Estat/Real Estate Activities	0,24	1,22	5,23	5,77	1,76
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	-0,39	2,18	4,63	5,75	0,07
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1,17	4,76	-0,83	3,47	3,33
P Jasa Pendidikan/Education	-1,73	1,20	-0,08	3,22	4,42
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	3,22	5,00	3,21	3,13	3,90
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	-5,94	1,82	3,45	5,92	3,58
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	-3,17	4,25	3,46	3,34	3,71

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran di Kabupaten Tojo Una-Una memberikan gambaran mengenai struktur perekonomian daerah berdasarkan komponen pengeluaran utama dalam periode 2020–2024. PDRB berdasarkan pengeluaran mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah berdasarkan sisi permintaan, yang mencakup konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor, dan impor, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tojo Una-Una Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2020–2024

Pengeluaran Expenditure	2020	2021	2022*	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	3.174.270,02	3.300.887,23	3.564.536,74	3.951.365,41	4.309.870,00
Pengeluaran Konsumsi LNPR NPISH Consumption Expenditure	87.206,62	92.037,96	103.082,52	117.528,87	133.236,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	1.239.541,28	1.338.438,45	1.347.759,14	1.385.795,97	1.530.900,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	1.359.840,91	1.562.523,32	1.778.819,61	1.828.362,09	1.985.506,00
Perubahan Inventori Changes in Inventories	21.132,04	22.884,14	27.516,05	34.480,65	37.408,00
Net Ekspor Barang dan Jasa Net Exports of Goods and Services	(295.365,81)	(377.780,66)	(445.223,49)	(505.117,03)	(642.707,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pengeluaran Expenditure	2020	2021	2022*	2023*	2024**
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	5.586.625,29	5.938.990,44	6.376.490,57	6.812.415,96	7.354.212,70

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut pengeluaran di Kabupaten Tojo Una-Una menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang riil tanpa dipengaruhi oleh faktor inflasi dalam periode 2020–2024. Pendekatan ini memberikan gambaran lebih akurat mengenai perubahan volume konsumsi, investasi, dan perdagangan yang terjadi di daerah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tojo Una-Una Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2020–2024

Pengeluaran Expenditure	2020	2021	2022*	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	2.098.608,71	5.151.512,73	2.234.226,11	2.384.853,42	2.505.424,00
Pengeluaran Konsumsi LNPR NPISH Consumption Expenditure	58.557,11	59.845,37	64.154,24	70.185,47	75.714,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	600.435,04	637.718,29	635.628,17	636.586,29	690.973,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	987.155,96	1.068.984,60	1.162.412,90	1.165.204,90	1.179.818,00
Perubahan Inventori Changes in Inventories	14.829,94	15.156,19	17.057,47	19.918,01	21.468,00
Net Ekspor Barang dan Jasa Net Exports of Goods and Services	(38.990,55)	(54.627,32)	(100.784,17)	(130.004,13)	(172.630,00)
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	3.720.596,21	3.878.589,86	4.012.694,72	4.146.743,96	4.300.765,90

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah mengacu pada landasan hukum yang ditetapkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan yang menjadi acuan antara lain adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Struktur APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 terdiri dari empat komponen utama, yaitu pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- 1). Pendapatan yang meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Pendapatan Transfer;
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- 2). Belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja Operasi, yang mencakup belanja pegawai, belanja barang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan;
 - b. Belanja Modal, yang terdiri dari belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya;
 - c. Belanja Tak Terduga.
- 3). Transfer, yang meliputi:
 - a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan, yaitu transfer yang dianggarkan, meliputi transfer bagi hasil pajak daerah;
 - b. Transfer Bantuan Keuangan, yang terdiri dari transfer bantuan keuangan ke desa dan transfer bantuan keuangan lainnya.
- 4). Pembiayaan, yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan akan menghasilkan pembiayaan netto, yang digunakan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus..

Namun demikian, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu segera diatasi, antara lain:

- a. Tingginya tingkat kemiskinan berbasis pulau dan KAT;
- b. Aksesibilitas wilayah sulit dan ketimpangan infrastruktur antara wilayah kecamatan;
- c. Kualitas dan kapasitas SDM masih rendah;
- d. Belum optimal pemanfaatan trisula pembangunan (pertanian, perikanan-kelautan dan sektor pariwisata daerah);
- e. Kemampuan fiskal yang rendah dalam membiayai percepatan pembangunan daerah;
- f. Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta meningkatnya resiko bencana alam dan non alam;
- g. Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas dan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, maka secara garis besar, rencana target dan realisasi dari struktur APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan berbagai tantangan dan peluang yang ada guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi dari Struktur APBD Kabupaten Tojo Una-Una TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
I	Pendapatan	1.372.442.394.655,00	1.368.295.133.804,95	99,70
II	Belanja	1.437.708.835.974,00	1.377.120.644.129,31	95,79
III	Surplus (Defisit)	(65.266.441.319,00)	(8.825.510.324,36)	13,63
IV	Pembiayaan Netto	65.266.441.319,00	65.266.441.318,71	100,00
	SILPA	-	56.440.930.994,35	

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), acuan utama yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran diatur dengan memperhatikan karakter berdasarkan jenis Pendapatan, belanja dan Pembiayaan pada lembar depan laporan. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai realisasi anggaran yang telah dialokasikan. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan kemudahan dalam menganalisis penggunaan anggaran sesuai dengan kategori jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran dapat memberikan informasi yang jelas dan akuntabel mengenai alokasi serta penggunaan anggaran daerah yang bersangkutan.

Kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Desentralisasi fiskal memberikan peluang kepada daerah untuk merancang dan menetapkan program kerja serta anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang dimiliki, serta kewenangan yang telah diserahkan. Tuntutan terhadap kebutuhan yang besar dan mendesak, baik untuk pembiayaan pelayanan kepada masyarakat, urusan pemerintahan, maupun kegiatan pembangunan yang merupakan prioritas utama, mengharuskan pemerintah daerah untuk terus berupaya menggali dan meningkatkan penerimaan daerah. Upaya tersebut dilakukan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan daerah.

Dalam rangka mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan mengukur tingkat konsumsi masyarakat, dibutuhkan data-data dari sektor ekonomi, salah satunya adalah data perkembangan tingkat harga. Fluktuasi harga di pasar menjadi salah satu indikator utama yang menggambarkan stabilitas perekonomian suatu daerah. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat keseimbangan antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) barang dan jasa pada waktu tertentu.

Kegiatan intensifikasi pendapatan daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan kegiatan pemungutan serta penerapan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas aparat pemungut pajak dan retribusi serta pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi;
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai setiap peraturan daerah yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan, serta memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem perpajakan dan retribusi daerah;
- 5) Menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, kegiatan ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan menggali sumber-sumber pendapatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

daerah melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah secara berkesinambungan. Struktur pendapatan yang digunakan dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 pada prinsipnya sama. SAP mengatur klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

b. Target dan Realisasi Pendapatan

Dengan diterapkannya kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut diperoleh hasil pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp1.372.442.394.655,00** dan realisasi sebesar **Rp1.368.295.133.804,95** sehingga terdapat capaian target sebesar **99,70%**. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	74.329.306.220,00	85.381.839.597,65	114,87
4.2	Pendapatan Transfer	1.287.610.966.078,00	1.273.155.200.610,00	98,88
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.502.122.357,00	9.758.093.597,30	92,92
Jumlah		1.372.442.394.655,00	1.368.295.133.804,95	99,70

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Pengelolaan Belanja

a. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Secara umum, belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran kas daerah yang menjadi beban atau kewajiban pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran belanja daerah ini diarahkan untuk membiayai berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan umum, dan kegiatan pemerintah daerah lainnya. Kebijakan umum belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una difokuskan pada pencapaian sasaran utama, yaitu terselenggaranya kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum yang efektif, terpeliharanya aset kekayaan daerah dan hasil-hasil pembangunan, serta pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.

Selain itu, belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, mendorong perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan umum. Hal ini terutama dilakukan dengan fokus pada pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, penyediaan fasilitas pelayanan dasar, serta pengembangan sumber daya manusia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una difokuskan pada lima hal utama, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan, tangguh terhadap bencana, dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan;
- 2) Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang maju dan keluar dari status daerah tertinggal;
- 3) Memantapkan trisula pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengandalkan sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata;



- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan;
- 5) Mewujudkan aparatur dan sistem pemerintahan daerah yang profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis pada prinsip smart governance.

Dalam Standar akuntansi pemerintahan (SAP), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Penyajian belanja dalam lembar muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dilakukan berdasarkan klasifikasi ekonomi yang mencakup jenis belanja yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai alokasi dan penggunaan anggaran daerah, sehingga dapat memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Target dan Realisasi Belanja

Struktur APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengklasifikasikan belanja sesuai dengan klasifikasi belanja Permendagri No 77 Tahun 2020 menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp1.377.120.644.129,31** target dan realisasi jenis-jenis belanja Tahun Anggaran 2024 menurut Permendagri No 77 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
Belanja Operasi dianggarkan sebesar **Rp1.020.730.742.469,87** dan direalisasikan sebesar **Rp966.886.071.221,31** atau **94,72%** dari anggarannya.
2. Belanja Modal
Belanja Modal dianggarkan sebesar **Rp220.774.282.078,13** dan direalisasikan sebesar **Rp214.284.184.008,00** atau **97,06%** dari anggarannya.
3. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar **Rp304.847.526,00** dan direalisasikan sebesar **Rp51.425.000,00** atau **16,87%** dari anggarannya.
4. Belanja Transfer
Belanja Transfer dianggarkan sebesar **Rp195.898.963.900,00** dan direalisasikan sebesar **Rp195.898.963.900,00** atau **100,00%** dari anggarannya.

3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

a. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan seluruh transaksi keuangan yang mencakup penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau kekurangan anggaran dan/atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi keuangan daerah ini bertujuan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dengan kata lain, apabila terjadi surplus anggaran, maka transaksi keuangan daerah akan berupa pemanfaatan surplus tersebut. Sebaliknya, apabila terjadi defisit anggaran, maka transaksi keuangan daerah akan digunakan untuk menutup defisit yang ada.

Seluruh transaksi keuangan terkait pembiayaan daerah ini akan tercantum secara jelas berdasarkan akun jenis dalam Laporan Realisasi Anggaran APBD. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan dan alokasi pembiayaan



yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Klasifikasi pembiayaan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan SAP pada prinsipnya adalah sama, sehingga tidak diperlukan proses konversi antara keduanya. Kesamaan ini memudahkan penyusunan laporan dan memastikan konsistensi dalam pelaporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Target dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan *netto* Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp65.266.441.319,00** dengan realisasi sebesar **Rp65.266.441.318,71** atau **100,00%**. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah menurut APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar **Rp67.566.441.319,00** dan direalisasikan sebesar **Rp67.566.441.318,71** atau **100,00%** dari anggarannya.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar **Rp2.300.000.000,00** dan direalisasikan sebesar **Rp2.300.000.000,00** atau **100,00%** dari anggarannya.

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota terbagi dalam Delapan kategori, yaitu:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan;
- d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
- e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan;
- f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan;
- g. Unsur Kewilayahan
- h. Unsur Pemerintahan Umum.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una senantiasa diarahkan untuk mencapai visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, yakni “Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju, dan Sejahtera (Tamara)”. Visi ini juga berkomitmen untuk mendukung pencapaian visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, salah satu aspek yang sangat penting adalah pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi indikator utama terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Tantangan besar yang dihadapi adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat dalam hal pembiayaan pembangunan, yang tercermin pada proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan (DAU dan DAK). Kondisi ini memicu pemerintah daerah untuk terus berupaya mendorong peningkatan penerimaan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan keseimbangan dalam pengelolaan keuangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua kegiatan pemerintahan dalam RKPD Tahun 2024 selanjutnya dituangkan dalam APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024. Pelaksanaan APBD ini dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada, sebagai implementasi nyata dari setiap program yang telah direncanakan.

Capaian menurut urusan pemerintahan daerah dalam APBD Tahun 2024 akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	%
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	821.335.103.272,00	778.868.700.516,81	94,84
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	86.883.467.098,00	82.327.722.995,00	94,76
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	57.000.976.866,00	56.015.823.378,50	98,27
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	118.894.307.796,00	115.499.524.622,00	97,14
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	245.732.006.082,00	242.089.615.397,00	98,52
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	9.982.749.396,00	9.227.503.678,00	92,43
7	Unsur Kewilayahan	46.224.886.488,00	43.663.079.773,00	94,46
8	Unsur Pemerintahan Umum	51.655.338.976,00	49.428.673.769,00	95,69
Jumlah		1.437.708.835.974,00	1.377.120.644.129,31	95,79

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai berbagai target kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan.

Untuk memastikan bahwa pencapaian target tersebut dapat dipantau dengan baik, disusunlah ikhtisar mengenai realisasi pencapaian kinerja keuangan yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pihak terkait. Ikhtisar ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan penelusuran antara realisasi anggaran yang telah tercapai dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kabupaten Tojo Una-Una disajikan berdasarkan dua kategori utama, yaitu

- a. Klasifikasi Berdasarkan Organisasi;
- b. Klasifikasi berdasarkan Fungsi

Dalam penyusunan ikhtisar ini, berbagai aspek penting dari realisasi anggaran dipaparkan secara rinci dalam bentuk tabel yang mudah dibaca dan dipahami. Tabel ini menyajikan informasi mengenai jumlah anggaran yang telah terealisasi, persentase pencapaian target pada setiap Organisasi dan Fungsi pemerintahan yang ada. Dengan demikian, masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berhasil mencapai target-target kinerja keuangan yang telah ditetapkan.

3.1.1 Klasifikasi Berdasarkan Organisasi

Klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi merujuk pada pembagian anggaran yang disusun sesuai dengan pengguna anggaran dalam setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi dana yang diterima oleh masing-masing OPD, yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Dengan sistem klasifikasi ini, anggaran tidak hanya dipandang dari sisi sektor atau bidang pemerintahan, tetapi juga dari sisi organisasi pelaksana, yang menjadi garda terdepan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah. Setiap OPD yang memiliki tugas dan fungsi spesifik akan menerima anggaran sesuai dengan kebutuhannya dalam mewujudkan program-program yang telah direncanakan, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat dipergunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

Melalui klasifikasi berdasarkan organisasi ini, setiap OPD akan memiliki transparansi yang lebih jelas terkait dengan berapa banyak dana yang diterima dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

bagaimana dana tersebut dikelola untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini juga memudahkan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan anggaran oleh masing-masing OPD. Lebih dari itu, klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Dengan demikian, klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi menjadi langkah strategis dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih terstruktur, efektif, dan terukur, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 3. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

Perangkat Daerah (PD)	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
I. PENDAPATAN			
1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.500.000.000,00	3.455.343.000,00	138,21
2. Rumah Sakit Umum Daerah Ampana	45.000.000.000,00	52.618.002.007,34	116,93
3. Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	1.500.000.000,00	1.430.850.300,00	95,39
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	279.400.000,00	361.600.402,00	129,42
5. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1.141.031.930,00	707.450.076,00	62,00
6. Dinas Perikanan	238.000.000,00	263.531.500,00	110,73
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	150.000.000,00	179.830.000,00	119,89
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.337.500,00	41.450.000,00	97,90
9. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	201.672.000,00	124.257.000,00	61,61
10. Sekretariat Daerah	45.000.000,00	49.495.000,00	109,99
11. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.308.407.453.225,00	1.295.133.496.305,61	98,99
12. Badan Pendapatan Daerah	12.937.500.000,00	13.929.828.214,00	107,67
Jumlah Pendapatan	1.372.442.394.655,00	1.368.295.133.804,95	99,70
II. BELANJA			
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	349.064.623.358,00	325.243.929.182,00	93,17
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	134.778.300.680,00	126.994.151.727,81	94,22
3. Rumah Sakit Umum Daerah Ampana	100.428.508.885,00	100.398.053.699,00	99,97
4. Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	21.858.232.307,00	20.721.627.515,00	94,80
5. Rumah Sakit Pratama Togean	3.341.041.573,00	3.247.010.447,00	97,19
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	195.294.329.426,00	186.846.626.999,00	95,67
7. Satuan Polisi Pamong Praja	13.528.811.833,00	12.899.615.721,00	95,35
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.558.957.578,00	4.405.366.813,00	96,63
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.095.427.632,00	9.452.848.353,00	93,63
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.392.381.072,00	5.714.448.647,00	89,39
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.896.060.657,00	4.760.551.700,00	97,23
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.389.304.346,00	7.844.971.245,00	93,51
13. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	21.743.352.338,00	20.670.408.656,00	95,07
14. Dinas Komunikasi dan Informatika	7.924.542.794,00	7.640.408.778,00	96,41
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.925.692.555,00	4.787.091.752,00	97,19
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.453.258.680,00	4.314.147.884,00	96,88
17. Dinas Perikanan	20.595.980.358,00	20.365.912.255,00	98,88
18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.590.101.215,00	10.336.386.630,00	97,60
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	33.908.878.070,00	32.507.465.666,50	95,87
20. Dinas Perdagangan, Perindustrian,	8.451.761.880,00	8.061.223.220,00	95,38



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Perangkat Daerah (PD)	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
21. Sekretariat Daerah	69.398.147.111,00	67.154.023.258,00	96,77
22. Sekretariat DPRD	49.496.160.685,00	48.345.501.364,00	97,68
23. Inspektorat Daerah	9.982.749.396,00	9.227.503.678,00	92,43
24. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	13.804.912.386,00	13.647.963.602,00	98,86
25. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	214.419.698.132,00	211.827.963.142,00	98,79
26. Badan Pendapatan Daerah	9.158.330.628,00	8.619.188.911,00	94,11
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8.349.064.935,00	7.994.499.742,00	95,75
28. Kecamatan Tojo	3.803.261.138,00	3.155.879.946,00	82,98
29. Kecamatan Tojo Barat	3.663.955.767,00	3.343.204.393,00	91,25
30. Kecamatan Ulubongka	2.793.096.823,00	2.607.925.125,00	93,37
31. Kecamatan Ampana Kota	9.716.882.716,00	9.340.663.637,00	96,13
32. Kecamatan Ampana Tete	2.918.168.035,00	2.795.292.072,00	95,79
33. Kecamatan Una-Una	3.090.878.703,00	2.914.017.393,00	94,28
34. Kecamatan Togean	2.384.575.897,00	2.284.841.979,00	95,82
35. Kecamatan Walea Kepulauan	2.461.210.868,00	2.348.462.019,00	95,42
36. Kecamatan Walea Besar	1.774.492.301,00	1.753.295.409,00	98,81
37. Kecamatan Ratolindo	9.438.756.980,00	9.128.352.450,00	96,71
38. Kecamatan Talatako	1.908.480.373,00	1.822.240.105,00	95,48
39. Kecamatan Batudaka	2.271.126.887,00	2.168.905.245,00	95,50
40. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.655.338.976,00	49.428.673.769,00	95,69
Jumlah Belanja	1.437.708.835.974,00	1.377.120.644.129,31	95,79
Surplus/Defisit	(65.266.441.319,00)	(8.825.510.324,36)	13,52
PEMBIAYAAN NETTO			
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah			
Penerimaan Pembiayaan	67.566.441.319,00	67.566.441.318,71	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	100,00
Jumlah Pembiayaan Netto	65.266.441.319,00	65.266.441.318,71	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	00,00	56.440.930.994,35	

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

3.1.2 Klasifikasi berdasarkan Urusan

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien sangat bergantung pada pembagian fungsi-fungsi yang jelas dan terstruktur. Terdapat delapan urusan pemerintahan daerah yang berperan penting dalam memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan dengan tepat untuk mendukung pembangunan daerah, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	778.868.700.516,81
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	322.428.848.476,00
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	243.720.794.390,81
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	175.946.096.473,00
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	10.808.733.290,00
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	17.304.982.534,00
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	8.659.245.353,00
II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	82.327.722.995,00
1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	5.239.663.153,00
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	793.603.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	14.927.833.077,00
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	91.797.236,00
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	6.179.225.207,00
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.760.551.700,00
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.844.971.245,00
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.640.048.998,00
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	14.491.183.449,00
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	7.268.009.293,00
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	318.396.350,00
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	4.787.091.752,00
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	2.815.080.706,00
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	167.162.105,00
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	205.237.380,00
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	483.720.460,00
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	4.314.147.884,00
III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	56.015.823.378,50
1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	20.365.912.255,00
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	9.852.666.170,00
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	17.579.632.589,50
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1.371.487.676,00
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	6.371.339.194,00
6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	474.785.494,00
IV. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	115.499.524.622,00
1. Sekretariat Daerah	67.154.023.258,00
2. Sekretariat DPRD	48.345.501.364,00
V. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	242.089.615.397,00
1. Perencanaan	13.127.397.652,00
2. Keuangan	220.447.152.053,00
3. Kepegawaian	7.495.555.290,00
4. Pendidikan Dan Pelatihan	498.944.452,00
5. Penelitian Dan Pengembangan	520.565.950,00
VI. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.227.503.678,00
1. Inspektorat Daerah	9.227.503.678,00
VII. UNSUR KEWILAYAHAN	43.663.079.773,00
1. Kecamatan	43.663.079.773,00
VIII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	49.428.673.769,00
1. Kesatuan Bangsa Dan Politik	49.428.673.769,00
JUMLAH	1.377.120.644.129,31

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran tahun 2024 sebesar Rp1.377.120.644.129,31 disajikan pada *lampiran 56*.

3.1.3 Mandatory Spending

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan harus mencakup pengelolaan pengeluaran yang tidak hanya berorientasi pada prioritas pembangunan, tetapi juga memperhatikan pengeluaran wajib yang menjadi komitmen pemerintah daerah. Dalam hal ini, *Mandatory Spending* atau pengeluaran wajib merupakan bagian dari anggaran yang harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengeluaran wajib pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024, berikut disajikan informasi yang merinci berbagai pos pengeluaran yang termasuk dalam kategori ini. Pengeluaran wajib tersebut mencakup berbagai sektor yang menjadi prioritas, di antaranya adalah sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tabel 3. 3 Mandatory Spending Tahun Anggaran 2024

No.	Komponen Perhitungan	APBD-P 2024	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	Realisasi 2024	% dari anggaran dan Realisasi	
01	a. Urusan Bidang Pendidikan:		346.134.593.358,00		322.807.426.573,00	93,26
	1) Belanja Operasi:	315.335.447.153,00		292.008.280.368,00		
	a) belanja pegawai;	250.770.758.636,00		228.301.406.210,00		
	b) belanja barang dan jasa;	53.686.393.517,00		52.827.592.112,00		
	c) belanja hibah;	10.042.395.000,00		10.093.245.107,00		
	d) belanja bantuan sosial,	835.900.000,00		786.036.939,00		
	2) Belanja Modal;	30.799.146.205,00		30.799.146.205,00		
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		483.962.000,00		483.720.460,00	99,95
	1) Belanja Operasi:	483.962.000,00		483.720.460,00		
	a) belanja pegawai;	0,00		0,00		
	b) belanja barang dan jasa;	483.962.000,00		483.720.460,00		
	c) belanja hibah;	0,00		0,00		
	d) belanja bantuan sosial,	0,00		0,00		
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00		
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		4.453.258.678,00	1,26%	4.314.147.884,00	96,88
	1) Belanja Operasi:	3.856.458.678,00		3.719.473.884,00		
	a) belanja pegawai;	2.795.775.133,00		2.669.645.569,00		
	b) belanja barang dan jasa;	1.060.683.545,00		1.049.828.315,00		
	c) belanja hibah;	0,00		0,00		
	d) belanja bantuan sosial,	0,00		0,00		
	2) Belanja Modal;	596.800.000,00		594.674.000,00		
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:		2.930.030.000,00	0,83%	2.815.200.706,00	96,08
	1) Belanja Operasi:	2.839.050.000,00		2.724.220.706,00		
	a) belanja pegawai;	0,00		0,00		
	b) belanja barang dan jasa;	1.839.050.000,00		1.574.220.706,00		
	c) belanja hibah;	1.000.000.000,00		1.150.000.000,00		
	d) belanja bantuan sosial,	0,00				
	2) Belanja Modal;	90.980.000,00		90.980.000,00		
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		0,00		0,00	
	1) Belanja Transfer:	0,00		0,00		
Belanja bantuan keuangan	0,00		0,00			
2) Sub Kegiatan pada SKPD	0,00		0,00			
dst	0,00		0,00			
02	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		354.001.844.036,00		330.420.495.623,00	
03	Total Belanja Daerah		1.437.708.835.974,00		1.377.190.655.956,31	
04	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		24,62%		23,99%	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Komponen Perhitungan		APBD-P 2024	% dari total anggaran kesehatan	Realisasi 2024		% dari anggaran dan Realisasi		
01	a.	Urusan bidang Kesehatan:		260.406.083.445,00	92,31%		248.940.141.388,81	95,60	
		1)	Belanja Operasi:	239.608.218.135,71			230.765.819.351,81		
		a	belanja pegawai;	103.739.762.953,00			96.065.081.954,00		
		b	belanja barang dan jasa;	135.418.455.182,71			134.250.737.397,81		
		c	belanja hibah;	450.000.000,00			450.000.000,00		
		d	belanja bantuan sosialc	-			-		
		2)	Belanja Modal;	20.797.865.309,29			18.174.322.037,00		
		b.	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		21.698.808.902,93	7,69%		16.731.436.454,00	77,11
			1)	Belanja Transfer:	-		-		
			a	Belanja bantuan keuangan					
			b	Alokasi Fungsi Kesehatan dari Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kepada Kabupaten/Kota sebesar 37,5% untuk BPJS Kesehatan					
			2)	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.175.162.890,00		10.575.650.295,00		
			3)	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	4.886.278.548,93		4.571.106.215,00		
			4)	Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	59.013.274,00		48.503.868,00		
			5)	Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.296.200,00		5.241.600,00		
			6)	Medical Check Up bagi KDH/WKDH	180.000.000,00		115.116.196,00		
			7)	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	25.000.000,00		2.063.000,00		
		8)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-		-			
		9)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	4.368.057.990,00		1.413.755.280,00			
02	Anggaran Kesehatan (a+b)			282.104.892.347,93			265.671.577.842,81		
03	Total Belanja Daerah			1.437.708.835.974,00			1.377.190.655.956,31		
04	Gaji			510.053.411.497,14			467.752.609.128,00		
05	Total Belanja Daerah di luar Gaji (3-4)			927.655.424.476,86			909.438.046.828,31		
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%			30,41%			29,21%		

Sumber : BPKAD

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Permasalahan pembangunan daerah pada dasarnya merujuk pada berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Setiap daerah, termasuk Kabupaten Tojo Una-Una, memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan. Berdasarkan capaian kinerja pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun waktu lima tahun terakhir, permasalahan pokok pembangunan daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Gambar 3.1 Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang terdiri dari 40 OPD selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan LP-SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh OPD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional;
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh BUD/SKPKD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan;
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Arus Kas;



- 4) Laporan Operasional;
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una secara utuh yang menghasilkan:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Arus Kas
 - 4) Laporan Operasional;
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran OPD, BUD, dan pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD, BUD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran OPD, BUD, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau OPD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah atau OPD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 5) Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.



b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca OPD, BUD, dan Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una merupakan Laporan yang menggambarkan posisi keuangan OPD, BUD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas, Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).



Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una selama periode tertentu. Tujuan pelaporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai



sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi - transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sejak tahun 2015 adalah basis akrual. Pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui



pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tidak menggunakan istilah laba, melainkan sisa pembiayaan anggaran lebih/(kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. Penentuan sisa pembayaran anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.



a. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una antara lain bersumber dari pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyeterannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una setelah periode akuntansi berjalan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Tarif Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Keterangan
1.	Lancar	0,5%	
2.	Kurang Lancar	10%	(Nilai Piutang dikurangi jika ada Nilai Agunan atau Nilai Barang Sitaan)
3.	Diragukan	50%	
4.	Macet	100%	

Sumber : Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tojo Una-Una

Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangi dana bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian nilai dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokkan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

1. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
2. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

3. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Batasan Minimum Kapitalisasi

Uraian	Batasan Minimum Kapitalisasi
PERALATAN DAN MESIN	
ALAT BESAR	
Alat Besar Darat	10.000.000,00
Alat Besar Apung	10.000.000,00
Alat Bantu	10.000.000,00
ALAT ANGKUTAN	
Alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000,00
Alat Angkutan Apung Bermotor	5.000.000,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	1.000.000,00
Alat Angkutan Bermotor Udara	10.000.000,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
Alat Bengkel Bermesin	300.000,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000,00
Alat Ukur	300.000,00
ALAT PERTANIAN	
Alat Pengolahan	5.000.000,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
Alat Kantor	300.000,00
Alat Rumah Tangga	300.000,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	300.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
Alat Studio	300.000,00
Alat Komunikasi	500.000,00
Peralatan Pemancar	500.000,00
Peralatan Komunikasi Navigasi	500.000,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
Alat Kedokteran	300.000,00
Alat Kesehatan Umum	300.000,00
ALAT LABORATORIUM	
Unit Alat Laboratorium	300.000,00
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	300.000,00
Alat Peraga Praktek Sekolah	300.000,00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	300.000,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	300.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Batasan Minimum Kapitalisasi
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	300.000,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	300.000,00
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	300.000,00
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	300.000,00
ALAT PERSENJATAAN	
Senjata Api	500.000,00
Persenjataan Non Senjata Api	500.000,00
Senjata Sinar	500.000,00
Alat Khusus Kepolisian	500.000,00
KOMPUTER	
Komputer Unit	300.000,00
Peralatan Komputer	300.000,00
ALAT EKSPLORASI	
Alat Eksplorasi Topografi	300.000,00
Alat Eksplorasi Geofisika	300.000,00
ALAT PENGEBORAN	
Alat Pengeboran Mesin	300.000,00
Alat Pengeboran Non Mesin	300.000,00
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
Sumur	300.000,00
Produksi	300.000,00
Pengolahan Dan Pemurnian	300.000,00
ALAT BANTU EKSPLORASI	
Alat Bantu Eksplorasi	300.000,00
Alat Bantu Produksi	300.000,00
ALAT KESELAMATAN KERJA	
Alat Deteksi	300.000,00
Alat Pelindung	300.000,00
Alat Sar	300.000,00
Alat Kerja Penerbangan	300.000,00
ALAT PERAGA	
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	300.000,00
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
Unit Peralatan Proses/Produksi	300.000,00
RAMBU – RAMBU	
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	300.000,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	300.000,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	300.000,00
PERALATAN OLAH RAGA	
Peralatan Olah Raga	300.000,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	
BANGUNAN GEDUNG	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.000.000,00
MONUMEN	
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	10.000.000,00
BANGUNAN MENARA	
Bangunan Menara Perambuan	10.000.000,00
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
Tugu/Tanda Batas	10.000.000,00
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
JALAN DAN JEMBATAN	
Jalan	0,00
Jembatan	0,00
BANGUNAN AIR	
Bangunan Air Irigasi	0,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	0,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	0,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00
Bangunan Air Kotor	0,00
INSTALASI	
Instalasi Air Bersih / Air Baku	0,00
Instalasi Air Kotor	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Batasan Minimum Kapitalisasi
Instalasi Pengolahan Sampah	0,00
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik	0,00
Instalasi Gardu Listrik	0,00
Instalasi Pertahanan	0,00
Instalasi Gas	0,00
Instalasi Pengaman	0,00
Instalasi Lain	0,00
JARINGAN	
Jaringan Air Minum	0,00
Jaringan Listrik	0,00
Jaringan Telepon	0,00
Jaringan Gas	0,00
ASET TETAP LAINNYA	
BAHAN PERPUSTAKAAN	
Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	0,00
Musik	0,00
Karya Grafika (Graphic Material)	0,00
Three Dimensional Artefacts and Realita	0,00
Tarscalt	0,00
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
Barang Bercorak Kesenian	0,00
Alat Bercorak Kebudayaan	0,00
Tanda Penghargaan	0,00
HEWAN	
Hewan Piaraan	500.000,00
Ternak	500.000,00
Hewan Lainnya	500.000,00
BIOTA PERAIRAN	
Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	500.000,00
Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	500.000,00
Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	500.000,00
Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	500.000,00
Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	500.000,00
Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	500.000,00
Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	500.000,00
Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	500.000,00
Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup di Dalam Air)	500.000,00
Biota Perairan Lainnya	500.000,00
TANAMAN	
Tanaman	500.000,00
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	
Barang Koleksi Non Budaya	300.000,00

Sumber : Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tojo Una-Una

b. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.



d. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintah untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan. Diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan didefinisikan. Berikut dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip, kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi adalah sebagai acuan bagi:

- a. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah di masa depan. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Kebijakan Akuntansi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan dan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan berfungsi sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP meliputi : (a) pemilihan metode akuntansi akan kebijakan akuntansi dalam SAP, (b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi SAP. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

antar periode. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan Laporan Keuangan yang menyajikan informasi mengenai realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode. Laporan ini menunjukkan tingkat ketaatan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disetujui. LRA bertujuan memberikan gambaran mengenai sumber daya ekonomi yang diperoleh, alokasi, dan penggunaannya dalam menjalankan aktivitas pemerintahan daerah. Laporan ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian anggaran, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun Anggaran (TA) 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan elemen utama dalam LRA yang mencerminkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam mengelola sumber daya keuangan guna mendukung berbagai program Pembangunan dan pelayanan public. Laporan ini menyajikan ikhtisar pendapatan yang dianggarkan serta realisasinya pada TA 2024, sekaligus memberikan perbandingan dengan capaian realisasi pada TA 2023. Analisa ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, tingkat pencapaian target, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendapatan daerah.

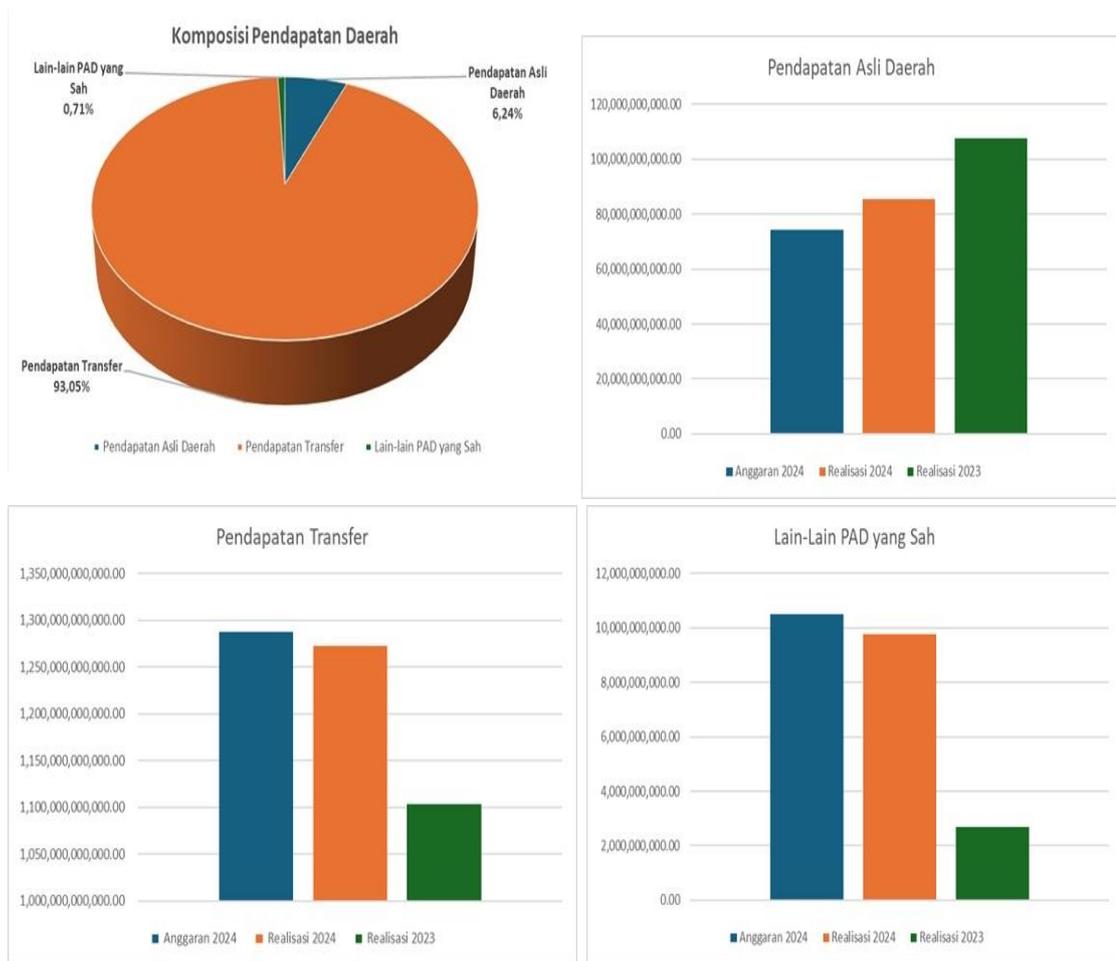
Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	74.329.306.220,00	85.381.839.597,65	114,87	107.675.677.114,91
4.2	Pendapatan Transfer	1.287.610.966.078,00	1.273.155.200.610,00	98,88	1.103.495.196.621,00
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.502.122.357,00	9.758.093.597,30	92,92	2.693.331.842,00
	Jumlah	1.372.442.394.655,00	1.368.295.133.804,95	99,70	1.213.864.205.577,91

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Grafik 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024

5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
4.1.01	Pajak Daerah	12.937.500.000,00	13.929.828.214,00	107,67	13.636.152.679,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.987.221.430,00	6.541.782.278,00	109,26	6.128.186.120,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.639.455.171,00	4.713.872.980,00	101,60	4.165.684.360,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.765.129.619,00	60.196.356.125,65	118,58	83.745.653.955,91
Jumlah		74.329.306.220,00	85.381.839.597,65	114,87	107.675.677.114,91

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.381.839.597,65 mengalami penurunan sebesar Rp22.293.837.517,26 atau 20,70% dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Rp107.675.677.114,91. Realisasi dari masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
4.1.01.06	Pajak Hotel	500.000.000,00	738.579.937,00	147,72	409.523.220,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	2.451.014.999,00	122,55	1.975.925.622,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	5.000.000,00	1.744.000,00	34,88	2.500.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	420.000.000,00	510.536.006,00	121,56	447.425.910,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	5.200.000.000,00	5.408.704.511,00	104,01	4.868.653.463,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	70.000.000,00	55.938.600,00	79,91	107.568.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	10.130.905,00	101,31	4.811.675,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000,00	250.000,00	10,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	1.800.000.000,00	1.334.337.199,00	74,13	2.043.627.259,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.800.000.000,00	2.225.280.799,00	123,63	1.746.846.685,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB)	1.130.000.000,00	1.193.311.258,00	105,60	2.029.270.845,00
Jumlah		12.937.500.000,00	13.929.828.214,00	107,67	13.636.152.679,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Kenaikan pendapatan pada sektor perhotelan dan penginapan terjadi karena adanya sosialisasi, edukasi bersama swasta, dan pengawasan intensif dari perangkat daerah terkait;
- Peningkatan penerimaan sektor restoran, rumah makan, kafe, kantin, catering dan warung terjadi karena adanya upaya aktif dari petugas perangkat daerah terkait yang mengedukasi serta mensosialisasikan kewajiban pajak makan minum kepada pemilik usaha;
- Pada sektor pajak hiburan masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban sesuai dengan regulasi;
- Potensi dari usaha sarang burung walet di Kabupaten Tojo Una-Una masih belum tergarap secara optimal;
- Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan masih dibawah target karena terkendala penagihan dan kepatuhan wajib pajak (WP).

Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Daerah. Rincian Realisasi dari masing-masing akun Pajak Daerah dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Realisasi pajak hotel Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp738.579.937,00 mengalami peningkatan sebesar Rp329.056.717,00 atau 80,35% dari pajak hotel Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp409.523.220,00. Rincian anggaran dan realisasi pajak hotel Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 4 Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	470.000.000,00	713.968.937,00	151,91
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	30.000.000,00	24.611.000,00	82,04
Jumlah		500.000.000,00	738.579.937,00	147,72

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Pajak Restoran

Realisasi pajak restoran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.451.014.999,00 mengalami peningkatan sebesar Rp475.089.377,00 atau 24,04% dari Pajak restoran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.975.925.622,00. Rincian anggaran dan realisasi pajak restoran Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 5 Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	45.000.000,00	79.775.646,00	177,28
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	30.000.000,00	37.698.720,00	125,66
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.500.000,00	1.100.000,00	73,33
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	500.000,00	175.000,00	35,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.923.000.000,00	2.332.265.633,00	121,28
Jumlah		2.000.000.000,00	2.451.014.999,00	122,55

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

3. Pajak Hiburan

Realisasi pajak hiburan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.744.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp756.000,00 atau 30,24% dari pajak hiburan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.500.000,00. Rincian anggaran dan realisasi pajak hiburan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 6 Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	4.000.000,00	1.744.000,00	43,60
Jumlah		5.000.000,00	1.744.000,00	34,88

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

4. Pajak Reklame

Realisasi pajak reklame Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp510.536.006,00 mengalami peningkatan sebesar Rp63.110.096,00 atau 14,11% dari pajak reklame Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp447.425.910,00. Rincian anggaran dan realisasi pajak reklame Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tabel 5.1.1. 7 Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	316.000.000,00	338.925.345,00	107,25
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	104.000.000,00	171.610.661,00	165,01
Jumlah		420.000.000,00	510.536.006,00	121,56

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi dengan kode rekening 4.1.01.10.01 merupakan pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.408.704.511,00 mengalami peningkatan sebesar Rp540.051.048,00 atau 11,09% dari pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.868.653.463,00.

6. Pajak Parkir

Realisasi dengan kode rekening 4.1.01.11.01 merupakan pajak parkir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.938.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp51.629.400,00 atau 48,00% dari pajak parkir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp107.568.000,00.

7. Pajak Air Tanah

Realisasi dengan kode rekening 4.1.01.12.01 merupakan pajak air tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.130.905,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.319.230,00 atau 110,55% dari pajak air tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.811.675,00.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi dengan kode rekening 4.1.01.13.01 merupakan pajak sarang burung walet yang mulai dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp250.000,00.

9. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.334.337.199,00 mengalami penurunan sebesar Rp709.290.060,00 atau 34,71% dari pajak mineral bukan logam dan batuan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.043.627.259,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	250.000.000,00	261.521.140,00	104,61
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.450.000.000,00	978.014.701,00	67,45
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00	94.801.358,00	94,80
Jumlah		1.800.000.000,00	1.334.337.199,00	74,13

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Realisasi dengan kode rekening 4.1.01.15.01 merupakan PBBP2 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.225.280.799,00 mengalami peningkatan sebesar Rp478.434.114,00 atau 27,39% dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.746.846.685,00.



11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi dengan kode rekening 4.1.01.16.01 merupakan BPHTB-Pemindahan Hak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.193.311.258,00 mengalami penurunan sebesar Rp835.959.587,00 atau 41,20% dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.029.270.845,00.

5.1.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 9 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.400.966.000,00	5.143.018.300,00	116,86	4.838.730.900,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.394.355.430,00	1.124.578.576,00	80,65	1.139.330.220,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	191.900.000,00	274.185.402,00	142,88	150.125.000,00
Jumlah		5.987.221.430,00	6.541.782.278,00	109,26	6.128.186.120,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Retribusi Daerah di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Tidak optimalnya pemanfaatan pasar oleh pedagang sehingga menyebabkan penurunan retribusi pasar dan parkir;
- Belum optimalnya realisasi retribusi jasa umum khususnya Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus disebabkan alat baru masih dalam tahap pengenalan dan sosialisasi pada tahun 2024, selain itu penggunaannya masih digratiskan untuk masyarakat umum.

Pemungutan Retribusi Daerah di atas telah dilandasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rincian Realisasi dari masing-masing akun Retribusi Daerah dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Realisasi retribusi jasa umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.143.018.300,00 mengalami peningkatan sebesar Rp304.287.400,00 atau 6,29% dari retribusi jasa umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.838.730.900,00. Rincian anggaran dan realisasi retribusi jasa umum Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 10 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.000.000.000,00	4.886.193.300,00	122,15
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	180.000.000,00	195.225.000,00	108,46
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	210.966.000,00	57.600.000,00	27,30
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00	4.000.000,00	40,00
Jumlah		4.400.966.000,00	5.143.018.300,00	116,86

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

2. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi retribusi jasa usaha Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.124.578.576,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.751.644,00 atau 1,29% dari retribusi jasa usaha Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.139.330.220,00. Rincian anggaran dan realisasi retribusi jasa usaha Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 11 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	255.179.000,00	260.604.000,00	102,13
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	201.672.000,00	124.257.000,00	61,61
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	65.000.000,00	75.207.500,00	115,70
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	21.660.000,00	12.800.000,00	59,10
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	42.337.500,00	41.450.000,00	97,90
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	195.526.791,00	208.631.596,00	106,70
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00	179.830.000,00	119,89
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	94.260.000,00	9.000.000,00	9,55
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	112.669.139,00	91.543.060,00	81,25
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	203.605.000,00	56.355.420,00	27,68
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	52.446.000,00	64.900.000,00	123,75
	Jumlah	1.394.355.430,00	1.124.578.576,00	80,65

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi dengan kode rekening 4.1.02.03.07 merupakan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang mulai dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp191.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp274.185.402,00.

5.1.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 12 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.639.455.171,00	4.713.872.980,00	101,60	4.165.684.360,00
	Jumlah	4.639.455.171,00	4.713.872.980,00	101,60	4.165.684.360,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya peningkatan investasi permanen dalam penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Sulawesi Tengah pada tahun 2024, sehingga menyebabkan pembagian deviden meningkat secara signifikan. Deviden merupakan bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham, ketika laba meningkat pembagian deviden pun menjadi lebih besar.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pembagian deviden atas laba dari Lembaga keuangan PT Bank Pembangunan Sulawesi Tengah. Pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT Bank Pembangunan Sulawesi Tengah diakui berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT Bank Sulteng Nomor 69 tanggal 21 Juni 2013.

5.1.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 13 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	454.909.619,00	638.647.069,00	140,39	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	107.150.000,00	68.955.000,00	64,35	18.475.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	3.070.000,00	3.070.000,00	100,00	18.100.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	700.000.000,00	45.774.805,61	6,54	206.450.372,96
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00	3.648.326.720,53	182,42	1.930.204.611,91
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.500.000.000,00	3.173.580.523,17	126,94	5.269.889.969,19
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	45.000.000.000,00	52.618.002.007,34	116,93	67.280.179.423,85
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	9.022.354.578,00
Jumlah		50.765.129.619,00	60.196.356.125,65	118,58	83.745.653.955,91

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Adanya pendapatan bunga yang bersumber dari Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Bank Indonesia tahun 2024;
- Adanya peningkatan pendapatan BLUD atas pembayaran piutang tahun 2023 yang direalisasikan pada tahun 2024.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan

Realisasi dengan kode rekening 4.1.04.01.02 merupakan Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin yang mulai dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp454.909.619,00 dan terealisasi sebesar Rp638.647.069,00.

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan bersumber dari Hasil Sewa BMD pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan Sekretariat Daerah. Realisasi dengan kode rekening 4.1.04.03.01 merupakan Hasil Sewa BMD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp68.955.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp50.400.000,00 atau 273,23% dari Hasil Sewa BMD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.475.000,00.

3. Hasil Kerja Sama Daerah

Hasil Kerja Sama Daerah bersumber dari penjualan hasil perikanan pada Dinas Perikanan. Realisasi dengan kode rekening 4.1.04.04.01 merupakan Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.070.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.030.000,00 atau 83,04% dari Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.100.000,00.

4. Jasa Giro

Jasa giro bersumber dari hasil penempatan uang pada beberapa rekening bank. Realisasi jasa giro Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp45.774.805,61 mengalami penurunan sebesar Rp160.675.567,35 atau 77,83% dari jasa giro Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp206.450.372,96. Rincian anggaran dan realisasi jasa giro Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 14 Anggaran dan Realisasi Jasa Giro TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	650.000.000,00	10.060.125,00	1,55
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	35.714.680,61	71,43
	Jumlah	700.000.000,00	45.774.805,61	6,54

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga bersumber dari hasil penempatan deposito pada PT Bank Sulteng, BRI, Bank Mandiri dan BNI. Realisasi dengan kode rekening 4.1.04.07.01 merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.648.326.720,53 mengalami peningkatan sebesar Rp1.718.122.108,62 atau 89,01% dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.930.204.611,91.

6. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian bersumber dari pengembalian belanja daerah pada tahun-tahun sebelum Tahun Anggaran 2024, yang sebelumnya telah diperhitungkan sebagai belanja pada tahun yang bersangkutan. Realisasi dengan kode rekening 4.1.04.15.04 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran



Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.173.580.523,17 mengalami penurunan sebesar Rp2.096.309.446,02 atau 39,78% dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.269.889.969,19.

7. Pendapatan BLUD

Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Ampana diatur dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Ampana. Pendapatan BLUD bersumber dari jasa pelayanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak mengikat (hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD serta hasil investasi). Mekanisme pengakuan Pendapatan BLUD berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD oleh BUD.

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp52.618.002.007,34 mengalami penurunan sebesar Rp14.662.177.416,51 atau 21,79% dari Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp67.280.179.423,85 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1. 15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	44.089.200.000,00	52.298.031.741,00	118,62
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	910.800.000,00	319.970.266,34	35,13
Jumlah		45.000.000.000,00	52.618.002.007,34	116,93

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rincian laporan keuangan BLUD *Audited* dapat dilihat pada *lampiran 60*.

8. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pendapatan Dana Kapitasi JKN merupakan dana yang langsung diterima oleh Puskesmas dari Pemerintah Pusat untuk kebutuhan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada puskesmas. Untuk mekanisme pengakuan Pendapatan Dana Kapitasi JKN berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi (SP2DK) oleh BUD. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dianggarkan pada rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.1.1. 16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.244.269.788.000,00	1.226.615.386.346,00	98,58	1.062.475.826.443,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.341.178.078,00	46.539.814.264,00	107,38	41.019.370.178,00
Jumlah		1.287.610.966.078,00	1.273.155.200.610,00	98,88	1.103.495.196.621,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.110.127.487.000,00	1.092.473.085.346,00	98,41	898.145.207.443,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	49.620.369.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	113.557.804.000,00	113.557.804.000,00	100,00	114.710.250.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	20.584.497.000,00	20.584.497.000,00	100,00	0,00
Jumlah		1.244.269.788.000,00	1.226.615.386.346,00	98,58	1.062.475.826.443,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rincian anggaran dan realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 18 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	235.451.115.000,00	235.460.691.000,00	100,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	650.038.723.000,00	636.414.767.281,00	97,90
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	114.618.211.000,00	113.426.288.327,00	98,96
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	110.019.438.000,00	107.171.338.738,00	97,41
Jumlah		1.110.127.487.000,00	1.092.473.085.346,00	98,41

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Realisasi anggaran dana perimbangan khususnya pada DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak mencapai target disebabkan tidak terpenuhinya kuota PPPK yang telah dianggarkan;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

- b. Penyerapan anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direalisasikan berdasarkan nilai kontrak pekerjaan;
- c. Ketidakesesuaian perhitungan anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik disebabkan penganggarannya tidak dikurangi dengan SiLPA tahun sebelumnya.

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Rincian Saldo Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggarkan dan direalisasikan serta persentase capaian realisasi pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 19 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.105.216.000,00	4.105.216.000,01	100,00
DBH PPh Pasal 21	4.483.269.000,00	4.483.268.999,99	100,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	74.632.000,00	74.632.000,00	100,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	9.576.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	13.397.082.000,00	13.397.082.000,00	100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	124.479.756.000,00	124.479.755.999,99	100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	39.712.706.000,00	39.712.706.000,01	100,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	41.688.719.000,00	41.688.719.000,00	100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	130.202.000,00	130.202.000,00	100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.434.568.000,00	4.434.568.000,00	100,00
DBH Sawit	2.944.965.000,00	2.944.965.000,00	100,00
Jumlah	235.451.115.000,00	235.460.691.000,00	100,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp235.460.691.000,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran V.2 sampai dengan V.10 disebabkan adanya pencairan dana TDF.

2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Rincian Saldo Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan dan direalisasikan serta persentase capaian realisasi pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 20 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
DAU	415.384.982.000,00	415.384.982.000,00	100,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	71.530.299.000,00	57.906.343.281,00	80,95
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	67.691.714.000,00	67.691.714.000,00	100,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	41.687.825.000,00	41.687.825.000,00	100,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	51.343.903.000,00	51.343.903.000,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
Pekerjaan Umum			
Jumlah	650.038.723.000,00	636.414.767.281,00	97,90

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp636.414.767.281,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 disebabkan tidak terpenuhinya kuota PPPK yang telah dianggarkan.

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan serta persentase capaian realisasi pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 21 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.102.500.000,00	1.101.048.000,00	99,87
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.292.275.000,00	14.161.431.750,00	99,08
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.979.513.000,00	4.950.434.000,00	99,42
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	333.545.000,00	326.428.000,00	97,87
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	498.074.000,00	99,61
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	299.889.000,00	299.850.000,00	99,99
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.117.947.000,00	2.115.763.000,00	99,90
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.597.500.000,00	3.580.186.350,00	99,52
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	43.756.064.000,00	43.134.061.800,00	98,58
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	14.108.930.000,00	13.945.007.000,00	98,84
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi	8.000.000.000,00	7.884.200.000,00	98,55
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	10.250.753.000,00	10.173.373.000,00	99,25
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.479.295.000,00	6.456.431.427,00	99,65
Jumlah	114.618.211.000,00	113.426.288.327,00	98,96

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp113.426.288.327,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 disebabkan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direalisasikan berdasarkan nilai kontrak pekerjaan.



4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan serta persentase capaian realisasi pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 22 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	24.813.880.000,00	24.780.747.164,00	99,87
DAK Non Fisik-TPG PNSD	31.218.336.000,00	31.218.336.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.969.250.000,00	2.969.250.000,00	100,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	19.228.058.000,00	19.228.058.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.489.600.000,00	3.435.054.000,00	98,44
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.709.200.000,00	1.640.940.000,00	96,01
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.244.608.000,00	5.191.203.216,00	98,98
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	353.401.125,00	87,04
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.190.754.000,00	3.942.537.063,00	94,08
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	366.131.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.383.621.000,00	14.411.812.170,00	87,96
Jumlah	110.019.438.000,00	107.171.338.738,00	97,41

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp107.171.338.738,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 disebabkan adanya pengurangan atas SiLPA Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun sebelumnya.

5. Dana Desa

Dana Desa yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp113.557.804.000,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran V.16 tentang Rincian Dana Desa menurut /Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 disebabkan adanya penambahan insentif desa sesuai dengan PMK 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

6. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp20.584.497.000,00 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Lampiran V.17 tentang Rincian Insentif Fiskal menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 disebabkan adanya penyaluran alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan yang disalurkan sebesar Rp6.211.015.000,00.

5.1.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024,



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	43.341.178.078,00	46.539.814.264,00	107,38	38.339.370.178,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	2.680.000.000,00
Jumlah		43.341.178.078,00	46.539.814.264,00	107,38	41.019.370.178,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Pendapatan Transfer Antar Daerah dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi dengan kode rekening 4.2.02.01.01 merupakan pendapatan bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.539.814.264,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.200.444.086,00 atau 21,39% dari pendapatan bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.339.370.178,00.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya peningkatan pendapatan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, disebabkan adanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahun;
- b. Adanya intensifikasi dalam penagihan piutang kendaraan bermotor sehingga menyebabkan peningkatan penerimaan pendapatan dana bagi hasil di kabupaten.

5.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 24 Anggaran & Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 & 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.032.000.000,00	1.032.000.000,00	100,00	2.693.331.842,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.470.122.357,00	8.726.093.597,30	92,14	0,00
Jumlah		10.502.122.357,00	9.758.093.597,30	99,70	2.693.331.842,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.1.1. 25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.032.000.000,00	1.032.000.000,00	100,00	349.900.000,00
	Jumlah	1.032.000.000,00	1.032.000.000,00	100,00	349.900.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2024 berupa pendapatan hibah sanitasi sebesar Rp1.032.000.000,00 sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran V.14 tentang Rincian Hibah kepada Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hibah di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya tambahan pendapatan hibah sanitasi dari Pemerintah Pusat yang merupakan kontribusi dalam mendukung program sanitasi tingkat daerah.

5.1.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 26 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	9.470.122.357,00	8.726.093.597,30	92,14	0,00
	Jumlah	9.470.122.357,00	8.726.093.597,30	92,14	0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2024 sebesar Rp8.726.093.597,30 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dialokasikan dalam APBD untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik. LRA menyajikan rincian saldo belanja daerah yang telah dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, termasuk persentase capaian realisasi.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 27 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1	Belanja Operasi	1.020.730.742.469,87	966.886.071.221,31	94,72	775.133.396.504,70
5.2	Belanja Modal	220.774.282.078,13	214.284.184.008,00	97,06	251.332.245.844,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	304.847.526,00	51.425.000,00	16,87	23.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	195.898.963.900,00	195.898.963.900,00	100,00	184.503.894.200,00
Jumlah		1.437.708.835.974,00	1.377.120.644.129,31	95,79	1.210.992.536.548,70

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.1.2.1 Belanja Operasi

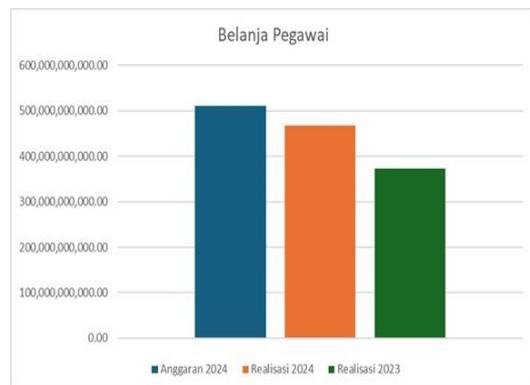
Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 28 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai	510.053.411.497,14	467.752.609.128,00	91,71	373.618.188.186,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.248.909.548,73	437.770.694.078,31	97,88	357.250.742.082,70
5.1.04	Belanja Subsidi	330.000.000,00	330.000.000,00	100,00	550.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	60.198.211.504,00	58.183.774.451,00	96,65	35.978.355.030,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.900.209.920,00	2.848.993.564,00	98,23	7.736.111.206,00
Jumlah		1.020.730.742.469,87	966.886.071.221,31	94,72	775.133.396.504,70

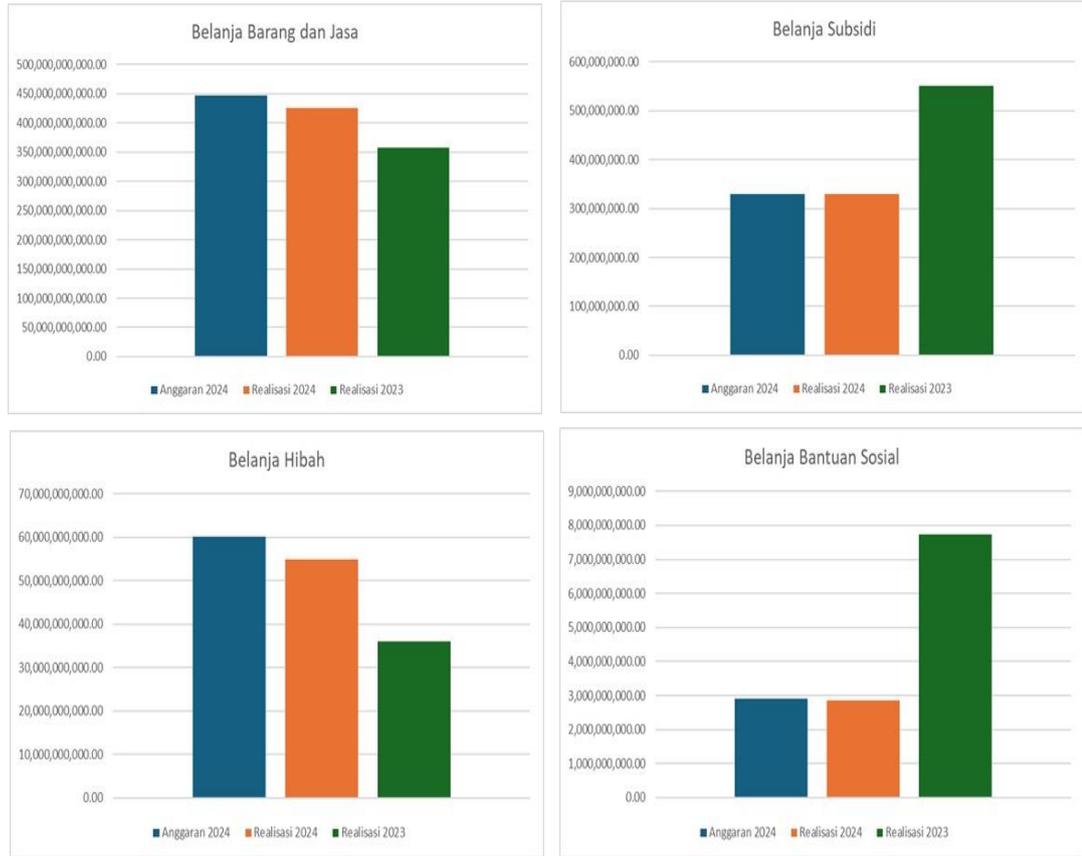
Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



Grafik 5.2 Realisasi Belanja Operasi TA 2024

Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *lampiran 45*.

5.1.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	384.552.171.770,14	350.603.282.203,00	91,17	264.776.463.894,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	42.232.104.372,00	37.753.266.519,00	89,39	39.058.117.123,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.011.455.622,00	63.275.326.431,00	95,86	53.284.972.112,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.581.906.691,00	9.960.619.814,00	94,13	9.923.863.864,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	162.733.042,00	161.284.817,00	99,11	162.711.680,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan	635.200.000,00	568.000.000,00	89,42	582.600.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
	DPRD serta KDH/WKDH				
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	5.877.840.000,00	5.430.829.344,00	92,39	5.829.459.513,00
	Jumlah	510.053.411.497,14	467.752.609.128,00	91,71	373.618.188.186,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Capaian realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena adanya penambahan anggaran untuk pembayaran gaji ASN PPPK;
- Perhitungan TPP didasarkan pada beban kinerja.

Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **lampiran 46**. Rincian Realisasi dari masing-masing akun Belanja Pegawai dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp350.603.282.203,00 atau 91,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp384.552.171.770,14. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	300.958.797.534,14	272.437.172.642,00	90,52
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.016.852.762,00	23.451.900.201,00	97,65
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.467.834.269,00	6.375.970.660,00	98,58
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.137.928.700,00	12.010.305.610,00	98,95
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.564.214.747,00	6.204.761.750,00	94,52
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.642.378.099,00	14.221.810.500,00	97,13
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	319.356.176,00	309.858.171,00	97,03
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.321.959,00	4.145.782,00	95,92
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	15.406.937.981,00	13.435.667.925,00	87,21
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	564.184.796,00	537.777.066,00	95,32
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.693.139.888,00	1.613.911.896,00	95,32
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.776.224.859,00	0,00	0,00
	Jumlah	384.552.171.770,14	350.603.282.203,00	91,17

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp37.753.266.519,00 atau 89,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.232.104.372,00. Rincian anggaran dan realisasi Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.1.1. 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	36.738.104.372,00	32.905.690.959,00	89,57
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.494.000.000,00	4.847.575.560,00	88,23
Jumlah		42.232.104.372,00	37.753.266.519,00	89,39

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp63.275.326.431,00 atau 95,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp66.011.455.622,00. Rincian anggaran dan realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	620.003.750,00	593.536.400,00	95,73
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	145.908.525,00	53.526.492,00	36,68
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	32.579.124.100,00	32.361.751.400,00	99,33
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	19.788.790.935,00	18.059.520.000,00	91,26
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.081.000.000,00	2.857.000.000,00	92,73
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.220.124.560,00	1.933.263.528,00	87,08
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.571.998.752,00	6.421.511.111,00	97,71
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.004.505.000,00	995.217.500,00	99,08
Jumlah		66.011.455.622,00	63.275.326.431,00	95,86

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp9.960.619.814,00 atau 94,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.581.906.691,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 33 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	591.540.000,00	550.620.000,00	93,08
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	73.235.800,00	41.617.800,00	56,83
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.138.160,00	54.749.520,00	65,85
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	48.478.500,00	86,33
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	799.840.500,00	98,23
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100.191.224,00	70.978.950,00	70,84
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	525.000.000,00	66,67
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.510.449,00	489.116,00	8,88



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.684.404.058,00	1.673.110.428,00	99,33
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.835.000.000,00	2.835.000.000,00	100,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	401.000.000,00	210.735.000,00	52,55
Jumlah		10.581.906.691,00	9.960.619.814,00	94,13

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp161.284.817,00 atau 99,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp162.733.042,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.087.500,00	54.600.000,00	99,12
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.157.500,00	98.280.000,00	99,12
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.045.865,00	2.027.760,00	99,12
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	689.757,00	683.937,00	99,16
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.260,00	2.240,00	99,12
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.296.200,00	5.241.600,00	98,97
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.490,00	112.320,00	98,97
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.470,00	336.960,00	98,97
Jumlah		162.733.042,00	161.284.817,00	99,11

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp568.000.000,00 atau 89,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp635.200.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 35 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	235.200.000,00	168.000.000,00	71,43
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
Jumlah		635.200.000,00	568.000.000,00	89,42

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

7. Belanja Pegawai BLUD

Belanja dengan kode rekening 5.1.01.99.99 merupakan Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp5.430.829.344,00 atau 92,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.877.840.000,00.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

5.1.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 36 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang	126.400.767.615,60	123.775.482.922,50	97,92	61.423.690.250,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	138.996.370.071,56	132.172.402.480,81	95,09	138.399.857.244,70
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.795.657.330,08	18.827.821.288,00	95,11	20.736.256.073,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	90.710.390.588,49	89.320.424.091,00	98,47	58.890.549.414,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.053.742.500,00	951.182.948,00	90,27	1.352.260.106,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.436.956.783,00	20.377.465.986,00	99,71	20.892.483.563,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.179.446.440,00	503.659.689,00	42,70	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	48.675.578.220,00	51.842.254.673,00	106,51	55.555.645.432,00
Jumlah		447.248.909.548.73	437.770.694.078.31	97,88	357.250.742.082,70

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Adanya pembayaran utang jasa tenaga kesehatan tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2024, sehingga capaian realisasi belanja barang dan jasa BLUD melampaui dari anggaran yang ditetapkan;
- Adanya penyesuaian perhitungan jasa insentif yang dibayarkan sesuai dengan kinerja pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas.

Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *lampiran 47*. Rincian Realisasi dari masing-masing akun Belanja Barang dan Jasa dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Barang

Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp123.775.482.922,50 atau 97,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp126.400.767.615,60.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 37 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(%)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	125.763.017.615,60	123.145.132.922,50	97,92



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(%)
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	637.750.000,00	630.350.000,00	98,84
Jumlah		126.400.767.615,60	123.775.482.922,50	97,92

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Belanja Jasa

Belanja Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp132.172.558.480,81 atau 95,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp138.996.370.071,56. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 38 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	97.988.915.795,88	92.800.738.648,81	94,71
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.737.058.048,72	19.765.663.313,00	95,32
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.042.564.842,96	9.803.428.811,00	97,62
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.047.365.116,00	2.862.666.216,00	93,94
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	33.500.000,00	33.500.000,00	100,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.627.556.466,00	3.274.318.825,00	90,26
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.030.002,00	89.900.000,00	99,86
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	244.050.000,00	174.647.610,00	71,56
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.163.829.800,00	3.346.039.057,00	105,76
Jumlah		138.996.370.071,56	132.172.402.480,81	95,09

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

3. Belanja Pemeliharaan

Belanja Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp18.827.821.288,00 atau 95,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.795.657.330,08. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 39 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.336.248.136,08	9.109.382.557,00	97,57
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.234.757.314,00	8.096.302.851,00	98,32
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.027.466.800,00	1.427.050.800,00	70,39
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	197.185.080,00	195.085.080,00	98,94
Jumlah		19.795.657.330,08	18.827.821.288,00	95,12

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja dengan kode rekening 5.1.02.04.01 merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp89.320.424.091,00 atau 98,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp90.710.390.588,49.



5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja dengan kode rekening 5.1.02.05.01 merupakan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp951.182.948,00 atau 90,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.053.742.500,00.

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja dengan kode rekening 5.1.02.88.88 merupakan Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp20.377.465.986,00 atau 99,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.436.956.783,00. Mekanisme pengakuan Belanja Barang dan Jasa BOS berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh BUD.

7. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Belanja dengan kode rekening 5.1.02.90.01 merupakan Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp503.659.689,00 atau 42,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.179.446.440,00. Mekanisme pengakuan Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh BUD.

8. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Ampana Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp51.842.254.673,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tersebut melebihi Pagu Anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp48.675.578.220,00 atau 106,51%.

Pelampauan anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada pasal 15 (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat, serta pada pasal 15 (3) yang menyatakan bahwa fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Selain aturan tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pada pasal 74 menyatakan bahwa pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan secara definitif. Ambang batas merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD dan hibah terikat. Selanjutnya pada pasal 75 menyatakan bahwa besaran presentase ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas. Besaran presentase ambang batas tersebut memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional meliputi (a) kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan (b) kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan. Presentase ambang batas merupakan



kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Besaran presentase ambang batas tersebut digunakan apabila pendapatan BLUD melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan. Penggunaan belanja barang dan jasa BLUD dapat dilakukan dengan penggunaan langsung. Mekanisme pengakuan Belanja Barang dan Jasa BLUD berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD oleh BUD.

5.1.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Subsidi TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 40 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2024 dan 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	330.000.000,00	330.000.000,00	100,00	550.000.000,00
Jumlah		330.000.000,00	330.000.000,00	100,00	550.000.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Subsidi di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan tidak adanya subsidi pada masyarakat untuk alat transportasi darat dan laut dalam rangka penanganan dampak inflasi di tahun 2024.

Belanja Subsidi dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Subsidi Sembako kepada Masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una.

5.1.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 41 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	45.111.971.120,00	43.111.971.120,00	95,57	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.416.110.000,00	13.475.179.262,00	100,44	34.392.741.080,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	771.285.000,00	778.065.845,00	100,88	741.419.845,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai	898.845.384,00	818.558.224,00	91,07	844.194.105,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
	Politik				
Jumlah		60.198.211.504,00	58.183.774.451,00	96,65	35.978.355.030,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Adanya belanja bantuan hibah kepada kepada Bawaslu, Polri, TNI dan KPU terkait Pemilihan Kepala Daerah;
- Adanya perhitungan realisasi belanja hibah dana BOS dan BOP berdasarkan nilai NPHD.

Rincian saldo Belanja Hibah pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *lampiran 48*. Rincian Realisasi dari masing-masing akun Belanja Hibah dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah uang kepada Bawaslu, Polri, TNI dan KPU terkait Pemilihan Kepala Daerah yang didasarkan pada Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Hibah uang kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp43.111.971,120,00 atau 95,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp45.111.971.120,00.

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan pemberian hibah berupa uang, barang dan jasa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 42 Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.571.110.000,00	11.765.179.262,00	101,68
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.845.000.000,00	1.710.000.000,00	92,68
Jumlah		13.416.110.000,00	13.475.179.262,00	100,44

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



3. Belanja Hibah Dana BOS

Pemberian Hibah Dana BOS merupakan pemberian hibah kepada satuan Pendidikan dasar, dan/atau menengah pertama dan/atau khusus swasta selama TA 2024 yang didasarkan pada Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp778.065.845,00 atau 100,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp771.285.000,00.

4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Memperoleh Suara di DPRD Kabupaten Tojo Una-Una sesuai Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 100.3.3.2/72/KESBANGPOL/2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 43 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
1	Partai Amanat Nasional	93.208.685,00	93.208.685,00	100,00
2	Partai Bulan Bintang	34.478.670,00	34.478.670,00	100,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	81.230.130,00	81.230.130,00	100,00
4	Partai Demokrat	84.005.865,00	84.005.865,00	100,00
5	Partai Gerindra	80.287.160,00	0,00	0,00
6	Partai Golkar	161.836.340,00	161.836.340,00	100,00
7	Partai Kebangkitan Bangsa	87.494.144,00	87.494.144,00	100,00
8	Partai Nasdem	151.392.770,00	151.392.770,00	100,00
9	Partai Perindo	45.216.475,00	45.216.475,00	100,00
10	Partai Keadilan Sejahtera	13.609.255,00	13.609.255,00	100,00
11	Partai Persatuan Pembangunan	66.085.890,00	66.085.890,00	100,00
Jumlah		898.845.384,00	818.558.224,00	91,07

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 44 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.284.900.000,00	1.234.889.939,00	96,11	1.544.410.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	2.080.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.347.269.920,00	1.346.075.625,00	99,91	3.988.489.206,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	264.040.000,00	264.028.000,00	100,00	123.212.000,00
Jumlah		2.900.209.920,00	2.848.993.564,00	98,23	7.736.111.206,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Adanya bantuan sosial berupa peningkatan kualitas rumah swadaya pada Masyarakat tahun 2023;
- Menurunnya capaian realisasi belanja bantuan sosial di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan tidak adanya Kegiatan Program Gerak Cepat Pengantasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) kepada kepala keluarga atau Rumah Tangga Miskin (RTM).

Pemberian bantuan sosial di atas, sesuai dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Rincian saldo Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *lampiran 49*. Rincian Realisasi dari masing-masing akun Belanja Bantuan Sosial dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.234.889.939,00 atau 96,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.284.900.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Bantuan Sosial kepada Individu Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 45 Anggaran dan Realisasi Bantuan Sosial kepada Individu TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.183.400.000,00	1.133.536.939,00	95,79
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	101.500.000,00	101.353.000,00	99,86
Jumlah		1.284.900.000,00	1.234.889.939,00	96,11

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Belanja dengan kode rekening 5.1.06.02.01 merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp4.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.000.000,00.



3. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.346.075.625,00 atau 99,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.347.269.920,00. Meningkatnya capaian realisasi belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan adanya pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa berprestasi. Rincian anggaran dan realisasi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 46 Anggaran dan Realisasi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	930.000.000,00	930.000.000,00	100,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	417.269.920,00	416.075.625,00	99,71
Jumlah		1.347.269.920,00	1.346.075.625,00	99,91

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

4. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Belanja dengan kode rekening 5.1.06.04.02 merupakan Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp264.028.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp264.040.000,00.

5.1.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 47 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	910.595.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.988.594.546,55	36.037.426.517,00	97,43	45.588.017.814,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.826.936.113,58	40.544.197.368,00	99,31	53.133.843.499,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	141.537.109.341,00	136.318.750.580,00	96,31	149.756.808.488,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.421.642.077,00	1.383.809.543,00	97,34	1.942.981.043,00
Jumlah		220.774.282.078,13	214.284.184.008,00	97,06	251.332.245.844,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *lampiran 50*.

5.1.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 48 Anggaran & Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 & 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	910.595.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	910.595.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pada Tahun Anggaran 2024, tidak terdapat alokasi anggaran untuk belanja modal tanah.

5.1.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 49 Anggaran & Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 & 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.412.300.000,00	6.074.750.000,00	94,74	8.220.180.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.629.623.050,00	2.531.271.090,00	96,26	15.586.859.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	39.205.000,00	39.138.300,00	99,83	16.271.100,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	91.304.745,25	90.491.500,00	99,11	2.712.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.033.815.458,00	7.813.519.357,00	97,26	6.256.050.583,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	779.560.685,00	763.595.188,00	97,95	440.700.818,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.063.068.023,30	7.977.462.691,00	98,94	6.031.959.817,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	987.948.000,00	985.589.900,00	99,76	854.857.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.042.048.445,00	6.852.337.387,00	97,31	5.263.119.899,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	19.250.000,00	19.219.950,00	99,84	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi,	10.000.000,00	9.715.000,00	97,15	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
	Pengolahan dan Pemurnian				
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	75.500.000,00	75.500.000,00	100,00	61.896.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	300.000.000,00	298.080.000,00	99,36	355.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	65.000.000,00	63.550.000,00	97,77	264.850.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.439.971.140,00	2.443.206.154,00	100,13	2.222.561.597,00
	Jumlah	36.988.594.546,55	36.037.426.517,00	97,43	45.588.017.814,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp36.037.426.517,00 merupakan salah satu penambah nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin setelah dikurangi koreksi/reklasifikasi. Realisasi dan reklasifikasi belanja modal per OPD disajikan dalam rekap rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode per 31 Desember 2024 pada *lampiran 19*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Penurunan capaian realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 disebabkan oleh pengurangan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas yang dialihkan ke skema sewa kendaraan dinas yang dianggap lebih efisien.
- Adanya pengadaan Belanja Modal Elektronik/Electric berupa Perangkat Perekaman KTP elektronik untuk menunjang pelayanan pada masyarakat.

Rincian saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *lampiran 51*. Rincian Realisasi dari masing-masing akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Alat Besar

Belanja Modal Alat Besar Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp6.074.750.000,00 atau 94,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.412.300.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 50 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	5.309.500.000,00	4.973.000.000,00	93,66
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	915.000.000,00	914.950.000,00	99,99
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	187.800.000,00	186.800.000,00	99,47
	Jumlah	6.412.300.000,00	6.074.750.000,00	94,74

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

2. Belanja Modal Alat Angkutan

Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.531.271.090,00 atau 96,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.629.623.050,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 51 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.418.723.050,00	2.320.771.090,00	95,95
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000,00	900.000,00	90,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	209.900.000,00	209.600.000,00	99,86
Jumlah		2.629.623.050,00	2.531.271.090,00	96,26

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp39.138.300,00 atau 99,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp39.205.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	19.205.000,00	19.205.000,00	100,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	20.000.000,00	19.933.300,00	99,67
Jumlah		39.205.000,00	39.138.300,00	99,83

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

4. Belanja Modal Alat Pertanian

Realisasi Belanja dengan kode rekening 5.2.02.04.01 merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp90.491.500,00 atau 99,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp91.304.745,25.

5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp7.813.519.357,00 atau 97,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.033.815.458,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	966.152.286,00	861.268.693,00	89,14
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.067.663.172,00	6.952.250.664,00	98,37
Jumlah		8.033.815.458,00	7.813.519.357,00	97,26

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp763.595.188,00 atau 97,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp779.560.685,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	706.635.685,00	696.015.188,00	98,50
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	37.225.000,00	31.880.000,00	85,64
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	35.700.000,00	35.700.000,00	100,00
Jumlah		779.560.685,00	763.595.188,00	97,95

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp7.977.462.691,00 atau 98,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.063.068.023,30. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 55 Anggaran & Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran & Kesehatan TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	377.290.707,00	350.404.402,00	92,87
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7.685.777.316,30	7.627.058.289,00	99,24
Jumlah		8.063.068.023,30	7.977.462.691,00	98,94

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

8. Belanja Modal Alat Laboratorium

Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp985.589.900,00 atau 99,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp987.948.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	141.000.000,00	139.375.000,00	98,85
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	509.598.000,00	508.864.900,00	99,86
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	337.350.000,00	337.350.000,00	100,00
Jumlah		987.948.000,00	985.589.900,00	99,76

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

9. Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp6.852.337.387,00 atau 97,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.042.048.445,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:



Tabel 5.1.1. 57 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.650.169.378,00	5.522.949.911,00	97,75
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.391.879.067,00	1.329.387.476,00	95,51
	Jumlah	7.042.048.445,00	6.852.337.387,00	97,31

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

10. Belanja Modal Alat Eksplorasi

Belanja dengan kode rekening 5.2.02.11.02 merupakan Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika terealisasi sebesar Rp19.219.950,00 atau 99,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.250.000,00.

11. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Belanja dengan kode rekening 5.2.02.13.01 merupakan Belanja Modal Sumur Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp9.715.000,00 atau 97,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00.

12. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Belanja dengan kode rekening 5.2.02.15.02 merupakan Belanja Modal Alat Pelindung Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp75.500.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan.

13. Belanja Modal Alat Peraga

Belanja dengan kode rekening 5.2.02.16.01 merupakan belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp298.080.000,00 atau 99,36% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00.

14. Belanja Modal Rambu-Rambu

Belanja dengan kode rekening 5.2.02.18.01 merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp63.550.000,00 atau 97,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp65.000.000,00.

15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Belanja dengan kode rekening 5.2.02.88.88 merupakan belanja modal peralatan dan mesin BOS Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.443.206.154,00 atau 100,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.439.971.140,00.

5.1.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.1.1. 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	37.431.636.177,58	37.152.657.468,00	99,25	48.115.746.899,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.395.299.936,00	3.391.539.900,00	99,89	5.018.096.600,00
Jumlah		40.826.936.113,58	40.544.197.368,00	99,31	53.133.843.499,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp40.544.197.368,00 merupakan salah satu penambah nilai Perolehan aset tetap gedung dan bangunan setelah dikurangi koreksi/reklasifikasi. Realisasi dan reklasifikasi belanja modal per OPD disajikan dalam rekap rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode per 31 Desember 2024 pada *lampiran 20*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Menurunnya capaian realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 disebabkan menurunnya belanja modal pagar sekolah.

Rincian saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *lampiran 52*. Rincian Realisasi dari masing-masing akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp37.152.657.468,00 atau 99,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp37.431.636.177,58. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.231.636.177,58	36.953.057.468,00	99,25
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200.000.000,00	199.600.000,00	99,80
Jumlah		37.431.636.177,58	37.152.657.468,00	99,25

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Belanja Modal dengan kode rekening 5.2.03.04.01 merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.391.539.900,00 atau 99,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.395.299.936,00.



5.1.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	116.513.810.236,00	111.621.878.590,00	95,80	93.352.817.900,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	19.875.439.105,00	19.861.824.000,00	99,93	45.736.407.100,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	5.147.860.000,00	4.835.047.990,00	93,92	10.632.583.488,00
Jumlah		141.537.109.341,00	136.318.750.580,00	96,31	149.756.808.488,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp136.318.750.580,00 merupakan salah satu penambah nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi setelah dikurangi koreksi/reklasifikasi. Realisasi dan reklasifikasi belanja modal per opd disajikan dalam rekap rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap jalan, jaringan dan irigasi pada awal dan akhir periode per 31 Desember 2024 pada **lampiran 22**.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Penurunan capaian realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi di Tahun Anggaran 2024 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 disebabkan oleh meningkatnya pengadaan aset tetap yang diperuntukkan untuk diserahkan ke masyarakat sehingga pengadaannya dialihkan ke pengadaan barang dan jasa.

Rincian saldo Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **lampiran 53**. Rincian Realisasi dari masing-masing akun Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp111.621.878.590,00 atau 95,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp116.513.810.236,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	112.273.045.236,00	107.420.613.590,00	95,68
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.240.765.000,00	4.201.265.000,00	99,07
Jumlah		116.513.810.236,00	111.621.878.590,00	95,80

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

2. Belanja Modal Bangunan Air

Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp19.861.824.000,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.875.439.105,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 62 Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	703.175.000,00	699.550.000,00	99,48
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.605.577.000,00	10.603.786.000,00	99,98
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	215.200.000,00	214.050.000,00	99,47
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	8.351.487.105,00	8.344.438.000,00	99,92
	Jumlah	19.875.439.105,00	19.861.824.000,00	99,93

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

3. Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Jaringan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp4.835.047.990,00 atau 93,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.147.860.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 63 Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.428.000.000,00	1.417.159.000,00	99,24
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.719.860.000,00	3.417.888.990,00	91,88
	Jumlah	5.147.860.000,00	4.835.047.990,00	93,92

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	11.610.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	120.000.000,00	119.850.000,00	99,88	5.500.000,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	135.975.000,00	135.325.000,00	99,52	433.900.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.165.667.077,00	1.128.634.543,00	96,82	1.485.971.043,00
	Jumlah	1.421.642.077,00	1.383.809.543,00	97,34	1.942.981.043,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.383.809.543,00 merupakan salah satu penambah nilai aset tetap lainnya setelah dikurangi koreksi/reklasifikasi. Realisasi dan reklasifikasi belanja modal per opd disajikan dalam rekap rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode per 31 Desember 2024 pada *lampiran 23*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurunnya capaian realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 disebabkan tidak adanya alokasi anggaran untuk belanja modal aset tidak berwujud dan belanja modal bahan perpustakaan.

Rincian saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *lampiran 54*. Rincian Realisasi dari masing-masing akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Belanja dengan kode rekening 5.2.05.02.01 merupakan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp119.850.000,00 atau 99,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp120.000.000,00.

2. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi

Belanja dengan kode rekening 5.2.05.07.01 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp135.325.000,00 atau 99,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp135.975.000,00.

3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Belanja dengan kode rekening 5.2.05.88.88 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.128.634.543,00 atau 96,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.165.667.077,00.

5.1.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tidak Terduga TA 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 65 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	304.847.526,00	51.425.000,00	16,87	23.000.000,00
	Jumlah	304.847.526,00	51.425.000,00	16,87	23.000.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tidak Terduga di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya meliputi kegiatan STQ di Kecamatan Tojo yang dialokasikan melalui anggaran belanja tidak terduga.

Belanja Tidak Terduga tersebut merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka bantuan untuk penanganan bencana orang hilang di Kecamatan Togean dan Kecamatan Tojo, penanganan bencana alam angin puting beliung di Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Una-Una dan Kecamatan Batudaka, penanganan banjir di Kecamatan Tojo Barat serta pembayaran biaya dekorasi dan sewa rumah kafilah STQ di Kecamatan Tojo.

5.1.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Transfer TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 66 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	194.348.963.900,00	194.348.963.900,00	100,00	183.003.894.200,00
Jumlah		195.898.963.900,00	195.898.963.900,00	100,00	184.503.894.200,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp195.898.963.900,00 yang bersumber dari APBN sebesar Rp113.557.804.000,00 dan bersumber dari APBD sebesar Rp80.791.159.900,00 yang disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa. Mekanisme pengakuan belanja yang bersumber dari APBN berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) oleh BUD, dimana pencatatan didasarkan pada dokumen sumber berupa SP2D BUN. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa disajikan pada lampiran 55.

5.1.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bagi Hasil TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 67 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	929.999.932,00	929.999.932,00	100,00	899.999.878,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	620.000.068,00	620.000.068,00	100,00	600.000.122,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
	Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa				
Jumlah		1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada belanja bagi hasil di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan capaian realisasi tahun sebelumnya yang menjadi dasar perhitungan alokasi belanja bagi hasil di tahun berjalan. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada desa yang didasarkan pada Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 100.3.3.2/355/BAPENDA/2023 tentang Besaran Jumlah Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang Diterima Desa Tahun 2024.

5.1.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 68 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	194.348.963.900,00	194.348.963.900,00	100,00	183.003.894.200,00
Jumlah		194.348.963.900,00	194.348.963.900,00	100,00	183.003.894.200,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan penambahan insentif desa sesuai dengan PMK 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024. Transfer Bantuan Keuangan tersebut disalurkan kepada desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah berfungsi untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2024 dan 2023 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 69 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	67.566.441.319,00	67.566.441.318,71	100,00	67.994.772.289,50
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00
Pembiayaan Netto		65.266.441.319,00	65.266.441.318,71	100,00	64.694.772.289,50

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 70 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.566.441.319,00	67.566.441.318,71	100,00	67.994.772.289,50
Jumlah		67.566.441.319,00	67.566.441.318,71	100,00	67.994.772.289,50

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 71 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	67.566.441.319,00	67.566.441.318,71	100,00	67.994.772.289,50
Jumlah		67.566.441.319,00	67.566.441.318,71	100,00	67.994.772.289,50

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tabel 5.1.1. 72 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00
	Jumlah	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pengeluaran Pembiayaan di TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya penurunan penyertaan modal pada PT. BPD Sulteng.

5.1.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah TA 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 73 Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				
	• PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Cabang Ampana	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
	• Perusahaan Daerah Air Minum Ue Tanah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00
	Jumlah	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA) TA 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.1.1. 74 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
4	Pendapatan	1.372.442.394.655,00	1.368.295.133.804,95	99,70	1.213.864.205.577,91
4.1	Pendapatan Asli Daerah	74.329.306.220,00	85.381.839.597,65	114,87	107.675.677.114,91
4.2	Pendapatan Transfer	1.287.610.966.078,00	1.273.155.200.610,00	98,88	1.103.495.196.621,00
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.502.122.357,00	9.758.093.597,30	92,92	2.693.331.842,00
5	Belanja Daerah	1.437.708.835.974,00	1.377.120.644.129,31	95,79	1.210.992.536.548,70
5.1	Belanja Operasi	1.020.730.742.469,87	966.886.071.221,31	94,72	775.133.396.504,70



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2	Belanja Modal	220.774.282.078,13	214.284.184.008,00	97,06	251.332.245.844,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	304.847.526,00	51.425.000,00	16,87	23.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	195.898.963.900,00	195.898.963.900,00	100,00	184.503.894.200,00
	Surplus/Defisit	(65.266.441.319,00)	(8.825.510.324,36)	13,52	2.871.669.029,21
6	Pembiayaan Netto	65.266.441.319,00	65.266.441.318,71	100,00	64.694.772.289,50
6.1	Penerimaan Pembiayaan	67.566.441.319,00	67.566.441.318,71	100,00	67.994.772.289,50
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00
	SiLPA	0,00	56.440.930.994,35	0,00	67.566.441.318,71

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada TA 2024 memiliki SiLPA sebesar Rp56.440.930.994,35 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 75 SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
➤ Dana SiLPA Terikat	
✓ Dana pada Kas di BLUD	4.898.336.210,12
✓ Dana pada Kas Dana BOSP	82.734.806,00
✓ Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	68.266.491,04
✓ Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	1.637.345.008,00
✓ Dana pada Kas Lainnya yang didalamnya memuat dana:	411.391.226,75
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:	
» DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-Perpustakaan	109.110.000,00
» DAK Fisik-Bidang Jalan -Penugasan-Jalan	2.363.286.520,00
» DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	35.314.000,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
» DAK Non Fisik-TPG PNSD	217.372.700,00
» DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	224.000.000,00
» DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.729.270.935,00
» DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	565.597.905,00
» DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	90.271.662,00
➤ Dana SiLPA Non-Terikat	
✓ Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	305.548,00
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah	44.533.927.465,56
➤ Utang PFK	
✓ Kewajiban PFK di Kas Lainnya	(410.640.983,60)
✓ Kewajiban PFK di Kas Daerah	(114.958.499,52)
Jumlah	56.440.930.994,35

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 76 Rincian Keberadaan SiLPA TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Kas di Kas Daerah	49.868.151.187,56
Kas di Bendahara Penerimaan	305.548,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	4.898.336.210,12
Kas Dana BOSP	82.734.806,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Nilai (Rp)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	68.266.491,04
Kas Dana BOK Puskesmas	1.637.345.008,00
Kas Lainnya	411.391.226,75
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(525.599.483,12)
Jumlah	56.440.930.994,35

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Laporan Arus Kas pada *point 5.1.5* dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP-SAL pada *point 5.1.2*.

5.1.2 Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LP-SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP-SAL Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Sisa Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.2. 1 Nilai Sisa Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	55.920.049.657,26	35.197.426.273,21
Kas di Bendahara Penerimaan	186.663.624,00	11.596.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	9.553.418.219,78	3.658.343.740,93
Kas Dana BOS	29.360.170,00	40.995.740,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	142.895.487,55	76.771.462,25
Kas Lainnya	2.424.458.545,84	657.470.084,83
Setara Kas	0,00	29.237.107.423,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(690.404.385,72)	(884.879.342,72)
Jumlah	67.566.441.318,71	67.994.831.381,50

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA.

5.1.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.1.2. 2 Nilai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	67.566.441.318,71	67.994.772.289,50
Jumlah	67.566.441.318,71	67.994.772.289,50

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada TA 2023 dan 2022 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan 2023 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama TA 2024 dan 2023. Untuk saldo SiLPA TA 2023, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2023 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada TA 2023 sebagaimana diungkapkan dalam catatan *point 5.1.2.4* di bawah.

5.1.2.3 Saldo Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.1.2. 3 Nilai Saldo Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	56.440.930.994,35	67.566.441.318,71
Jumlah	56.440.930.994,35	67.566.441.318,71

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada TA 2024 dan 2023 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2024. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Laporan Realisasi Anggaran pada *point 5.1.1*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam saldo anggaran lebih akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *point 5.1.2.5* di bawah.

5.1.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.1.2. 4 Nilai Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pengakuan Pendapatan LRA Jasa Giro Dana BOK di Puskesmas Dataran Bulan dan Puskesmas Lebiti	0,00	59.092,00
Jumlah	0,00	59.092,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.2. 5 Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	49.868.151.187,56	55.920.049.657,26
Kas di Bendahara Penerimaan	305.548,00	186.663.624,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di BLUD	4.898.336.210,12	9.553.418.219,78
Kas Dana BOS	82.734.806,00	29.360.170,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	68.266.491,04	142.895.487,55
Kas Dana BOK Puskesmas	1.637.345.008,00	0,00
Kas Lainnya	411.391.226,75	2.424.458.545,84
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(525.599.483,12)	(690.404.385,72)
Jumlah	56.440.930.994,35	67.566.441.318,71

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP-SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait penjelasan Laporan Realisasi Anggaran pada *point 5.1.1*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *point 5.1.2.3* di atas.

5.1.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2024 dan 2023. Berikut ini disajikan penjelasan atas saldo-saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca tahun 2024.

5.1.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 1 Nilai Aset Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.1	Aset Lancar	204.778.383.945,35	114.194.966.040,57
1.2	Investasi Jangka Panjang	44.616.865.124,00	43.461.704.414,00
1.3	Aset Tetap	2.042.735.355.637,97	1.995.702.891.524,97
1.4	Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5	Aset Lainnya	77.291.885.177,62	135.639.152.933,71
1.6	Properti Investasi	1.684.025.574,00	0,00
	Jumlah	2.371.106.515.458,94	2.288.998.714.913,25

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.371.106.515.458,94 mengalami peningkatan sebesar Rp82.107.800.545,69 atau 3,59% dari aset tahun 2023 sebesar Rp2.288.998.714.913,25.



5.1.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Penyajian aset lancar dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal;
2. Piutang disajikan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya;
3. Persediaan disajikan di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian harga standar. Apabila persediaannya diproduksi sendiri dan berasal dari donasi atau rampasan, maka penyajiannya menggunakan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya.

Aset lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 2 Nilai Aset Lancar Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.1.01	Kas dan Setara Kas	57.121.405.120,47	68.794.371.347,43
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	3.909.698.877,00	3.981.679.222,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	1.100.177.213,00	0,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.170.028.895,00	8.148.396.472,00
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	73.982.018.000,00	1.250.309,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	10.401.490.794,00	5.429.576.183,00
1.1.09	Piutang Lainnya	306.198.218,00	306.198.218,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(4.384.156.463,82)	(4.181.368.466,28)
1.1.12	Persediaan	51.171.523.291,70	31.714.862.755,42
	Jumlah	204.778.383.945,35	114.194.966.040,57

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Aset Lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una per 31 Desember 2024 sebesar Rp204.778.383.945,35 mengalami peningkatan sebesar Rp90.583.417.904,78 atau 79,32% dari Aset Lancar tahun 2023 sebesar Rp114.194.966.040,57.

5.1.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Aset Lancar Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.121.405.120,47 mengalami penurunan sebesar Rp11.672.966.226,96 atau 16,97% dari Kas dan Setara Kas tahun 2023 sebesar Rp68.794.371.347,43. Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 3 Nilai Kas dan Setara Kas Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	49.868.151.187,56	55.920.049.657,26
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	305.548,00	186.663.624,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	4.898.336.210,12	9.553.418.219,78
1.1.01.05	Kas Dana BOS	0,00	29.360.170,00
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	68.266.491,04	142.895.487,55
1.1.01.07	Kas Lainnya	566.265.869,75	2.961.984.188,84
1.1.01.10	Kas Dana BOSP	82.734.806,00	0,00
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	1.637.345.008,00	0,00
	Jumlah	57.121.405.120,47	68.794.371.347,43

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Kas di Kas Daerah

Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.868.151.187,56 merupakan saldo Kas Daerah yang ada di Bendahara Umum Daerah (BUD) mengalami penurunan sebesar Rp6.051.898.469,70 atau 10,82% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.920.049.657,26 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 4 Rincian Rekening Kas di Kas Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Keterangan
1	Rekening BPD Sulteng		
	3010103200060	49.389.537.493,56	Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah
2	Rekening BNI		
	1418418246	972,00	Giro Pemerintah
3	Kas Tunai	478.612.722,00	Sampai dengan 15 April 2025 telah disetorkan ke Kas Daerah
	Jumlah	49.868.151.187,56	

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari transfer penerimaan pendapatan ke rekening Kas Daerah. Sampai dengan 31 Desember 2024 saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp305.548,00 mengalami penurunan sebesar Rp186.358.076,00 atau 99,84% dari tahun 2023 sebesar Rp186.663.624,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 5 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024

No	Uraian	Keterangan	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	20.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	PBBP2	285.548,00
	Jumlah		305.548,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Sampai dengan tanggal 3 Maret 2025, seluruh saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2024 telah disetorkan ke Kas Daerah.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari dana Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara/Daerah per tanggal neraca. Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.



4. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan nilai yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Saldo Kas di BLUD pada RSUD Ampana sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.898.336.210,12 mengalami penurunan sebesar Rp4.655.082.009,66 atau 48,73% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.553.418.219,78. Saldo pada Kas di BLUD sebesar Rp4.898.336.210,12 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 6 Rincian Kas di BLUD Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Keterangan
1	Rekening Bank MANDIRI Cabang Palu 151.00.2244660.0	4.898.336.210,12	Rekening Kas BLUD
Jumlah		4.898.336.210,12	

Sumber : RSUD Ampana

Saldo Kas BLUD tersebut diatas merupakan saldo yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja BLUD direalisasikan melalui Pelayanan Kesehatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 7 Uraian Kas BLUD Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal	9.553.418.219,78
2	Pendapatan (Berdasarkan SP2B)	52.618.002.007,34
3	Belanja (Berdasarkan SP2B)	57.273.084.017,00
Jumlah		4.898.336.210,12

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5. Kas Dana BOS

Akun Kas Dana BOS tahun 2024 dipindahkan pada akun Kas Dana BOSP sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2024 merupakan saldo kas yang ada di bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 16 Puskesmas. Saldo Kas di Bendahara FKTP tahun 2024 sebesar Rp68.266.491,04 mengalami penurunan sebesar Rp74.628.996,51 atau 52,23% dari tahun 2023 sebesar Rp142.895.487,55 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 8 Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Puskesmas Wakai	80.517,00
2	Puskesmas Lebiti	11.164.211,00
3	Puskesmas Dolong	398.232,00
4	Puskesmas Pasokan	11.302.381,00
5	Puskesmas Tete	66.697,83
6	Puskesmas Dataran Bulan	534.262,00
7	Puskesmas Ampana Timur	7.512.125,30
8	Puskesmas Ampana Barat	8.469.723,96



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
9	Puskesmas Marowo	1.255.700,00
10	Puskesmas Uekuli	68.234,00
11	Puskesmas Matakoto	12.403.698,00
12	Puskesmas Tombiano	13.442.118,00
13	Puskesmas Popoli'i	331.757,95
14	Puskesmas Watusongu	734.815,00
15	Puskesmas Molowagu	(14.804,00)
16	Puskesmas Kalia	516.822,00
Jumlah		68.266.491,04

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2024 tersebut diatas merupakan saldo yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN yang ditransfer langsung ke rekening bendahara Puskesmas yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 9 Uraian Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal	142.895.487,55
2	Pendapatan (Berdasarkan SPDK)	8.721.616.144,00
4	Koreksi Pendapatan	4.477.453,30
5	Belanja (Berdasarkan SPB)	(8.800.813.593,81)
6	Koreksi Belanja	91.000,00
Jumlah		68.266.491,04

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dana Kapitasi pada FKTP untuk masing-masing Puskesmas Tahun Anggaran 2024 disajikan pada *lampiran 1*.

7. Kas Lainnya

Kas lainnya merupakan penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Saldo kas lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp566.265.869,75 mengalami penurunan sebesar Rp2.395.718.319,09 atau 80,88% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.961.984.188,84 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 10 Rincian Kas Lainnya Tahun 2024

No	Uraian	Keterangan	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (saldo tahun 2021)	Utang PFK BOSPUS	387.116.465,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (saldo tahun 2021)	Utang PFK BOSDA	15.126.222,00
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (saldo tahun 2024)	Utang PFK BOSPUS	1.341.053,00
4	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (saldo tahun 2022)	Utang PFK	1.632.320,00
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (saldo tahun 2024)	Utang PFK	4.764.247,60
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jasa Giro JKN	669.479,15
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Utang Belanja	45.778,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Saldo Akhir CSR	154.874.643,00
9	Badan Pendapatan Daerah	Jasa Giro Rek PBB	34.986,00
10	Inspektorat Daerah	Utang PFK	475.676,00
11	Kecamatan Walea Besar (saldo tahun 2022)	Utang PFK	185.000,00
Jumlah			566.265.869,75

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

8. Kas Dana BOSP

Saldo Kas Dana BOSP merupakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang langsung diterima oleh 227 sekolah dari pemerintah pusat. Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.734.806,00 mengalami peningkatan 100,00% dari saldo per 31 Desember 2023 disebabkan adanya perpindahan dari akun Kas Dana BOS yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 11 Uraian Kas Dana BOSP Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal	29.360.170,00
2	Pendapatan (Berdasarkan Pengesahan SP2T)	24.002.681.319,00
3	Belanja (Berdasarkan Pengesahan SPB)	(24.019.162.510,00)
4	Koreksi Belanja	69.855.827,00
	Jumlah	82.734.806,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Saldo Kas Dana BOSP sebesar Rp82.734.806,00 terdiri atas saldo kas tunai sebesar Rp71.195.296,00 dan saldo kas Bank sebesar Rp11.539.510,00. Adapun rincian Pendapatan dan Belanja Realisasi Dana Bospus pada SD dan SMP negeri untuk masing-masing kecamatan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada *lampiran 2*.

9. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas tahun 2024 merupakan saldo kas Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang ada di bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 16 Puskesmas. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas tahun 2024 sebesar Rp1.637.345.008,00 mengalami peningkatan 100,00% dari tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 12 Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Puskesmas Wakai	80.425.218,00
2	Puskesmas Lebiti	373.930.465,00
3	Puskesmas Dolong	106.736.421,00
4	Puskesmas Pasokan	49.781.082,00
5	Puskesmas Tete	63.064.850,00
6	Puskesmas Dataran Bulan	100.641.221,00
7	Puskesmas Ampana Timur	116.642.290,00
8	Puskesmas Ampana Barat	70.246.157,00
9	Puskesmas Marowo	219.009.554,00
10	Puskesmas Uekuli	99.496.773,00
11	Puskesmas Matako	38.223.077,00
12	Puskesmas Tombiano	83.596.374,00
13	Puskesmas Popoli'i	55.375.205,00
14	Puskesmas Watusongu	44.753.370,00
15	Puskesmas Molowagu	76.784.561,00
16	Puskesmas Kalia	58.638.390,00
	Jumlah	1.637.345.008,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas tahun 2024 tersebut diatas merupakan saldo yang bersumber dari Dana BOK yang ditransfer langsung ke rekening bendahara Puskemas yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.1.3. 13 Uraian Kas Dana BOK Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal	1.971.808.830,00
2	Koreksi Saldo Awal	13.000,00
3	Pendapatan (Berdasarkan SP2T)	14.411.799.170,00
4	Belanja (Berdasarkan SPB)	(14.746.340.992,00)
5	Koreksi Belanja	65.000,00
	Jumlah	1.637.345.008,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dana BOK Puskesmas untuk masing-masing Puskesmas Tahun Anggaran 2024 disajikan pada *lampiran 3*.

5.1.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau Peraturan Daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.909.698.877,00 mengalami penurunan sebesar Rp71.980.345,00 atau 1,81% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.981.679.222,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 14 Nilai Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.1.03.06	Piutang Pajak Hotel	22.308.500,00	22.308.500,00
1.1.03.07	Piutang Pajak Restoran	24.812.000,00	24.812.000,00
1.1.03.09	Piutang Pajak Reklame	70.328.804,00	80.550.277,00
1.1.03.10	Piutang Pajak Penerangan Jalan	476.102.735,00	448.348.842,00
1.1.03.14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	218.823.276,00	376.871.618,00
1.1.03.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.097.323.562,00	3.028.787.985,00
	Jumlah	3.909.698.877,00	3.981.679.222,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

1. Piutang Pajak Hotel

Saldo piutang pajak hotel sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp22.308.500,00 tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2023. Daftar piutang pajak hotel disajikan pada *lampiran 4*.

2. Piutang Pajak Restoran

Saldo piutang pajak restoran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp24.812.000,00 tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2023. Daftar piutang pajak restoran disajikan pada *lampiran 5*.

3. Piutang Pajak Reklame

Saldo piutang pajak reklame sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp70.328.804,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.221.473,00 atau 12,69% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp80.550.277,00. Daftar piutang pajak reklame disajikan pada *lampiran 6*.



4. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo piutang pajak penerangan jalan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp476.102.735,00 mengalami peningkatan sebesar Rp27.753.893,00 atau 6,19% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp448.348.842,00.

5. Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Saldo piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp218.823.276,00 mengalami penurunan sebesar Rp158.048.342,00 atau 41,94% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp376.871.618,00. Daftar piutang pajak mineral bukan logam dan batuan disajikan pada *lampiran 7*.

6. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Saldo piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.097.323.562,00 mengalami peningkatan sebesar Rp68.535.577,00 atau 2,26% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.028.787.985,00. Daftar piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) disajikan pada *lampiran 8*.

5.1.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran atas retribusi yang telah jatuh tempo dari pihak ketiga atau masyarakat namun belum diterima hingga akhir pelaporan. Piutang ini timbul dari pungutan daerah atas imbalan atau jasa izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Saldo Piutang Retribusi Daerah berupa Piutang Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.100.177.213,00 mengalami peningkatan sebesar 100,00% dari saldo per 31 Desember 2023.

5.1.3.1.1.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp11.170.028.895,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.021.632.423,00 atau 37,08% dari tahun 2023 sebesar Rp8.148.396.472,00. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 dan tahun 2023 terdiri atas:

Tabel 5.1.3. 15 Nilai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.1.06.05	Piutang Jasa Giro	353.790.323,00	353.790.323,00
1.1.06.06	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	410.229.761,00	410.229.761,00
1.1.06.15	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	1.550.872.000,00	1.550.872.000,00
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD	8.855.136.811,00	5.833.504.388,00
	Jumlah	11.170.028.895,00	8.148.396.472,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

1. Piutang Jasa Giro

Piutang jasa giro merupakan tagihan atas kesalahan perhitungan potongan pajak pada deposito yang mengurangi akun penerimaan pendapatan jasa giro Tahun Anggaran 2016 pada Bank BPD Sulteng sebesar Rp353.333.333,67 dan Bank BRI sebesar Rp456.989,33. Saldo piutang jasa giro tahun 2024 tidak mengalami perubahan dari tahun 2023.



2. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pengembalian dana bergulir kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus. Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan bunga. Piutang hasil pengelolaan dana bergulir tahun 2024 sebesar Rp410.229.761,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2023. Daftar piutang hasil pengelolaan dana bergulir disajikan pada *lampiran 9*.

3. Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang pendapatan dari pengembalian merupakan piutang dana operasional dan tunjangan intensif pada Sekretariat DPRD. Piutang hasil pendapatan dari pengembalian tahun 2024 sebesar Rp1.550.872.000,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2023.

4. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang pendapatan BLUD sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.855.136.811,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.021.632.423,00 atau 51,80% dari tahun 2023 sebesar Rp5.833.504.388,00. Piutang pendapatan BLUD merupakan tagihan pada BLUD RSUD Ampana atas piutang BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, Inhealth dan piutang pasien umum. Daftar piutang pendapatan BLUD disajikan pada *lampiran 10*.

5.1.3.1.1.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan sudah menjadi hak daerah yang belum ditransfer ke rekening kas daerah yang merupakan pengakuan oleh pemerintah pusat atas kurang bayar DBH ke pemerintah daerah yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 Tanggal 29 Desember 2024 tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil dan penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2024.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp73.982.018.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp73.980.767.691,00 dari tahun 2023 sebesar Rp1.250.309,00. Rincian piutang transfer pemerintah pusat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 16 Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.1.07.01.01.0001	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	1.451.900.000,00	947,00
1.1.07.01.01.0002	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	1.449.063.000,00	659,00
1.1.07.01.01.0003	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	15.763.000,00	34,00
1.1.07.01.01.0004	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	1.649.000,00	1.245.127,00
1.1.07.01.01.0005	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	0,00	901,00
1.1.07.01.01.0006	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	56.966.236.000,00	910,00
1.1.07.01.01.0009	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	14.097.407.000,00	1.608,00
1.1.07.01.01.0010	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	0,00	123,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
	Jumlah	73.982.018.000,00	1.250.309,00

Sumber : KMK RI Nomor 44/PMK.07/2024

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan tahun 2024 terdapat pada *lampiran II*.

5.1.3.1.1.6 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer antar Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp10.401.490.794,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.971.914.611,00 atau 91,57% dari tahun 2023 sebesar Rp5.429.576.183,00. Piutang Transfer antar daerah merupakan tagihan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi pada tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 17 Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Surat Ketetapan Kurang Salur Tahun 2024	Pendapatan Realisasi Tahun 2024	Piutang dan Realisasi Tahun 2023
I	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor			
1	Target Penerimaan	SK 900.1.14.3/28/BAPENDA-	9.315.589.772,00	1.289.666.913,00
2	Realisasi Penerimaan	G.ST/2025	7.560.638.062,00	1.289.666.913,00
		Sisa Piutang (1-2)	1.754.951.710,00	0,00
II	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			
1	Target Penerimaan	SK 900.1.14.3/28/BAPENDA-	7.992.041.163,00	1.094.451.835,00
2	Realisasi Penerimaan	G.ST/2025	6.294.375.560,00	1.094.451.835,00
		Sisa Piutang (1-2)	1.697.665.603,00	0,00
III	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			
1	Target Penerimaan	SK 900.1.14.3/28/BAPENDA-	28.370.310.742,00	2.951.477.906,00
2	Realisasi Penerimaan	G.ST/2025	21.601.521.959,00	2.951.477.906,00
		Sisa Piutang (1-2)	6.768.788.783,00	0,00
IV	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan			
1	Target Penerimaan	SK 900.1.14.3/28/BAPENDA-	782.788.020,00	93.979.529,00
2	Realisasi Penerimaan	G.ST/2025	602.703.322,00	93.979.529,00
		Sisa Piutang (1-2)	180.084.698,00	0,00
V	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok			
1	Target Penerimaan	SK 900.1.14.3/28/BAPENDA-	10.480.575.361,00	0,00
2	Realisasi Penerimaan	G.ST/2025	10.480.575.361,00	0,00
		Sisa Piutang (1-2)	0,00	0,00
		Total Sisa Piutang	10.401.490.794,00	0,00

Sumber : Keputusan Gubernur Nomor 900.1.14.3/28/BAPENDA-G.ST/2025

5.1.3.1.1.7 Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah. Saldo piutang lainnya tahun 2024 sebesar Rp306.198.218,00 mengalami penurunan sebesar Rp139.583.629,00 atau 31,31% dari tahun 2023 sebesar Rp445.781.847,00. Piutang Lainnya tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 18 Rincian Piutang Lainnya Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.1.09.04	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	306.198.218,00	306.198.218,00
	Jumlah	306.198.218,00	306.198.218,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



1. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah tahun 2024 sebesar Rp306.198.218,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2023. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tahun 2024 sebesar Rp306.198.218,00 merupakan piutang yang bersumber dari temuan sampai dengan akhir tahun 2024 atas pegawai Negara bukan Bendahara/Pegawai Lain sebanyak 24 kasus. Rincian bagian lancar tuntutan ganti rugi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 19 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.1.09.04.01	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	69.233.168,00	69.233.168,00
1.1.09.04.02	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	236.965.050,00	236.965.050,00
Jumlah		306.198.218,00	306.198.218,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.3.1.1.8 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang. Penyisihan piutang yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam upaya untuk menyajikan nilai piutang yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang tahun 2024 sebesar Rp4.384.156.463,82 mengalami peningkatan sebesar Rp202.787.997,54 atau 4,85% dari tahun 2023 sebesar Rp4.181.368.466,28 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 20 Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(4.150.300.479,82)	(3.947.512.482,28)
1.1.10.02	Penyisihan Piutang Lainnya	(233.855.984,00)	(233.855.984,00)
Jumlah		(4.384.156.463,82)	(4.181.368.466,28)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

1. Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan piutang pendapatan tahun 2024 sebesar Rp4.150.300.479,82 mengalami peningkatan sebesar Rp202.787.997,54 atau 5,14% dari tahun 2023 sebesar Rp3.947.512.482,28 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 21 Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.1.10.01.01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.997.081.526,26)	(1.824.361.690,84)
1.1.10.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(2.153.218.953,56)	(2.123.150.791,44)
Jumlah		(4.150.300.479,82)	(3.947.512.482,28)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



Rincian penyisihan piutang pendapatan tahun 2024 terdapat pada *lampiran 4 s.d 10*.

2. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang lainnya merupakan penyisihan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara. Penyisihan piutang lainnya tahun 2024 sebesar Rp233.855.984,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2023. Rincian penyisihan piutang lainnya tahun 2024 terdapat pada *lampiran 12*.

5.1.3.1.1.9 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.171.523.291,70 mengalami peningkatan sebesar Rp19.456.660.536,28 atau 61,35% dari tahun 2023 sebesar Rp31.714.862.755,42 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 22 Rekap Nilai Persediaan Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	195.550.000,00	199.598.401,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	2.864.400,00	268.266.000,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	106.450.625,00	19.034.340,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	116.819.195,00	121.859.553,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	0,00	885.000,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	227.225.938,00	400.573.798,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	0,00	700.000,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	44.538.300,00	19.504.650,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.447.078,92	41.520.811,11
1.1.12.01.04.0001	Obat	27.993.268.010,78	30.634.267.702,31
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	22.050.776.280,00	916.000,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	417.583.464,00	7.736.500,00
	Jumlah	51.171.523.291,70	31.714.862.755,42

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, bahwa metode dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per-unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan yaitu metode harga pembelian terakhir. Rekap Saldo Persediaan disajikan dalam *lampiran 13*.

5.1.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Permanen. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.824.068.488,00 mengalami peningkatan sebesar Rp362.364.074,00 atau 0,83% dari tahun 2023 sebesar Rp43.461.704.414,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tabel 5.1.3. 23 Jenis Investasi Jangka Panjang Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	44.616.865.124,00	43.461.704.414,00
	Jumlah	44.616.865.124,00	43.461.704.414,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non-Permanen

Investasi jangka panjang non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jangka Panjang non permanen tahun 2024 yaitu dana bergulir. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Mekanisme kegiatan Dana Bergulir dilakukan dengan cara menggunakan pokok dana bergulir untuk digulirkan kembali kepada masyarakat. Untuk penerimaan denda dan bunga/jasa dana bergulir diakui sebagai pendapatan dan disetor ke kas daerah. Dana Bergulir dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dana Bergulir disajikan menurut nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Investasi jangka Panjang non permanen per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan dari tahun 2023 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 24 Rincian Dana Bergulir Tahun 2024

No	Tahun	Piutang Dana Bergulir		
		Program	Perguliran	Jumlah
1	2	3	4	5
1	2006	154.257.053	-	154.257.053
2	2007	215.078.840	28.733.330	243.812.170
3	2008	94.053.302	480.728.883	574.782.185
4	2009	31.124.986	365.230.407	396.355.393
5	2010	-	113.382.889	113.382.889
	Jumlah 1 s.d. 5	494.514.181	988.075.509	1.482.589.690
6	Dana bergulir diragukan tertagih			(1.482.589.690)
7	Nilai Bersih Dana Bergulir yang dapat Direalisasikan (<i>Net Realizable Value</i>)			0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rincian Dana bergulir dan Penyisihan Dana bergulir diragukan tertagih disajikan pada lampiran 9.

5.1.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka Panjang permanen adalah investasi jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi jangka Panjang permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi jangka Panjang permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.616.865.124,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.155.160.710,00 atau 2,66%



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

dari tahun 2023 sebesar Rp43.461.704.414,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 25 Jenis Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	23.245.685.965,00	21.245.685.965,00
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Ue Tanah Tojo Una-Una	20.735.434.692,00	21.580.273.982,00
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusda Tojo Una-Una	635.744.467,00	635.744.467,00
Jumlah	44.616.865.124,00	43.461.704.414,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

1. Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah melakukan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dicatat dengan metode biaya. Pada tahun 2024 terdapat penambahan penyertaan modal yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga total investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp23.245.685.965,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 26 Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Uraian	Lembar Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Modal Awal disetor	145.563	100.000	14.556.300.000,00
2	Dana Setoran Modal belum ditempatkan			213.852,00
3	Agio Saham			3.689.172.113,00
4	Penyertaan Modal tahun 2023			3.000.000.000,00
5	Penyertaan Modal tahun 2024			2.000.000.000,00
	Jumlah			23.245.685.965,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah *Audited* tahun 2024 disajikan pada *lampiran 57*.

2. Penyertaan Modal pada PERUMDA Air Minum Ue Tanah Kabupaten Tojo Una-Una

Pada tahun 2024 terdapat penyertaan modal pada PERUMDA Air Minum Ue Tanah Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp300.000.000,00. Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Ue Tanah Kabupaten Tojo Una-Una Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ue Tanah. Sejak tahun buku 2012 metode pencatatan yang diterapkan untuk penyertaan pada PERUMDA Air Minum Ue Tanah adalah Metode Ekuitas, hal ini berimplikasi pada pengakuan laba rugi perusahaan terhadap nilai penyertaan yaitu rugi sebesar Rp1.144.839.290,00. Investasi permanen penyertaan modal pemerintah daerah pada PERUMDA Air Minum Ue Tanah Tojo Una-Una sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp20.735.434.692,00. Rincian perhitungan disajikan pada *lampiran 14*.



Laporan Keuangan PERUMDA Air Minum Ue Tanah Kabupaten Tojo Una-Una *Audited* tahun 2024 disajikan pada *lampiran 58*.

3. Penyertaan Modal pada Perusda Tojo Una-Una

Pada tahun 2024 tidak terdapat penyertaan modal pada Perusda Tojo Una-Una. Mulai tahun buku 2012 metode pencatatan yang diterapkan untuk penyertaan pada Perusda Tojo Una-una adalah Metode Ekuitas, hal ini berimplikasi pada pengakuan laba rugi perusahaan terhadap nilai penyertaan modal. Investasi permanen penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusda Tojo Una-Una sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp635.744.467,00. Rincian perhitungan disajikan pada *lampiran 14*.

Laporan Keuangan Perusda Tojo Una-Una *Unaudited* tahun 2024 disajikan pada *lampiran 59*.

5.1.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.042.735.355.637,97 mengalami peningkatan sebesar Rp47.032.464.113,00 atau 2,36% dari tahun 2023 sebesar Rp1.995.702.891.524,97.

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.042.735.355.637,97 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	3.536.740.754.167,77
Penambahan Tahun 2024	276.401.487.143,00
Jumlah	3.813.142.241.310,77
Pengurangan Tahun 2024	72.706.465.616,00
Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2024	3.740.435.775.694,77
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	(1.697.700.420.056,80)
Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2024	2.042.735.355.637,97

Rekap Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2024 disajikan pada *lampiran 15*.

Rincian Nilai Aset Tetap tahun 2024 dan tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 27 Nilai Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.3.01	Tanah	203.145.200.805,00	186.843.970.121,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	607.174.860.327,80	585.837.833.685,80
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.018.975.366.635,69	979.591.893.577,69
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.834.518.545.359,28	1.722.058.091.733,28
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	54.122.646.311,00	52.667.526.985,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.499.156.256,00	9.741.438.065,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.697.700.420.056,80)	(1.541.037.862.642,80)
	Jumlah	2.042.735.355.637,97	1.995.702.891.524,97

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Penjelasan rinci masing-masing jenis aset tetap Per 31 Desember 2024 dijelaskan sebagai berikut:



5.1.3.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp203.145.200.805,00 mengalami peningkatan sebesar Rp16.301.230.684,00 atau 8,72% dari tahun 2023 sebesar Rp186.843.970.121,00.

Nilai aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp203.145.200.805,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	186.843.970.121,00
Penambahan Tahun 2024	16.566.586.038,00
Jumlah	203.410.556.159,00
Pengurangan Tahun 2024	265.355.354,00
Nilai Aset Tanah Per 31 Desember 2024	203.145.200.805,00

Tanah Per 31 Desember 2024 senilai Rp203.145.200.805,00 terdiri atas 1.208 bidang tanah yang merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan rincian 491 bidang tanah yang sudah bersertifikat dan 717 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat.

Pencatatan nilai aset tanah berdasarkan rekonsiliasi nilai tercatat aset tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan kenaikan nilai aset tanah, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 28 Rekapitulasi Nilai Tercatat Tanah Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2023	Rp 186.843.970.121,00
2	Penambahan :	
3	Pengadaan Melalui Belanja Barang/Jasa/Tak Terduga	Rp 1.558.384.200,00
4	Reklasifikasi dari :	
5	a. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 31.441.748,00
6	b. Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 6.029.615.390,00
7	Perubahan Nilai dan Lain-lain	Rp 8.947.144.700,00
8	Pengurangan :	
9	Reklas ke Aset Lainnya Diserahkan ke Masyarakat	Rp 265.355.354,00
10	Saldo Per 31 Desember 2024	Rp 203.145.200.805,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Aset Tanah sebesar Rp203.145.200.805,00 disajikan dalam Rekap Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2024 pada **lampiran 16**. Rincian 1.208 bidang tanah untuk seluruh perangkat daerah disajikan dalam **lampiran 17**. Rincian bidang tanah yang masih bernilai Rp0,00 terdapat pada **lampiran 18**.

5.1.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp607.174.860.327,80 mengalami peningkatan sebesar Rp21.337.026.642,00 atau 3,64% dari tahun 2023 sebesar Rp585.837.833.685,80.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp607.174.860.327,80 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	585.837.833.685,80
Penambahan Tahun 2024	43.394.445.806,00
Jumlah	629.232.279.491,80
Pengurangan Tahun 2024	22.057.419.164,00
Nilai Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024	607.174.860.327,80

Peralatan dan Mesin senilai Rp607.174.860.327,80 terdiri atas 122.151 Unit merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Penilaian Peralatan dan Mesin berdasarkan harga perolehan. Pencatatan nilai aset peralatan dan mesin berdasarkan rekonsiliasi nilai tercatat aset peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan kenaikan nilai aset peralatan dan mesin, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 29 Rekapitulasi Nilai Tercatat Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2023	Rp 585.837.833.685,80
2	Penambahan :	
3	Pembelian (Belanja Modal) 2024	Rp 36.037.426.517,00
4	Hibah/Donasi	Rp 2.617.372.732,00
5	Pengadaan Melalui Belanja Barang/Jasa/Tak Terduga	Rp 623.628.950,00
6	Mutasi antar SKPD	Rp 3.032.611.395,00
7	Reklasifikasi dari :	
8	a. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 463.997.250,00
9	b. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 347.729.962,00
10	c. Aset Tetap Lainnya	Rp 270.763.000,00
11	d. Aset Lancar Persediaan	Rp 916.000,00
12	Pengurangan :	
13	Reklas ke Aset Lainnya Diserahkan ke Masyarakat	Rp 222.037.345,00
14	Mutasi antar SKPD	Rp 3.032.611.395,00
15	Usulan Rusak Berat/Hilang/Terbakar	Rp 8.531.530.466,00
16	Belanja Modal bukan Aset	Rp 285.006.724,00
17	Dibawah Minimum Kapitalisasi	Rp 346.366.676,00
18	Reklasifikasi ke :	
19	a. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 9.000.000,00
20	b. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 175.351.440,00
21	c. Aset Tetap Lainnya	Rp 7.159.975,00
22	d. Beban Pemeliharaan	Rp 298.789.428,00
23	Reklas ke Aset Lainnya	Rp 9.149.565.715,00
24	Saldo Per 31 Desember 2024	Rp 607.174.860.327,80

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp607.174.860.327,80 disajikan dalam Rekap Rekonsiliasi nilai tercatat peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2024 pada *lampiran 19*.

5.1.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Rp1.018.975.366.635,69 mengalami peningkatan sebesar Rp39.383.473.058,00 atau 4,02% dari tahun 2023 sebesar Rp979.591.893.577,69.

Nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.018.975.366.635,69 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	979.591.893.577,69
Penambahan Tahun 2024	52.694.520.742,00
Jumlah	1.032.286.414.319,69
Pengurangan Tahun 2024	13.311.047.684,00
Nilai Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024	1.018.975.366.635,69

Gedung dan Bangunan senilai Rp1.018.975.366.635,69 terdiri atas 3.250 Unit merupakan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Penilaian Gedung dan Bangunan berdasarkan harga perolehan. Rincian unit gedung dan bangunan yang masih bernilai Rp0,00 terdapat pada *lampiran 21*. Pencatatan nilai aset gedung dan bangunan berdasarkan rekonsiliasi nilai tercatat aset Gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan kenaikan nilai aset gedung dan bangunan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 30 Rekapitulasi Nilai Tercatat Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2023	Rp 979.591.893.577,69
2	Penambahan :	
3	Pembelian (Belanja Modal) 2024	Rp 40.544.197.368,00
4	Pengadaan Melalui Belanja Barang/Jasa/Tak Terduga	Rp 4.579.389.805,00
5	Mutasi antar SKPD	Rp 49.446.000,00
6	Reklasifikasi dari :	
7	a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 9.000.000,00
8	b. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 6.522.239.780,00
9	c. Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 990.247.789,00
10	Pengurangan :	
11	Reklas ke Aset Lainnya Diserahkan ke Masyarakat	Rp 1.648.420.780,00
12	Reklas ke Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga	Rp 819.843.450,00
13	Mutasi antar SKPD	Rp 49.446.000,00
14	Usulan Rusak Berat/Terbakar	Rp 1.319.828.802,00
15	Belanja Modal bukan Aset	Rp 74.906.587,00
16	Dibawah Minimum Kapitalisasi	Rp 27.850.102,00
17	Reklasifikasi ke :	
18	a. Aset Tetap Tanah	Rp 31.441.748,00
19	b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 463.997.250,00
20	c. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 6.960.030.965,00
21	d. Aset Tetap Lainnya	Rp 249.790.000,00
22	e. Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 1.665.492.000,00
23	Saldo Per 31 Desember 2024	Rp 1.018.975.366.635,69

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.018.975.366.635,69 disajikan dalam Rekap Rekonsiliasi nilai tercatat gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2024 pada *lampiran 20*.



5.1.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi mencakup Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi yang siap pakai. Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.834.518.545.359,28 mengalami peningkatan sebesar Rp112.460.453.626,00 atau 6,53% dari tahun 2023 sebesar Rp1.722.058.091.733,28.

Nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.834.518.545.359,28 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	1.722.058.091.733,28
Penambahan Tahun 2024	147.480.926.859,00
Jumlah	1.869.539.018.592,28
Pengurangan Tahun 2024	35.020.473.233,00
Nilai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024	1.834.518.545.359,28

Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp1.834.518.545.359,28 sebanyak 3.294 Unit terdiri dari Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Pencatatan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berdasarkan rekonsiliasi nilai tercatat aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan kenaikan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 31 Rekapitulasi Nilai Tercatat Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2023	Rp 1.722.058.091.733,28
2	Penambahan :	
3	Pembelian (Belanja Modal) 2024	Rp 136.318.750.580,00
4	Hibah/Donasi 2024	Rp 1.673.473.915,00
5	Pengadaan Melalui Belanja Barang/Jasa	Rp 1.811.976.959,00
6	Mutasi Antar SKPD	Rp 4.147.000,00
7	Reklasifikasi dari :	
8	a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 175.351.440,00
9	b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 6.960.030.965,00
10	c. Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 537.196.000,00
11	Pengurangan :	
12	Reklas ke Aset Lainnya Diserahkan ke Masyarakat	Rp 9.529.000.954,00
13	Reklas ke Aset Lainnya Rusak Berat	Rp 62.951.112,00
14	Mutasi antar SKPD	Rp 4.147.000,00
15	Rusak Berat/Hilang/Terbakar	Rp 14.229.600,00
16	Belanja Modal bukan Aset	Rp 26.208.555,00
17	Reklasifikasi ke :	
18	a. Aset Tetap Tanah	Rp 6.029.615.390,00
19	b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 347.729.962,00
20	b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 6.522.239.780,00
21	c. Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 12.484.350.880,00
22	Saldo Per 31 Desember 2024	Rp 1.834.518.545.359,28

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.834.518.545.359,28 disajikan dalam Rekap Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Jaringan dan Irigasi pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2024 pada *lampiran 22*.



5.1.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.122.646.311,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.455.119.326,00 atau 2,76% dari tahun 2023 sebesar Rp51.747.935.640,00.

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.122.646.311,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	52.667.526.985,00
Penambahan Tahun 2024	1.979.845.718,00
Jumlah	54.647.372.703,00
Pengurangan Tahun 2024	524.726.392,00
Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024	54.122.646.311,00

Aset Tetap Lainnya senilai Rp54.122.646.311,00 terdiri atas 948.319 Unit Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Pencatatan nilai aset tetap lainnya berdasarkan rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan kenaikan nilai aset tetap lainnya, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 32 Rekapitulasi Nilai Tercatat Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2023	Rp 52.667.526.985,00
2	Penambahan :	
3	Pembelian (Belanja Modal) 2024	Rp 1.383.809.543,00
4	Pengadaan Melalui Belanja Barang/Jasa	Rp 339.086.200,00
5	Reklasifikasi dari :	
6	a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 7.159.975,00
7	b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 249.790.000,00
8	Pengurangan :	
9	Rusak Berat/Hilang/Terbakar	Rp 253.963.392,00
10	Reklasifikasi ke :	
11	a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 270.763.000,00
12	Saldo Per 31 Desember 2024	Rp 54.122.646.311,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp54.122.646.311,00 disajikan dalam Rekap Rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2024 pada *lampiran 23*.

5.1.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.499.156.256,00 mengalami peningkatan sebesar Rp12.757.718.191,00 atau 130,96% dari tahun 2023 sebesar Rp9.741.438.065,00.

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.499.156.256,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	9.741.438.065,00
----------------------------	------------------



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Penambahan Tahun 2024	14.285.161.980,00
Jumlah	24.026.600.045,00
Pengurangan Tahun 2024	1.527.443.789,00
Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024	22.499.156.256,00

Aset Tetap KDP senilai Rp22.499.156.256,00 terdiri atas 43 Unit Konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Penilaian Konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan harga perolehan. Pencatatan nilai Konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan hasil rekonsiliasi nilai tercatat konstruksi dalam pengerjaan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan kenaikan nilai konstruksi dalam pengerjaan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 33 Rekapitulasi Nilai Tercatat Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2023	Rp 9.741.438.065,00
2	Penambahan :	
3	Pengadaan Melalui Belanja Barang/Jasa	Rp 135.319.100,00
4	Reklasifikasi dari :	
5	a. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 1.665.492.000,00
6	b. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 12.484.350.880,00
7	Pengurangan :	
8	Reklasifikasi :	
9	a. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 990.247.789,00
10	b. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 537.196.000,00
11	Saldo Per 31 Desember 2024	Rp 22.499.156.256,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp22.499.156.256,00 disajikan dalam Rekap Rekonsiliasi nilai tercatat konstruksi dalam pengerjaan pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2024 pada *lampiran 24*.

5.1.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan bulan penggunaan. Dengan pendekatan bulan penggunaan, maka waktu penyusutan ditentukan per bulan.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.697.700.420.056,80 mengalami peningkatan sebesar Rp156.662.557.414,00 atau 10,17% dari tahun 2023 sebesar Rp1.541.037.862.642,80. Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan tahun 2024 dan tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 34 Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(483.179.795.799,80)	(451.377.295.141,80)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(190.393.504.376,00)	(171.717.210.372,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(1.023.800.384.386,00)	(917.624.295.949,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(326.735.495,00)	(319.061.180,00)
	Jumlah	(1.697.700.420.056,80)	(1.541.037.862.642,80)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.697.700.420.056,80 disajikan dalam *lampiran 25* dengan rincian sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp483.179.795.799,80 mengalami peningkatan sebesar Rp31.802.500.658,00 atau 7,05% dari tahun 2023 sebesar Rp451.377.295.141,80 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 35 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal 2024	Rp (451.377.295.141,80)
2	Bertambah	
3	Koreksi Saldo Awal	Rp (347.729.962,00)
4	Beban Penyusutan	Rp (46.446.200.655,00)
5	Mutasi antar SKPD	Rp (2.888.025.145,00)
6	Berkurang	
7	Koreksi saldo awal 2024	Rp (398.425.500,00)
8	Mutasi antar SKPD	Rp (2.888.025.145,00)
9	Hibah	Rp (49.640.000,00)
10	Rusak Berat/Hilang/Terbakar/Lain-lain	Rp (8.410.639.274,00)
11	Dimanfaatkan Pihak Lain	Rp (3.067.005.185,00)
12	Barang Yang Akan Di Jual/Lelang	Rp (3.065.720.000,00)
13	Jumlah Akumulasi Penyusutan 2024	Rp (483.179.795.799,80)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rekonsiliasi nilai tercatat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2024 disajikan pada *lampiran 26*.

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp190.393.504.376,00 mengalami peningkatan sebesar Rp18.676.294.004,00 atau 10,88% dari tahun 2023 sebesar Rp171.717.210.372,00 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 36 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal 2024	Rp (171.717.210.372,00)
2	Bertambah	
3	Koreksi Saldo Awal	Rp (229.034.468,00)
4	Beban Penyusutan	Rp (19.208.036.146,00)
5	Mutasi antar SKPD	Rp (16.564.410,00)
6	Berkurang	
7	Koreksi Saldo Awal	Rp (95.374.105,00)
8	Barang yang dimanfaatkan Pihak Lain	Rp (176.892.008,00)
9	Mutasi antar SKPD Lain	Rp (16.564.410,00)
10	Hibah	Rp (221.667.468,00)
11	Rusak Berat	Rp (266.843.029,00)
12	Jumlah Akumulasi Penyusutan 2024	Rp (190.393.504.376,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rekonsiliasi nilai tercatat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2024 disajikan pada *lampiran 27*.



3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.023.800.384.386,00 mengalami peningkatan sebesar Rp106.176.088.437,00 atau 11,57% dari tahun 2023 sebesar Rp917.624.295.949,00 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 37 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Irigasi Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal 2024	Rp (917.624.295.949,00)
2	Bertambah	
3	Koreksi Saldo Awal	Rp (114.911.136,00)
4	Beban Penyusutan	Rp (109.280.344.802,00)
5	Mutasi antar SKPD	Rp (1.356.415,00)
6	Berkurang	
7	Koreksi Saldo Awal	Rp (1.563.941.919,00)
8	Mutasi antar SKPD	Rp (1.356.415,00)
9	Diserahkan ke Masyarakat/Hibah	Rp (1.646.806.402,00)
10	Rusak Berat	Rp (8.419.180,00)
11	Jumlah Akumulasi Penyusutan 2024	Rp (1.023.800.384.386,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rekonsiliasi nilai tercatat Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2024 disajikan pada *lampiran 28*.

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp326.735.495,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.674.315,00 atau 2,41% dari tahun 2023 sebesar Rp319.061.180,00 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 38 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal 2024	Rp (319.061.180,00)
2	Bertambah	
3	Beban Penyusutan	Rp (7.674.315,00)
4	Berkurang	
5	Koreksi saldo awal 2024	Rp (0,00)
6	Jumlah Akumulasi Penyusutan 2024	Rp (326.735.495,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rekonsiliasi nilai tercatat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2024 disajikan pada *lampiran 29*.

5.1.3.1.4 Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi. Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dari tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 belum membentuk dana cadangan.

5.1.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp77.139.280.493,62 mengalami penurunan sebesar Rp58.499.872.440,09



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

atau 43,13% dari tahun 2023 sebesar Rp135.639.152.933,71 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 39 Nilai Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	9.884.659.943,94	9.306.573.003,03
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.994.192.143,00	1.344.576.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	3.108.032.480,00	2.775.147.954,00
1.5.04	Aset Lain-lain	56.376.504.346,85	62.928.546.839,85
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.060.136.930,33)	(921.568.659,33)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(14.796.788.805,84)	(11.546.147.203,84)
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	17.785.422.000,00	71.752.025.000,00
Jumlah		77.291.885.177,62	135.639.152.933,71

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rekap nilai Harga perolehan Aset Lainnya disajikan pada *lampiran 30*.

5.1.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang. Tuntutan Ganti Rugi/Perbendaharaan per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp9.884.659.943,94 mengalami peningkatan sebesar Rp578.086.940,91 atau 6,21% dari tahun 2023 sebesar Rp9.306.573.003,03. Tuntutan Ganti Rugi/Perbendaharaan terdiri atas Hasil pemantauan Tim TP-TGR sampai dengan semester 2 (dua) tahun 2024 sebesar Rp9.884.659.943,94. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 40 Tuntutan Ganti Rugi/Perbendaharaan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Kasus	Per 31 Desember 2024 (Rp)
I	Kasus yang Sedang dalam Proses Penetapan		
1	Bendahara	13	536.068.208,00
2	Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain	5	50.600.772
	Sub Jumlah I	18	586.668.980,00
II	Kasus yang masih Berupa Informasi		
1	HP BPK	365	8.821.362.633,77
2	HP APIP	20	476.628.330,17
	Sub Jumlah II	385	9.297.990.963,94
	Jumlah I+II	403	9.884.659.943,94

Sumber : Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah

5.1.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan barang milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.994.192.143,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.649.616.143,00 dari tahun 2023 sebesar Rp1.344.576.000,00. Rincian kemitraan dengan pihak ketiga disajikan pada *lampiran 31 dan 32*.



5.1.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Masa manfaat aset tidak berwujud telah sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, dimana jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tak berwujud dihitung dengan masa manfaat 20 tahun sejak tanggal aset siap. Dengan metode Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menggunakan metode amortisasi garis lurus dan diterapkan secara konsisten.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.108.032.480,00 mengalami peningkatan sebesar Rp332.884.526,00 atau 12,00% dari tahun 2023 sebesar Rp2.775.147.954,00. Rincian Aset tidak Berwujud disajikan pada *lampiran 33 dan 34*.

5.1.3.1.5.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat Aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset Lain-Lain terdiri dari Aset lain-lain kondisi rusak berat, Aset lain-lain kondisi hilang/terbakar, Aset lain-lain yang telah diserahkan kemasyarakat/Pemerintah Prov/Pusat dan Aset lain-lain yang siap dijual yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik, dan selanjutnya akan dihapus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus pada Aset yang hilang akan diproses sesuai dengan prosedur penyelesaian kerugian daerah.

Aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.376.504.346,85 mengalami penurunan sebesar Rp6.552.042.493,00 atau 10,41% dari tahun 2023 sebesar Rp62.928.546.839,85 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 41 Nilai Aset Lain-Lain Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	8.541.602.016,00	6.052.673.057,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	47.834.902.330,85	56.875.873.782,85
Jumlah		56.376.504.346,85	62.928.546.839,85

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

1. Aset Rusak Berat/Usang

Aset Rusak Berat/Usang sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.541.602.016,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 42 Rekapitulasi Aset Rusak Berat/Usang Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
I	Nilai Perolehan	
1	Saldo Awal 2024	Rp 6.052.673.057,00
2	Penambahan	
3	Rusak Berat 2024	Rp 10.119.552.260,00
4	Mutasi antar SKPD	Rp 2.175.925.713,00
5	Reklasifikasi	Rp 191.169.384,00
6	Pengurangan	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
7	Penghapusan	Rp 7.711.037.685,00
8	Mutasi antar SKPD	Rp 2.175.925.713,00
9	Reklasifikasi	Rp 110.755.000,00
10	Saldo Akhir Nilai Perolehan 2024	Rp 8.541.602.016,00
II	Akumulasi Penyusutan	Rp (8.110.014.112,00)
III	Nilai Buku 2024	Rp 431.587.904,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rekap Perhitungan dan Rincian Aset kondisi rusak berat disajikan dalam *lampiran 35 dan 36*.

2. Aset Lain-lain Hilang/Terbakar

Aset Lain-lain Hilang/Terbakar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp38.225.466,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 43 Rekapitulasi Aset Lain-Lain Hilang/Terbakar Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
I	Nilai Perolehan	
1	Saldo Awal 2024	Rp 1.290.994.625,34
2	Penambahan	
3	Mutasi antar SKPD Lain	Rp 0,00
4	Pengurangan	
5	Reklasifikasi	Rp 30.600.000,00
6	Saldo Akhir Nilai Perolehan 2024	Rp 1.260.394.625,34
II	Akumulasi Penyusutan	Rp (1.222.169.159,34)
III	Nilai Buku 2024	Rp 38.225.466,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rekap Perhitungan dan Rincian Aset Hilang/Terbakar disajikan dalam *lampiran 37 dan 38*.

3. Aset Lain-lain Diserahkan Kemasyarakatan dan Pemerintah Pusat/Provinsi

Aset Lain-lain diserahkan ke masyarakat merupakan aset yang tujuannya diserahkan ke masyarakat yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum adanya Surat Keputusan Penghapusan. Aset Lain-lain Diserahkan Kemasyarakatan dan Pemerintah Pusat/Provinsi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp44.176.907.356,01 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 44 Rekapitulasi Aset Lain-Lain Diserahkan Kemasyarakatan dan Pemerintah Pusat/Provinsi Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
I	Nilai Perolehan	
1	Saldo Awal 2024	Rp 54.130.779.157,51
2	Penambahan	
3	Barang diserahkan ke Masyarakat 2024	Rp 11.664.814.433,00
4	Mutasi antar SKPD	Rp 27.564.700,00
5	Pengurangan	
6	Penghapusan	Rp 19.207.021.185,00
7	Mutasi antar SKPD	Rp 27.564.700,00
8	Reklasifikasi	Rp 27.564.700,00
9	Saldo Akhir Nilai Perolehan 2024	Rp 46.561.007.705,51
II	Akumulasi Penyusutan	Rp (2.384.100.349,50)
III	Nilai Buku 2024	Rp 44.176.907.356,01

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



Rekap Perhitungan dan Rincian Aset Diserahkan Masyarakat dan Pemerintah Pusat/Provinsi disajikan dalam *lampiran 39 dan 40*.

4. Aset Lain-lain Siap untuk Dijual

Aset Lain-lain Siap untuk Dijual sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 45 Rekapitulasi Aset Lain-Lain Siap untuk Dijual Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)
I	Nilai Perolehan	
1	Saldo Awal 2024	Rp 1.454.100.000,00
2	Penambahan	
3	Aset yang Dijual 2024	Rp 2.088.920.000,00
4	Reklasifikasi	Rp 130.355.000,00
5	Pengurangan	
6	Penghapusan	Rp 3.659.875.000,00
7	Saldo Akhir Nilai Perolehan 2024	Rp 13.500.000,00
II	Akumulasi Penyusutan	Rp (13.500.000,00)
III	Nilai Buku 2024	Rp 0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rekap Perhitungan dan Rincian Aset lain-lain Siap untuk Dijual disajikan dalam *lampiran 41 dan 42*.

5.1.3.1.5.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.060.136.930,33 mengalami peningkatan sebesar Rp138.568.271,00 atau 15,04% dari tahun 2023 sebesar Rp921.568.659,33.

5.1.3.1.5.6 Akumulasi Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.796.788.805,84 mengalami peningkatan sebesar Rp3.250.641.602,00 atau 28,15% dari tahun 2023 sebesar Rp 11.546.147.203,84.

5.1.3.1.5.7 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana transfer treasury deposit facility (TDF) per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.785.422.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp53.966.603.000,00 atau 75,21% dari tahun 2023 sebesar Rp71.752.025.000,00. Hal ini disebabkan adanya perubahan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening Treasury Deposit Facility (TDF) sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda. Dalam hal ini pokok DBH/DAU yang telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF Pemda mencatat sebagai aset lainnya.

5.1.3.1.6 Properti Investasi

Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.684.025.574,00 mengalami peningkatan 100,00% dari tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 46 Nilai Properti Investasi Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	2.164.419.450,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(480.393.876,00)	0,00
	Jumlah	1.684.025.574,00	0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.3.1.6.1 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.164.419.450,00 mengalami peningkatan 100,00% dari tahun 2023 disebabkan adanya oleh Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 32 Tahun 2024.

5.1.3.1.6.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp480.393.876,00 mengalami peningkatan 100,00% dari tahun 2023 disebabkan adanya oleh Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 32 Tahun 2024.

5.1.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.066.921.756,52 mengalami penurunan sebesar Rp4.671.002.410,45 atau 43,50% dari tahun 2023 sebesar Rp10.737.924.166,97 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 47 Nilai Kewajiban Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	6.130.643.897,12	10.737.924.166,97
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	6.130.643.897,12	10.737.924.166,97

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek Per 31 Desember 2024 Rp6.130.643.897,12 mengalami penurunan sebesar Rp4.607.280.269,85 atau 42,91% dari tahun 2023 sebesar Rp10.737.924.166,97 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 48 Jenis Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	525.599.483,12	690.404.385,72
2.1.06	Utang Belanja	5.605.044.414,00	4.619.397.553,25
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	5.428.122.228,00
	Jumlah	6.130.643.897,12	10.737.924.166,97

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen, Taperum, dan Pajak Daerah. Utang Perhitungan Pihak Ketiga



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

(PFK) tahun 2024 sebesar Rp525.599.483,12 mengalami penurunan sebesar Rp164.804.902,60 atau 23,87% dari tahun 2023 sebesar Rp690.404.385,72 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 49 Rincian Utang PFK Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan Kas	Pengeluaran Kas	Saldo Akhir
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	18.829.087.899,00	18.829.087.899,00	0,00
2	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	540.227.642,00	540.227.642,00	0,00
3	Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	1.625.109.628,00	1.625.109.628,00	0,00
4	Utang PPh 21	240.143.771,00	12.008.650.843,60	12.138.506.226,00	110.288.388,60
5	Utang PPh 22/Ps 4 (2)	4.319.485,00	4.969.782.405,00	4.970.568.792,00	3.533.098,00
6	Utang PPh 23/Lainnya	78.383.807,63	2.407.174.189,00	2.413.894.245,00	71.663.751,63
7	Utang PPN Pusat	283.949.156,09	30.079.129.520,80	30.079.128.799,00	283.949.877,89
8	Utang Iuran Wajib Pegawai	83.608.166,00	21.470.694.670,75	21.498.138.469,75	56.164.367,00
Jumlah		690.404.385,72	91.929.856.798,15	92.094.661.700,75	525.599.483,12

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rincian utang perhitungan pihak ketiga (PFK) pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 43*.

5.1.3.2.1.2 Utang Belanja

Utang belanja adalah kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar yang timbul akibat hak atas pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta pemberian bantuan keuangan ke desa. Utang Belanja Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.605.044.414,00 mengalami peningkatan sebesar Rp985.646.860,75 atau 21,34% dari tahun 2023 sebesar Rp4.619.397.553,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 50 Rincian Utang Belanja Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	0,00	3.099.127,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	5.365.044.414,00	4.376.298.426,25
2.1.06.13	Utang Belanja Bantuan Keuangan	240.000.000,00	240.000.000,00
Jumlah		5.605.044.414,00	4.619.397.553,25

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rincian utang belanja pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 44*.

5.1.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang yang timbul selain dari utang perhitungan pihak ketiga maupun utang belanja. Tidak terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024.



5.1.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

5.1.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.364.975.871.561,82 mengalami peningkatan sebesar Rp85.715.080.815,54 atau 3,81% dari tahun 2023 sebesar Rp2.278.260.790.746,28. Rincian Ekuitas Dana disajikan dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas pada *point* 5.1.6.

5.1.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1 Pendapatan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 1 Realisasi Pendapatan-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	89.371.456.229,56	102.640.169.447,74	(13.268.713.218,18)	(12,93)
7.2	Pendapatan Transfer-LO	1.110.602.708.221,00	1.060.727.703.622,00	49.875.004.599,00	4,70
7.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO	13.525.963.028,30	17.209.986.103,00	(3.684.023.074,70)	(21,41)
	Jumlah	1.213.500.127.478,86	1.180.577.859.172,74	32.922.268.306,12	2,79

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.1.4. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.01	Pajak Daerah-LO	13.857.847.869,00	14.091.920.677,00	(234.072.808,00)	(1,66)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	7.003.659.891,00	6.128.186.120,00	875.473.771,00	14,29
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	4.713.872.980,00	4.165.684.360,00	548.188.620,00	13,16
7.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	63.796.075.489,56	78.254.378.290,74	(14.458.302.801,18)	(18,48)
Jumlah		89.371.456.229,56	102.640.169.447,74	(13.268.713.218,18)	(12,93)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 3 Realisasi Pajak Daerah-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.01.06	Pajak Hotel – LO	738.579.937,00	409.323.220,00	329.256.717,00	80,44
7.1.01.07	Pajak Restoran – LO	2.451.014.999,00	1.976.195.622,00	474.819.377,00	24,03
7.1.01.08	Pajak Hiburan – LO	1.744.000,00	2.500.000,00	(756.000,00)	(30,24)
7.1.01.09	Pajak Reklame – LO	500.314.533,00	456.841.360,00	43.473.173,00	9,52
7.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.436.458.404,00	4.918.821.675,00	517.636.729,00	10,52
7.1.01.11	Pajak Parkir – LO	55.938.600,00	107.568.000,00	(51.629.400,00)	(48,00)
7.1.01.12	Pajak Air Tanah – LO	10.130.905,00	4.811.675,00	5.319.230,00	110,55
7.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet – LO	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
7.1.01.14	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan – LO	1.176.288.857,00	2.127.578.630,00	(951.289.773,00)	(44,71)
7.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	2.293.816.376,00	2.059.009.650,00	234.806.726,00	11,40
7.1.01.16	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)– LO	1.193.311.258,00	2.029.270.845,00	(835.959.587,00)	(41,20)
Jumlah		13.857.847.869,00	14.091.920.677,00	(234.072.808,00)	(1,66)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- Kenaikan pendapatan pada sektor perhotelan dan penginapan terjadi karena adanya sosialisasi, edukasi bersama swasta, dan pengawasan intensif dari perangkat daerah terkait;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

- b. Peningkatan penerimaan sektor restoran, rumah makan, kafe, kantin, catering dan warung terjadi karena adanya upaya aktif dari petugas perangkat daerah terkait yang mengedukasi serta mensosialisasikan kewajiban pajak makan minum kepada pemilik usaha;
- c. Pada sektor pajak hiburan masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban sesuai dengan regulasi;
- d. Potensi dari usaha sarang burung walet di Kabupaten Tojo Una-Una masih belum tergarap secara optimal;
- e. Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan masih dibawah target karena terkendala penagihan dan kepatuhan wajib pajak (WP).

Perbandingan pendapatan pajak daerah LO dan LRA tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 4 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
7.1.01.06	Pajak Hotel – LO	738.579.937,00	738.579.937,00	0,00
7.1.01.07	Pajak Restoran – LO	2.451.014.999,00	2.451.014.999,00	0,00
7.1.01.08	Pajak Hiburan – LO	1.744.000,00	1.744.000,00	0,00
7.1.01.09	Pajak Reklame – LO	500.314.533,00	510.536.006,00	(10.221.473,00)
7.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.436.458.404,00	5.408.704.511,00	27.753.893,00
7.1.01.11	Pajak Parkir – LO	55.938.600,00	55.938.600,00	0,00
7.1.01.12	Pajak Air Tanah – LO	10.130.905,00	10.130.905,00	0,00
7.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet – LO	250.000,00	250.000,00	0,00
7.1.01.14	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan – LO	1.176.288.857,00	1.334.337.199,00	(158.048.342,00)
7.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	2.293.816.376,00	2.225.280.799,00	68.535.577,00
7.1.01.16	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)– LO	1.193.311.258,00	1.193.311.258,00	0,00
Jumlah		13.857.847.869,00	13.929.828.214,00	(71.980.345,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp71.980.345,00 (Rp13.857.847.869,00-Rp13.929.828.214,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA	Rp	71.980.345,00
Penambah :		
1. Penambahan Piutang Pajak Reklame	Rp	4.430.652,00
1. Penambahan Piutang Pajak Penerangan Jalan	Rp	476.102.735,00
2. Penambahan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Rp	29.639.554,00
3. Penambahan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp	438.514.546,00
Jumlah Penambah	Rp	948.687.487,00
Pengurang :		
1. Pelunasan Piutang Pajak Reklame	Rp	14.652.125,00
2. Pelunasan Piutang Pajak Penerangan Jalan	Rp	448.348.842,00
3. Pelunasan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan	Rp	187.687.896,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Selisih LO-LRA		Rp	71.980.345,00
Batuan			
4. Pelunasan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp		369.978.969,00
Jumlah Pengurang	Rp		1.020.667.832,00
Jumlah Penjelasan Selisih		Rp	71.980.345,00

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Pajak Daerah-LO dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel - LO

Realisasi pajak hotel-LO tahun 2024 sebesar Rp738.579.937,00 bersumber dari realisasi pajak hotel-LRA sebesar Rp738.579.937,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 5 Realisasi Pajak Hotel-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.01.06.01	Pajak Hotel-LO	713.968.937,00	365.785.720,00	348.183.217,00	95,19
7.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	24.611.000,00	43.537.500,00	(18.926.500,00)	(43,47)
	Jumlah	738.579.937,00	409.323.220,00	329.256.717,00	80,44

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Pajak Restoran – LO

Realisasi pajak restoran-LO tahun 2024 sebesar Rp2.451.014.999,00 bersumber dari realisasi pajak restoran-LRA sebesar Rp2.451.014.999,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 6 Realisasi Pajak Restoran-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0,00	761.350,00	(761.350,00)	(100,00)
7.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	79.775.646,00	47.118.334,00	32.657.312,00	69,31
7.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	37.698.720,00	23.505.461,00	14.193.259,00	60,38
7.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO	1.100.000,00	1.640.000,00	(540.000,00)	(32,93)
7.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	175.000,00	550.000,00	(375.000,00)	(68,18)
7.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	2.332.265.633,00	1.902.620.477,00	429.645.156,00	22,58
	Jumlah	2.451.014.999,00	1.976.195.622,00	474.819.377,00	24,03

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

3. Pajak Hiburan – LO

Realisasi pajak hiburan-LO tahun 2024 sebesar Rp1.744.000,00 bersumber dari realisasi pajak hiburan-LRA sebesar Rp1.744.000,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

4. Pajak Reklame – LO

Realisasi pajak reklame-LO tahun 2024 sebesar Rp500.314.533,00 bersumber dari realisasi pajak reklame-LRA sebesar Rp510.536.006,00 dengan penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp4.430.652,00 dan pengurangan piutang tahun 2023 sebesar Rp14.652.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 7 Realisasi Pajak Reklame-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	328.703.872,00	335.228.356,00	(6.524.484,00)	(1,95)
7.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain-LO	171.610.661,00	121.613.004,00	49.997.657,00	41,11
Jumlah		500.314.533,00	456.841.360,00	43.473.173,00	9,52

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5. Pajak Penerangan Jalan – LO

Realisasi pajak penerangan jalan-LO tahun 2024 sebesar Rp5.436.458.404,00 bersumber dari realisasi pajak penerangan jalan-LRA sebesar Rp5.408.704.511,00 dengan penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp476.102.735,00 serta pengurangan piutang tahun 2023 sebesar Rp448.348.842,00.

6. Pajak Parkir - LO

Realisasi pajak parkir-LO tahun 2024 sebesar Rp55.938.600,00 bersumber dari realisasi pajak parkir-LRA sebesar Rp55.938.600,00.

7. Pajak Air Tanah - LO

Realisasi pajak air tanah-LO tahun 2024 sebesar Rp10.130.905,00 bersumber dari realisasi pajak air tanah-LRA sebesar Rp10.130.905,00.

8. Pajak Sarang Burung Walet - LO

Realisasi pajak sarang burung walet-LO tahun 2024 sebesar Rp250.000,00 bersumber dari realisasi pajak sarang burung walet -LRA sebesar Rp250.000,00.

9. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan - LO

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan-LO tahun 2024 sebesar Rp1.176.288.857,00 bersumber dari realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan-LRA sebesar Rp1.334.337.199,00 dengan penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp29.639.554,00 dan pengurangan piutang tahun 2023 sebesar Rp187.687.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 8 Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur-LO	238.809.537,00	349.160.537,20	(110.351.000,20)	(31,60)
7.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	813.038.408,00	1.490.395.514,80	(677.357.106,80)	(45,45)
7.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	124.440.912,00	288.022.578,00	(163.581.666,00)	(56,79)
Jumlah		1.176.288.857,00	2.127.578.630,00	(951.289.773,00)	(44,71)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO

Realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan-LO tahun 2024 sebesar Rp2.293.816.376,00 bersumber dari realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan-LRA sebesar Rp2.225.280.799,00 dengan penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp438.514.546,00 dan pengurangan piutang tahun 2023 sebesar Rp369.978.969,00.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO tahun 2024 sebesar Rp1.193.311.258,00 bersumber dari realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LRA sebesar Rp1.193.311.258,00.

5.1.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 9 Realisasi Retribusi Daerah-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	5.604.895.913,00	4.838.730.900,00	766.165.013,00	15,83
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.124.578.576,00	1.139.330.220,00	(14.751.644,00)	(1,29)
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	274.185.402,00	150.125.000,00	124.060.402,00	82,64
Jumlah		7.003.659.891,00	6.128.186.120,00	875.473.771,00	14,29

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- Tidak optimalnya pemanfaatan pasar oleh pedagang sehingga menyebabkan penurunan retribusi pasar dan parkir;
- Belum optimalnya realisasi retribusi jasa umum khususnya Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus disebabkan alat baru masih dalam tahap pengenalan dan sosialisasi pada tahun 2024, selain itu penggunaannya masih digratiskan untuk masyarakat umum.

Perbandingan pendapatan retribusi daerah LO dan LRA tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 10 Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	5.604.895.913,00	5.143.018.300,00	461.877.613,00
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.124.578.576,00	1.124.578.576,00	0,00
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	274.185.402,00	274.185.402,00	0,00
Jumlah		7.003.659.891,00	6.541.782.278,00	461.877.613,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 *lebih besar* dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp461.877.613,00 (Rp7.003.659.891,00-Rp6.541.782.278,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA		Rp	461.877.613,00
Penambah :			
1. Pengakuan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024	Rp	1.100.177.213,00	
	Jumlah Penambah	Rp	1.100.177.213,00
Pengurang :			
1. Pengakuan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2023	Rp	638.299.600,00	
	Jumlah Pengurang	Rp	638.299.600,00
Jumlah Penjelasan Selisih		Rp	461.877.613,00

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Retribusi Daerah-LO, diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum - LO

Realisasi retribusi jasa umum-LO tahun 2024 sebesar Rp5.604.895.913,00 bersumber dari realisasi retribusi jasa umum-LRA sebesar Rp5.143.018.300,00 dan pengakuan piutang retribusi tahun 2024 sebesar Rp1.100.177.213,00 serta pengakuan piutang retribusi tahun 2023 sebesar Rp638.299.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 11 Realisasi Retribusi Jasa Umum-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	5.348.070.913,00	4.724.737.900,00	623.333.013,00	13,19
7.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	195.225.000,00	85.843.000,00	109.382.000,00	127,42
7.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	57.600.000,00	28.150.000,00	29.450.000,00	104,62
7.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
	Jumlah	5.604.895.913,00	4.838.730.900,00	766.165.013,00	15,83

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Retribusi Jasa Usaha – LO

Realisasi retribusi jasa usaha-LO tahun 2024 sebesar Rp1.124.578.576,00 bersumber dari realisasi retribusi jasa usaha-LRA sebesar Rp1.124.578.576,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 12 Realisasi Retribusi Jasa Usaha-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	260.604.000,00	406.048.000,00	(145.444.000,00)	(35,82)
7.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	124.257.000,00	118.672.500,00	5.584.500,00	4,71
7.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	75.207.500,00	139.521.250,00	(64.313.750,00)	(46,10)
7.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	12.800.000,00	56.200.000,00	(43.400.000,00)	(77,22)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	41.450.000,00	35.190.000,00	6.260.000,00	17,79
7.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	208.631.596,00	211.658.470,00	(3.026.874,00)	(1,43)
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	179.830.000,00	172.040.000,00	7.790.000,00	4,53
7.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
7.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	91.543.060,00	0,00	91.543.060,00	100,00
7.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	56.355.420,00	0,00	56.355.420,00	100,00
7.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	64.900.000,00	0,00	64.900.000,00	100,00
Jumlah		1.124.578.576,00	1.139.330.220,00	(14.751.644,00)	(1,29)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

3. Retribusi Perizinan Tertentu – LO

Realisasi retribusi perizinan tertentu-LO tahun 2024 sebesar Rp274.185.402,00 bersumber dari realisasi retribusi perizinan tertentu-LRA sebesar Rp274.185.402,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 13 Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	148.125.000,00	(148.125.000,00)	(100,00)
7.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
7.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	274.185.402,00	0,00	274.185.402,00	100,00
Jumlah		274.185.402,00	150.125.000,00	124.060.402,00	82,64

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tabel 5.1.4. 14 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	4.713.872.980,00	4.165.684.360,00	548.188.620,00	13,16
Jumlah		4.713.872.980,00	4.165.684.360,00	548.188.620,00	13,16

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan adanya peningkatan investasi permanen dalam penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Sulawesi Tengah pada tahun 2024, sehingga menyebabkan pembagian deviden meningkat secara signifikan. Deviden merupakan bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham, ketika laba meningkat pembagian deviden pun menjadi lebih besar. Perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 15 Perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
7.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	4.713.872.980,00	4.713.872.980,00	0,00
Jumlah		4.713.872.980,00	4.713.872.980,00	0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2024 sama dengan saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp4.713.872.980,00.

5.1.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD Yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 16 Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	638.647.069,00	0,00	638.647.069,00	100,00
7.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	68.955.000,00	18.475.000,00	50.480.000,00	273,23
7.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	3.070.000,00	18.100.000,00	(15.030.000,00)	(83,04)
7.1.04.05	Jasa Giro-LO	45.774.805,61	206.450.372,96	(160.675.567,35)	(77,83)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.04.07	Pendapatan Bunga-LO	3.648.326.720,53	1.930.204.611,91	1.718.122.108,62	89,01
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.751.667.464,08	6.685.748.463,02	(2.934.080.998,94)	(43,89)
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	55.639.634.430,34	60.373.045.264,85	(4.733.410.834,51)	(7,84)
7.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00	9.022.354.578,00	(9.022.354.578,00)	(100,00)
Jumlah		63.796.075.489,56	78.254.378.290,74	(14.458.302.801,18)	(18,48)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- Adanya pendapatan bunga yang bersumber dari Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) pada Bank Indonesia tahun 2024;
- Adanya peningkatan pendapatan BLUD atas pembayaran piutang tahun 2023 yang direalisasikan pada tahun 2024.

Perbandingan lain-lain PAD yang sah LO dan LRA tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 17 Perbandingan Lain-Lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
7.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	638.647.069,00	638.647.069,00	0,00
7.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	68.955.000,00	68.955.000,00	0,00
7.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00
7.1.04.05	Jasa Giro-LO	45.774.805,61	45.774.805,61	0,00
7.1.04.07	Pendapatan Bunga-LO	3.648.326.720,53	3.648.326.720,53	0,00
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.751.667.464,08	3.173.580.523,17	578.086.940,91
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	55.639.634.430,34	52.618.002.007,34	3.021.632.423,00
Jumlah		63.796.075.489,56	60.196.356.125,65	3.599.719.363,91

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Lain-lain PAD Yang Sah dalam LO Tahun 2024 *lebih besar* dari saldo Lain-lain PAD Yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp3.599.719.363,91 (Rp63.796.075.489,56-Rp60.196.356.125,65). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-lain PAD Yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA		Rp	3.599.719.363,91
Penambah :			
1. Penyesuaian Tuntutan Ganti Rugi	Rp	578.086.940,91	
2. Penambahan Piutang BLUD	Rp	8.722.124.611,00	
Jumlah Penambah	Rp	9.300.211.551,91	
Pengurang :			
1. Pelunasan Piutang BLUD	Rp	5.700.492.188,00	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Selisih LO-LRA	Rp	3.599.719.363,91
Jumlah Pengurang	Rp	5.700.492.188,00
Jumlah Penjelasan Selisih	Rp	3.599.719.363,91

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Lain-lain PAD Yang Sah-LO dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Realisasi hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp638.647.069,00 bersumber dari realisasi hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-LRA sebesar Rp638.647.069,00.

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Realisasi hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp68.955.000,00 bersumber dari realisasi hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LRA sebesar Rp68.955.000,00.

3. Hasil Kerja Sama Daerah – LO

Realisasi hasil kerja sama daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp3.070.000,00 bersumber dari realisasi hasil kerja sama daerah-LRA sebesar Rp3.070.000,00.

4. Jasa Giro – LO

Realisasi jasa giro-LO tahun 2024 sebesar Rp45.739.819,61 bersumber dari realisasi jasa giro-LRA sebesar Rp45.739.819,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 18 Realisasi Jasa Giro-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	10.060.125,00	167.625.276,68	(157.565.151,68)	(94,00)
7.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	35.679.694,61	38.825.096,28	(3.145.401,67)	(8,10)
Jumlah		45.739.819,61	206.450.372,96	(160.710.553,35)	(77,84)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5. Pendapatan Bunga – LO

Realisasi pendapatan bunga-LO tahun 2024 sebesar Rp3.648.326.720,53 bersumber dari realisasi pendapatan bunga-LRA sebesar Rp3.648.326.720,53.

6. Pendapatan dari Pengembalian– LO

Realisasi pendapatan dari pengembalian-LO tahun 2024 sebesar Rp3.751.667.464,08 bersumber dari realisasi pendapatan dari pengembalian-LRA sebesar Rp3.173.580.523,17 serta penyesuaian tuntutan ganti rugi sebesar Rp578.086.940,91.

7. Pendapatan BLUD – LO

Realisasi pendapatan BLUD-LO tahun 2024 sebesar Rp55.639.634.430,34 bersumber dari realisasi pendapatan BLUD-LRA sebesar Rp52.618.002.007,34 dengan penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp8.722.124.611,00 serta pengurangan piutang tahun 2023 sebesar Rp5.700.492.188,00.



8. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO

Realisasi pendapatan dana kapitasi jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP)-LO tahun 2024 terealisasi pada rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

5.1.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 19 Realisasi Pendapatan Transfer-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.059.090.979.346,00	1.019.518.846.443,00	39.572.132.903,00	3,88
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	51.511.728.875,00	41.208.857.179,00	10.302.871.696,00	25,00
Jumlah		1.110.602.708.221,00	1.060.727.703.622,00	49.875.004.599,00	4,70

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 20 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	1.038.506.482.346,00	969.898.477.443,00	68.608.004.903,00	7,07
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	49.620.369.000,00	(49.620.369.000,00)	(100,00)
7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO	20.584.497.000,00	0,00	20.584.497.000,00	100,00
Jumlah		1.059.090.979.346,00	1.019.518.846.443,00	39.572.132.903,00	3,88

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- Realisasi anggaran dana perimbangan khususnya pada DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak mencapai target disebabkan tidak terpenuhinya kuota PPPK yang telah dianggarkan;
- Penyerapan anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direalisasikan berdasarkan nilai kontrak pekerjaan;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

- c. Ketidaksesuaian perhitungan anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik disebabkan penganggarannya tidak dikurangi dengan SiLPA tahun sebelumnya.

Perbandingan pendapatan transfer pemerintah pusat LO dan LRA tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 21 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dan LRA Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	1.038.506.482.346,00	1.092.473.085.346,00	(53.966.603.000,00)
7.2.01.05	Dana Desa-LO	0,00	113.557.804.000,00	(113.557.804.000,00)
7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO	20.584.497.000,00	20.584.497.000,00	0,00
Jumlah		1.059.090.979.346,00	1.226.615.386.346,00	(167.524.407.000,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2024 *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2024 sebesar Rp167.524.407.000,00 (Rp1.059.090.979.346,00–Rp1.226.615.386.346,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA		Rp	167.524.407.000,00
Penambah :			
1. Penyesuaian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp	17.785.422.000,00	
Jumlah Penambah		Rp	17.785.422.000,00
Pengurang :			
1. Penyesuaian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp	71.752.025.000,00	
2. Penerapan Bultek 21 (Dana Desa (non provinsi) tidak diakui dalam LO)	Rp	113.557.804.000,00	
Jumlah Pengurang		Rp	185.309.829.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih		Rp	167.524.407.000,00

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan - LO

Realisasi dana perimbangan-LO tahun 2024 sebesar Rp1.038.506.482.346,00 bersumber dari realisasi dana dana perimbangan-LRA sebesar Rp1.092.473.085.346,00 serta penambahan penyesuaian dana transfer treasury deposit facility (TDF) tahun 2024 sebesar Rp17.785.422.000,00 dan pengurangan penyesuaian dana transfer treasury deposit facility (TDF) tahun 2023 sebesar Rp71.752.025.000,00.

Rincian realisasi dana dana perimbangan-LO tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tabel 5.1.4. 22 Realisasi Dana Perimbangan-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	181.494.088.000,00	194.592.200.500,00	(13.098.112.500,00)	(6,73)
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	636.414.767.281,00	566.048.075.000,00	70.366.692.281,00	12,43
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	113.426.288.327,00	105.409.293.801,00	8.016.994.526,00	7,61
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	107.171.338.738,00	103.848.908.142,00	3.322.430.596,00	3,20
Jumlah		1.038.506.482.346,00	969.898.477.443,00	68.608.004.903,00	7,07

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Insentif Fiskal – LO

Realisasi insentif fiskal-LO tahun 2024 sebesar Rp20.584.497.000,00 bersumber dari realisasi insentif fiskal-LRA sebesar Rp20.584.497.000,00.

5.1.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Transfer Antar Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 23 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil – LO	51.511.728.875,00	38.528.857.179,00	12.982.871.696,00	33,70
7.2.02.02	Bantuan Keuangan – LO	0,00	2.680.000.000,00	(2.680.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		51.511.728.875,00	41.208.857.179,00	10.302.871.696,00	25,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- Adanya peningkatan pendapatan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, disebabkan adanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahun;
 - Adanya intensifikasi dalam penagihan piutang kendaraan bermotor sehingga menyebabkan peningkatan penerimaan pendapatan dana bagi hasil di kabupaten.
- Perbandingan pendapatan transfer antar daerah LO dan LRA tahun 2024 sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tabel 5.1.4. 24 Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan LRA Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil – LO	51.511.728.875,00	46.539.814.264,00	4.971.914.611,00
Jumlah		51.511.728.875,00	46.539.814.264,00	4.971.914.611,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2024 *lebih besar* dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp4.971.914.611,00 (Rp51.511.728.875,00–Rp46.539.814.264,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA		Rp	4.971.914.611,00
Penambah :			
1. Penambahan Piutang Transfer Antar Daerah	Rp	10.401.490.794,00	
Jumlah Penambah		Rp	10.401.490.794,00
Pengurang :			
1. Penyesuaian Piutang Transfer Antar Daerah	Rp	5.429.576.183,00	
Jumlah Pengurang		Rp	5.429.576.183,00
Jumlah Penjelasan Selisih		Rp	4.971.914.611,00

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Pendapatan Transfer Antar Daerah–LO dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil – LO

Realisasi pendapatan bagi hasil pajak-LO tahun 2024 sebesar Rp51.511.728.875,00 bersumber dari realisasi pendapatan bagi hasil pajak-LRA sebesar Rp46.539.814.264,00 dengan penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp10.401.490.794,00 serta pengurangan piutang tahun 2023 sebesar Rp5.429.576.183,00.

5.1.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 25 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	4.799.869.431,00	17.209.986.103,00	(12.410.116.672,00)	(72,11)
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	8.726.093.597,30	0,00	8.726.093.597,30	100,00
Jumlah		13.525.963.028,30	17.209.986.103,00	(3.684.023.074,70)	(21,41)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

5.1.4.1.3.1 Pendapatan Hibah -LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 26 Realisasi Pendapatan Hibah-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	3.596.872.732,00	16.231.386.060,00	(12.634.513.328,00)	(77,84)
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	514.396.699,00	4.914.400,00	509.482.299,00	10.367,13
7.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat-LO	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	688.600.000,00	823.685.643,00	(135.085.643,00)	(16,40)
Jumlah		4.799.869.431,00	17.209.986.103,00	(12.410.116.672,00)	(72,11)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hibah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya tambahan pendapatan hibah sanitasi dari Pemerintah Pusat yang merupakan kontribusi dalam mendukung program sanitasi tingkat daerah.

Perbandingan pendapatan hibah LO dan LRA tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 27 Perbandingan Pendapatan Hibah LO dan LRA Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	3.596.872.732,00	1.032.000.000,00	2.564.872.732,00
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	514.396.699,00	0,00	514.396.699,00
7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	688.600.000,00	0,00	688.600.000,00
Jumlah		4.799.869.431,00	1.032.000.000,00	3.767.869.431,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2024 *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp3.767.869.431,00 (Rp4.799.869.431,00–Rp1.032.000.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA		Rp	3.767.869.431,00
<u>Penambah :</u>			
1. Penambahan Hibah Aset Tetap dari KEMENKES RI	Rp	2.564.872.732,00	
2. Penambahan Hibah Persediaan dari Dinkes Provinsi	Rp	3.041.323,00	
3. Penambahan Hibah Persediaan dari Dinas Pangan Provinsi	Rp	511.355.376,00	
9. Penambahan Hibah dana CSR dari PT Bank Sulteng	Rp	688.600.000,00	
Jumlah Penambah	Rp	3.767.869.431,00	
<u>Pengurang :</u>			
1. -	Rp	0,00	
Jumlah Pengurang	Rp	0,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		Rp	3.767.869.431,00

5.1.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 28 Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	8.726.093.597,30	0,00	8.726.093.597,30	100,00
Jumlah		8.726.093.597,30	0,00	8.726.093.597,30	100,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- a. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perbandingan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO dan LRA tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 29 Perbandingan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO dan LRA Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
7.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada	8.726.093.597,30	8.726.093.597,30	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
	FKTP-LO			
	Jumlah	8.726.093.597,30	8.726.093.597,30	0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam LO Tahun 2024 sama dengan saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp8.721.616.144,00.

5.1.4.2 Beban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 30 Realisasi Beban TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1	Beban Operasi	941.659.957.916,32	767.767.540.687,44	173.892.417.228,88	22,65
8.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi	175.084.532.543,00	136.050.127.214,00	39.034.405.329,00	28,69
8.2	Beban Tidak Terduga	197.750.625,00	23.000.000,00	174.750.625,00	759,79
8.3	Beban Transfer	82.341.159.900,00	69.793.644.200,00	12.547.515.700,00	17,98
	Jumlah	1.199.283.400.984,32	973.634.312.101,44	225.649.088.882,88	23,18

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.4.2.1 Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 31 Realisasi Beban Operasi TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01	Beban Pegawai	467.749.510.001,00	369.731.126.416,00	98.018.383.585,00	26,51
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	411.419.966.527,78	356.036.389.620,22	55.383.576.907,56	15,56
8.1.04	Beban Subsidi	330.000.000,00	550.000.000,00	(220.000.000,00)	(40,00)
8.1.05	Beban Hibah	59.255.025.451,00	33.380.510.030,00	25.874.515.421,00	77,51
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	2.702.667.939,00	7.736.111.206,00	(5.033.443.267,00)	(65,06)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	202.787.997,54	333.403.415,22	(130.615.417,68)	(39,18)
	Jumlah	941.659.957.916,32	767.767.540.687,44	173.892.417.228,88	22,65

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Komposisi realisasi Beban Operasi Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



Grafik 5.3 Komposisi Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023

5.1.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 32 Realisasi Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	350.600.183.076,00	263.665.534.340,00	86.934.648.736,00	32,97
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	37.753.266.519,00	36.281.984.907,00	1.471.281.612,00	4,06
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	63.275.326.431,00	53.284.972.112,00	9.990.354.319,00	18,75
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	9.960.619.814,00	9.923.863.864,00	36.755.950,00	0,37
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	161.284.817,00	162.711.680,00	(1.426.863,00)	(0,88)
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	568.000.000,00	582.600.000,00	(14.600.000,00)	(2,51)
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	5.430.829.344,00	5.829.459.513,00	(398.630.169,00)	(6,84)
Jumlah		467.749.510.001,00	369.731.126.416,00	98.018.383.585,00	26,51

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- Capaian realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena adanya penambahan anggaran untuk pembayaran gaji ASN PPPK;
- Perhitungan TPP didasarkan pada beban kinerja.

Perbandingan beban pegawai dan belanja pegawai tahun 2024 sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tabel 5.1.4. 33 Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	350.600.183.076,00	350.603.282.203,00	(3.099.127,00)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	37.753.266.519,00	37.753.266.519,00	0,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	63.275.326.431,00	63.275.326.431,00	0,00
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	9.960.619.814,00	9.960.619.814,00	0,00
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	161.284.817,00	161.284.817,00	0,00
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	568.000.000,00	568.000.000,00	0,00
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	5.430.829.344,00	5.430.829.344,00	0,00
	Jumlah	467.749.510.001,00	467.752.609.128,00	(3.099.127,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 *lebih kecil* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp3.099.127,00 (Rp467.749.510.001,00–Rp467.752.609.128,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA	Rp	3.099.127,00
Penambah :		
1. -	Rp	0,00
Jumlah Penambah	Rp	0,00
Pengurang :		
1. Pembayaran Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	3.099.127,00
Jumlah Pengurang	Rp	3.099.127,00
Jumlah Penjelasan Selisih	Rp	3.099.127,00

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Beban Pegawai dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2024 sebesar Rp350.600.183.076,00 mengalami peningkatan sebesar Rp86.934.648.736,00 atau 32,97% dari beban gaji dan tunjangan ASN tahun 2023 sebesar Rp263.665.534.340,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 34 Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	272.434.774.042,00	198.279.055.247,00	74.155.718.795,00	37,40
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	23.451.660.341,00	18.615.121.268,00	4.836.539.073,00	25,98



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.375.970.660,00	6.552.132.000,00	(176.161.340,00)	(2,69)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	12.010.305.610,00	12.185.163.925,00	(174.858.315,00)	(1,44)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.204.581.750,00	2.953.493.939,00	3.251.087.811,00	110,08
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	14.221.665.660,00	11.741.755.257,00	2.479.910.403,00	21,12
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	309.858.171,00	551.727.829,00	(241.869.658,00)	(43,84)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	4.145.720,00	2.984.327,00	1.161.393,00	38,92
8.1.01.01.09	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	13.435.555.187,00	11.135.607.483,00	2.299.947.704,00	20,65
8.1.01.01.10	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	537.771.309,00	410.077.242,00	127.694.067,00	31,14
8.1.01.01.11	Beban luran Jaminan Kematian ASN	1.613.894.626,00	1.238.415.823,00	375.478.803,00	30,32
Jumlah		350.600.183.076,00	263.665.534.340,00	86.934.648.736,00	32,97

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Beban Tambahan Penghasilan ASN tahun 2024 sebesar Rp37.753.266.519,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.471.281.612,00 atau 4,06% dari beban tambahan penghasilan ASN tahun 2023 sebesar Rp36.281.984.907,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 35 Realisasi Beban Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	32.905.690.959,00	33.006.853.177,00	(101.162.218,00)	(0,31)
8.1.01.02.04	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.847.575.560,00	3.275.131.730,00	1.572.443.830,00	48,01
Jumlah		37.753.266.519,00	36.281.984.907,00	1.471.281.612,00	4,06

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2024 sebesar Rp63.275.326.431,00 mengalami peningkatan sebesar Rp9.990.354.319,00 atau 18,75% dari beban Tambahan Penghasilan berdasarkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2023 sebesar Rp53.284.972.112,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 36 Realisasi Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.03.01	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	593.536.400,00	592.960.080,00	576.320,00	0,10
8.1.01.03.02	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	53.526.492,00	43.530.732,00	9.995.760,00	22,96
8.1.01.03.03	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	32.361.751.400,00	29.380.674.400,00	2.981.077.000,00	10,15
8.1.01.03.04	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	18.059.520.000,00	13.999.224.900,00	4.060.295.100,00	29,00
8.1.01.03.05	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.857.000.000,00	2.270.490.000,00	586.510.000,00	25,83
8.1.01.03.06	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.933.263.528,00	0,00	1.933.263.528,00	100,00
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	6.421.511.111,00	6.033.044.000,00	388.467.111,00	6,44
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	995.217.500,00	965.048.000,00	30.169.500,00	3,13
	Jumlah	63.275.326.431,00	53.284.972.112,00	9.990.354.319,00	18,75

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

4. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2024 sebesar Rp9.960.619.814,00 mengalami peningkatan sebesar Rp36.755.950,00 atau 0,37% dari Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2023 sebesar Rp9.923.863.864,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 37 Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.04.01	Beban Uang Representasi DPRD	550.620.000,00	552.090.000,00	(1.470.000,00)	(0,27)
8.1.01.04.02	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	41.617.800,00	37.489.200,00	4.128.600,00	11,01
8.1.01.04.03	Beban Tunjangan Beras DPRD	54.749.520,00	51.273.360,00	3.476.160,00	6,78
8.1.01.04.04	Beban Uang Paket DPRD	48.478.500,00	48.132.000,00	346.500,00	0,72
8.1.01.04.05	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	799.840.500,00	802.638.400,00	(2.797.900,00)	(0,35)
8.1.01.04.06	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	70.978.950,00	84.955.500,00	(13.976.550,00)	(16,45)
8.1.01.04.08	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00	0,00
8.1.01.04.09	Beban Tunjangan Reses DPRD	525.000.000,00	787.500.000,00	(262.500.000,00)	(33,33)
8.1.01.04.10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	489.116,00	681.948,00	(192.832,00)	(28,28)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.04.12	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.673.110.428,00	1.637.103.456,00	36.006.972,00	2,20
8.1.01.04.13	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.835.000.000,00	2.772.000.000,00	63.000.000,00	2,27
8.1.01.04.14	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	210.735.000,00	0,00	210.735.000,00	100,00
Jumlah		9.960.619.814,00	9.923.863.864,00	36.755.950,00	0,37

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp161.284.817,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.426.863,00 atau 0,88% dari Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2023 sebesar Rp162.711.680,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 38 Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.05.01	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
8.1.01.05.03	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
8.1.01.05.04	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.027.760,00	2.027.760,00	0,00	0,00
8.1.01.05.05	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	683.937,00	2.110.800,00	(1.426.863,00)	(67,60)
8.1.01.05.06	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
8.1.01.05.07	Beban luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.241.600,00	5.250.960,00	(9.360,00)	(0,18)
8.1.01.05.08	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	131.040,00	(18.720,00)	(14,29)
8.1.01.05.09	Beban luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	308.880,00	28.080,00	9,09
Jumlah		161.284.817,00	162.711.680,00	(1.426.863,00)	(0,88)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

6. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp568.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.600.000,00 atau 2,51% dari Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2023 sebesar Rp582.600.000,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 39 Realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.06.01	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	168.000.000,00	201.600.000,00	(33.600.000,00)	(16,67)
8.1.01.06.02	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	381.000.000,00	19.000.000,00	4,99
Jumlah		568.000.000,00	582.600.000,00	(14.600.000,00)	(2,51)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

7. Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD tahun 2024 sebesar Rp5.430.829.344,00 mengalami penurunan sebesar Rp398.630.169,00 dari Beban Pegawai BLUD tahun 2023 sebesar Rp5.829.459.513,00.

5.1.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 40 Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.01	Beban Barang	104.889.836.268,96	65.690.944.745,43	39.198.891.523,53	59,67
8.1.02.02	Beban Jasa	130.828.355.520,56	135.085.788.693,95	(4.257.433.173,39)	(3,15)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	13.032.949.176,00	19.490.081.057,00	(6.457.131.881,00)	(33,13)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	89.249.419.091,00	59.084.824.414,00	30.164.594.677,00	51,05
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	951.182.948,00	1.352.260.106,00	(401.077.158,00)	(29,66)
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	23.888.703.563,00	(23.888.703.563,00)	(100,00)
8.1.02.89	Beban Barang dan Jasa BOSP	20.172.119.836,00	0,00	20.172.119.836,00	100,00
8.1.02.90	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	503.659.689,00	0,00	503.659.689,00	100,00
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	51.792.443.998,26	51.443.787.040,84	348.656.957,42	0,68
Jumlah		411.419.966.527,78	356.036.389.620,22	55.383.576.907,56	15,56

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan adanya penyesuaian perhitungan jasa insentif yang dibayarkan sesuai dengan kinerja pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas.

Perbandingan beban barang dan jasa dan belanja barang dan jasa tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 41 Perbandingan Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.1.02.01	Beban Barang	104.889.836.268,96	123.775.482.922,50	(18.885.646.653,54)
8.1.02.02	Beban Jasa	130.828.355.520,56	132.172.402.480,81	(1.344.046.960,25)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	13.032.949.176,00	18.827.821.288,00	(5.794.872.112,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	89.249.419.091,00	89.320.424.091,00	(71.005.000,00)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau	951.182.948,00	951.182.948,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
	Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
8.1.02.89	Beban Barang dan Jasa BOSP	20.172.119.836,00	20.377.465.986,00	(205.346.150,00)
8.1.02.90	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	503.659.689,00	503.659.689,00	0,00
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	51.792.443.998,26	51.842.254.673,00	(49.810.674,74)
	Jumlah	411.419.966.527,78	437.770.694.078,31	(26.350.727.550,53)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 *lebih kecil* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp26.350.727.550,53 (Rp411.419.966.527,78–Rp437.770.694.078,31). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA	Rp	26.350.727.550,53
Penambah :		
1. Penyesuaian Persediaan Barang Awal	Rp	27.002.391.815,26
2. Penyesuaian Persediaan Barang dan Jasa BLUD Awal	Rp	4.617.574.090,16
3. Penambahan Beban Barang dari Aset Tetap	Rp	284.156.724,00
4. Penambahan Beban Barang dari Ekstrakom	Rp	374.216.778,00
5. Penambahan Beban Jasa dari Aset Tetap	Rp	70.026.294,00
5. Penambahan Beban Pemeliharaan dari Aset Tetap	Rp	330.728.276,00
6. Penambahan Utang Beban Barang	Rp	578.140.805,00
7. Penambahan Utang Beban Jasa	Rp	829.476.866,00
8. Penambahan Utang Beban Pemeliharaan	Rp	45.778,00
9. Penambahan Utang Beban Perjalanan Dinas	Rp	210.645.000,00
10. Penambahan Utang Beban Barang dan jasa BLUD	Rp	3.746.735.965,00
11. Penerimaan Hibah Persediaan Barang	Rp	514.396.699,00
Jumlah Penambah	Rp	38.558.535.090,42
Pengurang :		
1. Penyesuaian Persediaan Barang Akhir	Rp	45.599.459.372,80
2. Penyesuaian Persediaan Barang dan Jasa BLUD Akhir	Rp	5.572.063.918,90
3. Pengurangan Beban Barang ke Aset Tetap	Rp	1.640.939.073,00
4. Pengurangan Beban Jasa ke Aset Tetap	Rp	1.426.003.825,00
5. Pengurangan Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap	Rp	6.125.496.166,00
6. Pengurangan Beban Barang dan Jasa BOS ke Aset Tetap	Rp	205.346.150,00
6. Pengurangan Utang Beban Barang	Rp	398.551.029,00
7. Pengurangan Utang Beban Jasa	Rp	817.546.295,25
8. Pengurangan Utang Beban Pemeliharaan	Rp	150.000,00
9. Pengurangan Utang Beban Perjalanan Dinas	Rp	281.650.000,00
10. Pengurangan Utang Barang dan Jasa BLUD	Rp	2.842.056.811,00
Jumlah Pengurang	Rp	64.909.262.640,95
Jumlah Penjelasan Selisih	Rp	26.350.727.550,53



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Beban Barang dan Jasa dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Barang

Beban Barang tahun 2024 sebesar Rp104.889.836.268,96 mengalami peningkatan sebesar Rp39.198.891.523,53 atau 59,67% dari Beban Barang tahun 2023 sebesar Rp65.690.944.745,43 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 42 Realisasi Beban Barang Pakai Habis TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	103.963.869.490,96	65.690.944.745,43	38.272.924.745,53	58,26
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	925.966.778,00	0,00	925.966.778,00	100,00
Jumlah		104.889.836.268,96	65.690.944.745,43	39.198.891.523,53	59,67

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2024 sebesar Rp130.828.355.520,56 mengalami penurunan sebesar Rp4.257.433.173,39 atau 3,15% dari Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp135.085.788.693,95 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 43 Realisasi Beban Jasa TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	92.809.736.903,56	100.110.491.637,95	(7.300.754.734,39)	(7,29)
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.758.195.629,00	19.598.458.291,00	159.737.338,00	0,82
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	9.803.428.811,00	5.355.575.786,00	4.447.853.025,00	83,05
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.862.666.216,00	2.130.144.900,00	732.521.316,00	34,39
8.1.02.02.06	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	33.500.000,00	4.500.000,00	29.000.000,00	644,44
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	21.500.000,00	6.700.000,00	14.800.000,00	220,90
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.935.141.294,00	3.264.163.299,00	(1.329.022.005,00)	(40,72)
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	89.900.000,00	749.900.000,00	(660.000.000,00)	(88,01)
8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	174.647.610,00	98.822.100,00	75.825.510,00	76,73
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.339.639.057,00	3.767.032.680,00	(427.393.623,00)	(11,35)
Jumlah		130.828.355.520,56	135.085.788.693,95	(4.257.433.173,39)	(3,15)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp13.032.949.176,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.457.131.881,00 atau 33,13% dari Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp19.490.081.057,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.1.4. 44 Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.041.532.763,00	7.656.634.398,00	1.384.898.365,00	18,09
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.067.080.533,00	2.734.893.959,00	332.186.574,00	12,15
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	729.250.800,00	9.078.552.700,00	(8.349.301.900,00)	(91,97)
8.1.02.03.06	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	195.085.080,00	20.000.000,00	175.085.080,00	875,43
Jumlah		13.032.949.176,00	19.490.081.057,00	(6.457.131.881,00)	(33,13)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 sebesar Rp89.249.419.091,00 mengalami peningkatan sebesar Rp30.164.594.677,00 atau 51,05% dari Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp59.084.824.414,00.

5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp951.182.948,00 mengalami penurunan sebesar Rp401.077.158,00 atau 29,66% dari Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2023 sebesar Rp1.352.260.106,00.

6. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2024 terealisasi pada beban barang dan jasa BOSP.

7. Beban Barang dan Jasa BOSP

Beban Barang dan Jasa BOSP tahun 2024 sebesar Rp20.172.119.836,00 mengalami peningkatan 100,00% dari beban Barang dan Jasa BOSP tahun 2023.

8. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas tahun 2024 sebesar Rp503.659.689,00 mengalami peningkatan 100,00% dari beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas tahun 2023.

9. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp51.792.443.998,26 mengalami peningkatan sebesar Rp348.656.957,42 atau 0,68% dari Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp51.443.787.040,84.

5.1.4.2.1.3 Beban Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk pos Beban Subsidi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.1.4. 45 Realisasi Beban Subsidi TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.04.03	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	330.000.000,00	550.000.000,00	(220.000.000,00)	(40,00)
	Jumlah	330.000.000,00	550.000.000,00	(220.000.000,00)	(40,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Beban Subsidi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan tidak adanya subsidi pada masyarakat untuk alat transportasi darat dan laut dalam rangka penanganan dampak inflasi di tahun 2024.

Perbandingan beban subsidi dan belanja subsidi tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 46 Perbandingan Beban Subsidi dan Belanja Subsidi Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.1.04.03	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00
	Jumlah	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Beban Subsidi dalam LO Tahun 2024 sama dengan dari saldo Belanja Subsidi dalam LRA TA 2024 sebesar Rp550.000.000,00.

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Beban Subsidi dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta tahun 2024 sebesar Rp330.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp220.000.000,00 atau 40,00% dari beban subsidi kepada badan usaha milik swasta tahun 2023 sebesar Rp550.000.000,00.

5.1.4.2.1.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 47 Realisasi Beban Hibah TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.05.01	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	43.111.971.120,00	0,00	43.111.971.120,00	100,00
8.1.05.05	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.546.430.262,00	31.794.896.080,00	(17.248.465.818,00)	(54,25)
8.1.05.06	Beban Hibah Dana BOS	778.065.845,00	741.419.845,00	36.646.000,00	4,94
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai	818.558.224,00	844.194.105,00	(25.635.881,00)	(3,04)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Politik				
	Jumlah	59.255.025.451,00	33.380.510.030,00	25.874.515.421,00	77,51

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- Adanya belanja bantuan hibah kepada kepada Bawaslu, Polri, TNI dan KPU terkait Pemilihan Kepala Daerah;
- Adanya perhitungan realisasi belanja hibah dana BOS dan BOP berdasarkan nilai NPHD.

Perbandingan beban hibah dan belanja hibah tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 48 Perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.1.05.01	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	43.111.971.120,00	43.111.971.120,00	0,00
8.1.05.05	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.546.430.262,00	13.475.179.262,00	1.071.251.000,00
8.1.05.06	Beban Hibah Dana BOS	778.065.845,00	778.065.845,00	0,00
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	818.558.224,00	818.558.224,00	0,00
	Jumlah	59.255.025.451,00	58.183.774.451,00	1.071.251.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 *lebih besar* dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp1.071.251.000,00 (Rp59.255.025.451,00–Rp58.183.774.451,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA		Rp	1.071.251.000,00
Penambah :			
1. Penyesuaian Hibah Dana CSR	Rp	1.071.251.000,00	
	Jumlah Penambah	Rp	1.071.251.000,00
Pengurang :			
1. -	Rp	0,00	
	Jumlah Pengurang	Rp	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih		Rp	1.071.251.000,00

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Beban Hibah dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2024 sebesar Rp43.111.971.120,00 mengalami peningkatan sebesar 100,00% dari beban hibah kepada pemerintah pusat tahun 2023.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

2. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2024 sebesar Rp14.546.430.262,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.248.465.818,00 atau 54,25% dari beban hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia tahun 2023 sebesar Rp31.794.896.080,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 49 Realisasi Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.05.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.765.179.262,00	26.805.323.080,00	(15.040.143.818,00)	(56,11)
8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.781.251.000,00	4.989.573.000,00	(2.208.322.000,00)	(44,26)
Jumlah		14.546.430.262,00	31.794.896.080,00	(17.248.465.818,00)	(54,25)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

3. Beban Hibah Dana BOS

Beban Hibah Dana BOS tahun 2024 sebesar Rp778.065.845,00 mengalami peningkatan sebesar Rp36.646.000,00 atau 4,94% dari beban hibah dana BOS tahun 2023 sebesar Rp741.419.845,00.

4. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2024 sebesar Rp818.558.224,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.635.881,00 dari beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2023 sebesar Rp844.194.105,00.

5.1.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 50 Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.234.889.939,00	1.544.410.000,00	(309.520.061,00)	(20,04)
8.1.06.02	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0,00	2.080.000.000,00	(2.080.000.000,00)	(100,00)
8.1.06.03	Beban Bantuan Sosial Uang kepada	1.203.750.000,00	3.988.489.206,00	(2.784.739.206,00)	(69,82)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Kelompok Masyarakat				
8.1.06.04	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	264.028.000,00	123.212.000,00	140.816.000,00	114,29
Jumlah		2.702.667.939,00	7.736.111.206,00	(5.033.443.267,00)	(65,06)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- Adanya bantuan sosial berupa peningkatan kualitas rumah swadaya pada Masyarakat tahun 2023;
- Menurunnya capaian realisasi belanja bantuan sosial di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan tidak adanya kegiatan program gerak cepat pengantasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) kepada kepala keluarga atau rumah tangga miskin (RTM).

Perbandingan beban bantuan sosial dan belanja bantuan sosial tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 51 Perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.234.889.939,00	1.234.889.939,00	0,00
8.1.06.02	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)
8.1.06.03	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	1.203.750.000,00	1.346.075.625,00	(142.325.625,00)
8.1.06.04	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	264.028.000,00	264.028.000,00	0,00
Jumlah		2.702.667.939,00	2.848.993.564,00	(146.325.625,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2024 *lebih kecil* dari saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2024 sebesar Rp146.325.625,00 (Rp2.702.667.939,00–Rp2.848.993.564,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bantuan Sosial dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA		Rp	146.325.625,00
Penambah :			
1. -	Rp	0,00	
Jumlah Penambah		Rp	0,00
Pengurang :			
1. Kesalahan Penganggaran Belanja Bantuan Sosial	Rp	146.325.625,00	
Jumlah Pengurang		Rp	146.325.625,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Selisih LO-LRA	Rp	146.325.625,00
Jumlah Penjelasan Selisih	Rp	146.325.625,00

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Beban Bantuan Sosial dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu tahun 2024 sebesar Rp1.234.889.939,00 mengalami penurunan sebesar Rp309.520.061,00 atau 20,04% dari beban bantuan sosial uang kepada individu tahun 2023 sebesar Rp1.544.410.000,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 52 Realisasi Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.06.01.01	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.133.536.939,00	167.300.000,00	966.236.939,00	577,55
8.1.06.01.02	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	101.353.000,00	1.377.110.000,00	(1.275.757.000,00)	(92,64)
Jumlah		1.234.889.939,00	1.544.410.000,00	(309.520.061,00)	(20,04)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp1.203.750.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.784.739.206,00 atau 69,82% dari beban bantuan sosial uang kepada kelompok masyarakat tahun 2023 sebesar Rp3.988.489.206,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 53 Realisasi Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.06.03.01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	930.000.000,00	0,00	930.000.000,00	100,00
8.1.06.03.02	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	273.750.000,00	3.988.489.206,00	(3.714.739.206,00)	(93,14)
Jumlah		1.203.750.000,00	3.988.489.206,00	(2.784.739.206,00)	(69,82)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) tahun 2024 sebesar Rp264.028.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp140.816.000,00 atau 114,29% dari beban bantuan sosial uang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) tahun 2023 sebesar Rp123.212.000,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.1.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 54 Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.07.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	172.719.835,42	329.318.695,22	(156.598.859,80)	(47,55)
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	30.068.162,12	4.084.720,00	25.983.442,12	636,11
Jumlah		202.787.997,54	333.403.415,22	(130.615.417,68)	(39,18)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan Penambahan perhitungan penyisihan piutang pajak daerah tahun berjalan. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp202.787.997,54.

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Beban Penyisihan Piutang dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp329.318.695,22 mengalami peningkatan sebesar Rp113.255.484,83 atau 52,42% dari beban penyisihan piutang pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp216.063.210,39 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 55 Realisasi Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.07.01.06	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	6.802.500,00	3.589.525,00	3.212.975,00	89,51
8.1.07.01.07	Beban Penyisihan Pajak Restoran	272.750,00	9.730.025,00	(9.457.275,00)	(97,20)
8.1.07.01.09	Beban Penyisihan Pajak Reklame	6.442.456,12	11.292.818,81	(4.850.362,69)	(42,95)
8.1.07.01.14	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	94.595,55	78.618.278,09	(78.523.682,54)	(99,88)
8.1.07.01.15	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	159.107.533,75	226.088.048,32	(66.980.514,57)	(29,63)
Jumlah		172.719.835,42	329.318.695,22	(156.598.859,80)	(47,55)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



2. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 sebesar Rp30.068.162,12,00 mengalami peningkatan sebesar Rp25.983.442,12 atau 636,11% dari beban penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2023 sebesar Rp4.084.720,00.

5.1.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 56 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.446.200.655,00	45.366.299.959,00	1.079.900.696,00	2,38
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.208.036.146,00	18.408.771.593,00	799.264.553,00	4,34
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	109.280.344.802,00	72.130.696.141,00	37.149.648.661,00	51,50
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.674.315,00	5.852.125,00	1.822.190,00	31,14
8.1.08.06	Beban Amortisaasi Aset Lainnya-Aset tidak Berwujud	142.276.625,00	138.507.396,00	3.769.229,00	2,72
Jumlah		175.084.532.543,00	136.050.127.214,00	39.034.405.329,00	28,69

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan penambahan perhitungan beban penyusutan dan amortisasi pada aset tetap dan aset tidak berwujud tahun berjalan.

Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *point 5.1.3* dan rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing perangkat daerah telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *point 5.1.3*, dan juga dapat dilihat pada *lampiran 25 s.d 29 dan lampiran 33*.

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Beban Penyusutan dan Amortisasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp46.446.200.655,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.079.900.696,00 atau 2,38% dari beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp45.366.299.959,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.1.4. 57 Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	2.767.506.850,00	2.681.868.325,00	85.638.525,00	3,19
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	6.447.667.675,00	6.267.474.687,00	180.192.988,00	2,88
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	396.158.494,00	426.678.380,00	(30.519.886,00)	(7,15)
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian	62.367.501,00	60.100.833,00	2.266.668,00	3,77
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.984.931.830,00	8.490.879.704,00	(505.947.874,00)	(5,96)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.165.821.981,00	1.328.145.085,00	(162.323.104,00)	(12,22)
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.085.944.705,00	11.833.185.511,00	1.252.759.194,00	10,59
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	4.400.272.493,00	4.849.474.999,00	(449.202.506,00)	(9,26)
8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	109.560.061,00	79.142.038,00	30.418.023,00	38,43
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	8.893.949.624,00	8.422.442.543,00	471.507.081,00	5,60
8.1.08.01.13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	26.812.160,00	11.560.220,00	15.251.940,00	131,93
8.1.08.01.14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	8.087.292,00	8.143.963,00	(56.671,00)	(0,70)
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	485.028.980,00	433.080.196,00	51.948.784,00	12,00
8.1.08.01.16	Beban Penyusutan Alat Peraga	45.874.600,00	18.188.600,00	27.686.000,00	152,22
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	25.628.260,00	3.134.932,00	22.493.328,00	717,51
8.1.08.01.18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	287.720.616,00	308.775.727,00	(21.055.111,00)	(6,82)
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	252.867.533,00	144.024.216,00	108.843.317,00	75,57
	Jumlah	46.446.200.655,00	45.366.299.959,00	1.079.900.696,00	2,38

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp19.207.496.331,00 mengalami peningkatan sebesar Rp798.724.738,00 atau 4,34% dari beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp18.408.771.593,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 58 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	18.778.734.291,00	18.070.757.084,00	707.977.207,00	3,92
8.1.08.02.02	Beban Penyusutan Monumen	48.909.553,00	52.579.064,00	(3.669.511,00)	(6,98)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.02.03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	8.605.750,00	8.605.750,00	0,00	0,00
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	371.786.552,00	276.829.695,00	94.956.857,00	34,30
Jumlah		19.208.036.146,00	18.408.771.593,00	799.264.553,00	4,34

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 sebesar Rp110.372.973.073,00 mengalami peningkatan sebesar Rp38.242.276.932,00 atau 53,02% dari beban penyusutan jalan, jaringan dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp72.130.696.141,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 59 Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	90.130.050.018,00	54.431.878.724,00	35.698.171.294,00	65,58
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	14.269.084.647,00	12.971.084.416,00	1.298.000.231,00	10,01
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	986.061.940,00	934.977.400,00	51.084.540,00	5,46
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	3.895.148.197,00	3.792.755.601,00	102.392.596,00	2,70
Jumlah		109.280.344.802,00	72.130.696.141,00	37.149.648.661,00	51,50

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya dengan kode rekening 8.1.08.04.01 merupakan beban penyusutan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga tahun 2024 sebesar Rp7.674.315,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.822.190,00 atau 31,14% dari beban penyusutan barang bercorak kesenian-alat musik tahun 2023 sebesar Rp5.852.125,00.

5. Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud tahun 2024 sebesar Rp142.276.625,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.769.229,00 atau 2,72% dari beban amortisasi aset lainnya-aset tidak berwujud tahun 2023 sebesar Rp138.507.396,00.

5.1.4.2.2 Beban Tidak Terduga

Beban tidak terduga terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan atau sering/rutin terjadi, dan berada diluar pengaruh entitas yang bersangkutan. Beban Tidak Terduga tahun 2024 sebesar Rp197.750.625,00 mengalami peningkatan sebesar Rp174.750.625,00 atau 759,79% dari beban tidak terduga tahun 2023 sebesar Rp23.000.000,00.

Perubahan nilai Beban Tidak Terduga Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan Adanya kegiatan STQ di Kecamatan Tojo yang dialokasikan melalui anggaran belanja tidak terduga dan koreksi kesalahan penganggaran Belanja Bantuan Sosial pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Perbandingan beban tidak terduga dan belanja tidak terduga tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 60 Perbandingan Beban Tidak Terduga dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.2.01.01	Beban Tidak Terduga	197.750.625,00	51.425.000,00	146.325.625,00
	Jumlah	197.750.625,00	51.425.000,00	146.325.625,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Beban Tidak Terduga dalam LO Tahun 2024 *lebih besar* dari saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2024 sebesar Rp146.325.625,00 (Rp197.750.625,00–Rp51.425.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Tidak Terduga dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA		Rp	146.325.625,00
Penambah :			
1. Kesalahan Penganggaran Belanja Bantuan Sosial	Rp	146.325.625,00	
	Jumlah Penambah	Rp	146.325.625,00
Pengurang :			
1. -	Rp	0,00	
	Jumlah Pengurang	Rp	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih		Rp	146.325.625,00

5.1.4.2.3 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 61 Realisasi Beban Transfer TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.3.01	Beban Bagi Hasil	1.550.000.000,00	1.500.000.000,00	50.000.000,00	3,33
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	80.791.159.900,00	68.293.644.200,00	12.497.515.700,00	18,30
	Jumlah	82.341.159.900,00	69.793.644.200,00	12.547.515.700,00	17,98

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.4.2.3.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 62 Rincian Beban Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	929.999.932,00	899.999.878,00	30.000.054,00	3,33



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa				
8.3.01.02	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	620.000.068,00	600.000.122,00	19.999.946,00	3,33
Jumlah		1.550.000.000,00	1.500.000.000,00	50.000.000,00	3,33

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Beban Bagi Hasil Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan adanya adanya peningkatan capaian realisasi tahun sebelumnya yang menjadi dasar perhitungan alokasi belanja bagi hasil di tahun berjalan.

Perbandingan beban bagi hasil dan belanja bagi hasil tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 63 Perbandingan Beban Bagi Hasil dan Belanja Bagi Hasil Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	929.999.932,00	929.999.932,00	0,00
8.3.01.02	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	620.000.068,00	620.000.068,00	0,00
Jumlah		1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Beban Bagi Hasil dalam LO Tahun 2024 sama dengan saldo Belanja Bagi Hasil dalam LRA TA 2024 sebesar Rp1.550.000.000,00.

Rincian Realisasi dari masing-masing akun Beban Bagi Hasil dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa tahun 2024 sebesar Rp929.999.932,00 mengalami peningkatan sebesar Rp30.000.054,00 atau 3,33% dari beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa tahun 2023 sebesar Rp899.999.878,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 64 Rincian Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.3.01.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0,00	6.716.417,00	(6.716.417,00)	(100,00)
8.3.01.01.03	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	929.999.932,00	893.283.461,00	36.716.471,00	4,11
Jumlah		929.999.932,00	899.999.878,00	30.000.054,00	3,33

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

2. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa

Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dengan kode rekening 8.3.01.02.01 merupakan beban bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa tahun 2024 sebesar Rp620.000.068,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

mengalami peningkatan sebesar Rp19.999.946,00 atau 3,33% dari beban bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa tahun 2023 sebesar Rp600.000.122,00.

5.1.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 65 Rincian Beban Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	80.791.159.900,00	68.293.644.200,00	12.497.515.700,00	18,30
Jumlah		80.791.159.900,00	68.293.644.200,00	12.497.515.700,00	18,30

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Perubahan nilai Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan penambahan insentif desa sesuai dengan PMK 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

Perbandingan beban bantuan keuangan dan belanja bantuan keuangan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 66 Perbandingan Beban Bantuan Keuangan dan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	80.791.159.900,00	194.348.963.900,00	113.557.804.000,00
Jumlah		80.791.159.900,00	194.348.963.900,00	113.557.804.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pengakuan Beban Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2024 *lebih kecil* dari saldo Belanja Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp113.557.804.000,00 (Rp80.791.159.900,00–Rp194.348.963.900,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA		Rp	113.557.804.000,00
Penambah :			
1. Penambahan Beban	Rp	0,00	
Jumlah Penambah		Rp	0,00
Pengurang :			
1. Penerapan Bultek 21 (beban transfer dana desa (non provinsi) tidak diakui dalam LO	Rp	113.557.804.000,00	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Selisih LO-LRA	Rp	113.557.804.000,00
Jumlah Pengurang	Rp	113.557.804.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	Rp	113.557.804.000,00

Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.1.4.2.4 Defisit Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Defisit Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 67 Perhitungan Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	18.155.757.739,00	24.261.090.001,00	(6.105.332.262,00)	(25,17)
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.238.820.140,00	809.664.304,00	429.155.836,00	53,00
	Jumlah	19.394.577.879,00	25.070.754.305,00	(5.676.176.426,00)	(22,64)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.4.2.5 Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi apada awal tahun anggaran, tidak diharapkan berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Tidak terdapat beban luar biasa tahun 2024. Perubahan nilai beban luar biasa tahun 2024 dari tahun 2023 karena pengadaan aset tetap dibawah minimum kapitalisasi dibebankan pada rekening beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

5.1.4.2.6 Surplus/(Defisit)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.1.4. 68 Surplus/Defisit-LO TA 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
7	Pendapatan	1.213.500.127.478,86	1.180.577.859.172,74	32.922.268.306,12	2,79
7.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) -LO	89.371.456.229,56	102.640.169.447,74	(13.268.713.218,18)	(12,93)
7.2	Pendapatan Transfer-LO	1.110.602.708.221,00	1.060.727.703.622,00	49.875.004.599,00	4,70
7.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	13.525.963.028,30	17.209.986.103,00	(3.684.023.074,70)	(21,41)
8	Beban	1.199.283.400.984,32	973.634.312.101,44	225.649.088.882,88	23,18



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	%
8.1	Beban Operasi	941.659.957.916,32	767.767.540.687,44	173.892.417.228,88	22,65
8.1	Belanja Penyusutan dan Amortisasi	175.084.532.543,00	136.050.127.214,00	39.034.405.329,00	28,69
8.2	Beban Tidak Terduga	197.750.625,00	23.000.000,00	174.750.625,00	759,79
8.3	Beban Transfer	82.341.159.900,00	69.793.644.200,00	12.547.515.700,00	17,98
	Surplus/Defisit dari Operasi	14.216.726.494,54	206.943.547.071,30	(192.726.820.576,76)	(93,13)
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(19.394.577.879,00)	(25.070.754.305,00)	5.676.176.426,00	(22,64)
	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	(5.177.851.384,46)	181.872.792.766,30	(187.050.644.150,76)	(102,85)
	Pos Luar Biasa	0,00	334.380.699,00	(334.380.699,00)	(100,00)
	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Luar Biasa	0,00	334.380.699,00	(334.380.699,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.177.851.384,46)	181.538.412.067,30	(186.716.263.451,76)	(102,85)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Jumlah saldo Surplus/(Defisit)-LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit)-LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *point* 5.1.6.

5.1.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.1.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.367.656.486.735,95	1.213.864.205.577,91
2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	1.162.836.460.121,31	959.660.290.704,70
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	204.820.026.614,64	254.203.914.873,21

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.1.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 2 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
➤ Penerimaan Pajak Daerah		
✓ Pajak Hotel	738.579.937,00	409.523.220,00
✓ Pajak Restoran	2.451.014.999,00	1.975.925.622,00
✓ Pajak Hiburan	1.744.000,00	2.500.000,00
✓ Pajak Reklame	510.536.006,00	447.425.910,00
✓ Pajak Penerangan Jalan	5.408.704.511,00	4.868.653.463,00
✓ Pajak Parkir	55.938.600,00	107.568.000,00
✓ Pajak Air Tanah	10.130.905,00	4.811.675,00
✓ Pajak Sarang Burung Walet	250.000,00	0,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.334.337.199,00	2.043.627.259,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.225.280.799,00	1.746.846.685,00
✓ Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.193.311.258,00	2.029.270.845,00
➤ Penerimaan Retribusi Daerah		
✓ Retribusi Jasa Umum		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.886.193.300,00	4.724.737.900,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	195.225.000,00	85.843.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	57.600.000,00	28.150.000,00
• Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	4.000.000,00	0,00
✓ Retribusi Jasa Usaha		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	260.604.000,00	406.048.000,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	124.257.000,00	118.672.500,00
• Retribusi Tempat Pelelangan	75.207.500,00	139.521.250,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	12.800.000,00	56.200.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	41.450.000,00	35.190.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	208.631.596,00	211.658.470,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	179.830.000,00	172.040.000,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	9.000.000,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	91.543.060,00	0,00
• Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	56.355.420,00	0,00
• Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	64.900.000,00	0,00
✓ Retribusi Perizinan Tertentu		
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	148.125.000,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	2.000.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	274.185.402,00	
➤ Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.713.872.980,00	4.165.684.360,00
➤ Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah		
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	68.955.000,00	18.475.000,00
✓ Hasil Kerja Sama Daerah	3.070.000,00	18.100.000,00
✓ Jasa Giro	45.774.805,61	206.450.372,96
✓ Pendapatan Bunga	3.648.326.720,53	1.930.204.611,91
✓ Pendapatan dari Pengembalian	3.173.580.523,17	5.269.889.969,19



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
✓ Pendapatan BLUD	52.618.002.007,34	67.280.179.423,85
✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	9.022.354.578,00
➤ Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat		
✓ Dana Perimbangan	1.092.473.085.346,00	898.145.207.443,00
✓ Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	49.620.369.000,00
✓ Dana Desa	113.557.804.000,00	114.710.250.000,00
✓ Insentif Fiskal	20.584.497.000,00	0,00
➤ Penerimaan Transfer Antar Daerah		
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.560.638.062,00	5.862.653.884,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.294.375.560,00	6.180.389.249,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.601.521.959,00	15.460.082.684,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	602.703.322,00	775.671.523,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.480.575.361,00	10.060.572.838,00
✓ Bantuan Keuangan		
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	2.680.000.000,00
➤ Penerimaan Pendapatan Hibah		
✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.032.000.000,00	2.693.331.842,00
➤ Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.726.093.597,30	0,00
Jumlah	1.367.656.486.735,95	1.213.864.205.577,91

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 3 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
➤ Pembayaran Belanja Pegawai		
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	350.603.282.203,00	264.776.463.894,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	37.753.266.519,00	39.058.117.123,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	63.275.326.431,00	53.284.972.112,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.960.619.814,00	9.923.863.864,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	161.284.817,00	162.711.680,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	568.000.000,00	582.600.000,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	5.430.829.344,00	5.829.459.513,00
➤ Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		
✓ Belanja Barang	123.775.482.922,50	61.423.690.250,00
✓ Belanja Jasa	132.172.402.480,81	138.399.857.244,70
✓ Belanja Pemeliharaan	18.827.821.288,00	20.736.256.073,00
✓ Belanja Perjalanan Dinas	89.320.424.091,00	58.890.549.414,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	951.182.948,00	1.352.260.106,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	20.377.465.986,00	20.892.483.563,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	503.659.689,00	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	51.842.254.673,00	55.555.645.432,00
➤ Pembayaran Belanja Subsidi		
✓ Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik	330.000.000,00	550.000.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Swasta		
➤ Pembayaran Belanja Hibah		
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	43.111.971.120,00	0,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.475.179.262,00	34.392.741.080,00
✓ Belanja Hibah Dana BOS	778.065.845,00	741.419.845,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	818.558.224,00	844.194.105,00
➤ Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.234.889.939,00	1.544.410.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	4.000.000,00	2.080.000.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.346.075.625,00	3.988.489.206,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	264.028.000,00	123.212.000,00
➤ Pembayaran Belanja Tidak Terduga		
✓ Belanja Tidak Terduga	51.425.000,00	23.000.000,00
➤ Pembayaran Belanja Bagi Hasil		
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	929.999.932,00	899.999.878,00
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	620.000.068,00	600.000.122,00
➤ Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	194.348.963.900,00	183.003.894.200,00
Jumlah	1.162.836.460.121,31	959.660.290.704,70

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 4 Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	638.647.069,00	0,00
2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	216.584.184.008,00	254.632.245.844,00
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(215.945.536.939,00)	(254.632.245.844,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.1.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 5 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
➤ Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
✓ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	638.647.069,00	0,00
Jumlah	638.647.069,00	0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 6 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
➤ Perolehan Tanah		
✓ Belanja Modal Tanah Persil	0,00	700.000.000,00
✓ Belanja Modal Lapangan	0,00	210.595.000,00
➤ Perolehan Peralatan dan Mesin		
✓ Belanja Modal Alat Besar	6.074.750.000,00	8.220.180.000,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	2.531.271.090,00	15.586.859.000,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	39.138.300,00	16.271.100,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	90.491.500,00	2.712.000,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.813.519.357,00	6.256.050.583,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	763.595.188,00	440.700.818,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.977.462.691,00	6.031.959.817,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	985.589.900,00	854.857.000,00
✓ Belanja Modal Komputer	6.852.337.387,00	5.263.119.899,00
✓ Belanja Modal Alat Eksplorasi	19.219.950,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	9.715.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	75.500.000,00	61.896.000,00
✓ Belanja Modal Alat Peraga	298.080.000,00	355.000.000,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	63.550.000,00	264.850.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	11.000.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.443.206.154,00	2.222.561.597,00
➤ Perolehan Gedung dan Bangunan		
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	37.152.657.468,00	48.115.746.899,00
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.391.539.900,00	5.018.096.600,00
➤ Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	111.621.878.590,00	93.352.817.900,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	19.861.824.000,00	45.736.407.100,00
✓ Belanja Modal Instalasi	0,00	35.000.000,00
✓ Belanja Modal Jaringan	4.835.047.990,00	10.632.583.488,00
➤ Perolehan Aset Tetap Lainnya		
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	11.610.000,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	119.850.000,00	5.500.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	135.325.000,00	433.900.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	6.000.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.128.634.543,00	1.485.971.043,00
➤ Penyertaan Modal Daerah		
✓ Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.300.000.000,00	3.300.000.000,00
Jumlah	216.584.184.008,00	254.632.245.844,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Tahun 2024 tidak terdapat nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.



5.1.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan. Pada Tahun 2024 tidak terdapat arus kas masuk yang berasal dari aktivitas pendanaan.

5.1.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Pada Tahun 2024 tidak terdapat arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan.

5.1.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk TA 2024. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 7 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	91.929.856.798,15	84.468.587.759,00
2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	92.094.661.700,75	84.663.062.716,00
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(164.804.902,60)	(194.474.957,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.1.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 8 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
➤ Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
✓ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	540.227.642,00	413.014.498,00
✓ Iuran Jaminan Kematian	1.625.109.628,00	1.239.042.859,00
✓ Iuran Jaminan Kesehatan	18.829.087.899,00	17.164.579.842,00
✓ Iuran Wajib Pegawai	21.470.694.670,75	18.757.902.167,00
✓ Pajak Penghasilan	19.385.607.437,60	17.815.454.989,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	30.079.129.520,80	29.078.593.404,00
Jumlah	91.929.856.798,15	84.468.587.759,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada *lampiran 53*.



5.1.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 9 Arus Kas keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
➤ Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
✓ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	540.227.642,00	413.014.498,00
✓ Iuran Jaminan Kematian	1.625.109.628,00	1.239.042.859,00
✓ Iuran Jaminan Kesehatan	18.829.087.899,00	17.163.810.514,00
✓ Iuran Wajib Pegawai	21.498.138.469,75	18.770.651.996,00
✓ Pajak Penghasilan	19.522.969.263,00	17.809.149.968,01
✓ Pajak Pertambahan Nilai	30.079.128.799,00	29.267.392.880,99
Jumlah	92.094.661.700,75	84.663.062.716,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada *lampiran 53*.

5.1.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 10 Kenaikan/(Penurunan) Kas TA 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	204.820.026.614,64	254.203.914.873,21
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(215.945.536.939,00)	(254.632.245.844,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(164.804.902,60)	(194.474.957,00)
Jumlah	(11.290.315.226,96)	(622.805.927,79)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.5. 11 Nilai Saldo Awal Kas Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	55.920.049.657,26	35.197.426.273,21
Kas di Bendahara Penerimaan	186.663.624,00	11.596.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	9.553.418.219,78	3.658.343.740,93
Kas Dana BOS	29.360.170,00	40.995.740,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	142.895.487,55	76.771.462,25
Kas Lainnya	2.424.458.545,84	657.470.084,83
Setara Kas	0,00	29.237.107.423,00
Jumlah	68.256.845.704,43	68.879.710.724,22

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

5.1.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA tahun lalu pada Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.1.5. 12 Nilai Koreksi SiLPA Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pengakuan Pendapatan LRA Jasa Giro Dana BOK di PKM Dataran Bulan dan Lebiti	0,00	59.092,00
Jumlah	0,00	59.092,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP-SAL pada *point 5.1.2* di atas.

5.1.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.5. 13 Nilai Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	49.868.151.187,56	55.920.049.657,26
Kas di Bendahara Penerimaan	305.548,00	186.663.624,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	4.898.336.210,12	9.553.418.219,78
Kas Dana BOSP	82.734.806,00	29.360.170,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	68.266.491,04	142.895.487,55
Kas Dana BOK Puskesmas	1.637.345.008,00	0,00
Kas Lainnya	411.391.226,75	2.424.458.545,84
Jumlah	56.966.530.477,47	68.256.845.704,43

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pada Tahun 2024 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK, jasa giro pada kas bendahara dan saldo akhir dana CSR. Terdapat perbedaan saldo akhir kas pada laporan arus kas dengan akun kas setara kas pada neraca, disebabkan adanya pelaporan dana CSR yang tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBD, namun hanya disajikan dalam Laporan Operasional. Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *point 5.1.1* di atas.

5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.1.6. 1 Nilai Saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas Awal	2.278.260.790.746,28	2.117.999.271.759,59



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Jumlah	2.278.260.790.746,28	2.117.999.271.759,59

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.1.6.2 Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.1.6. 2 Nilai Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Surplus/(Defisit)-LO	(5.177.851.384,46)	181.538.412.067,30
Jumlah	(5.177.851.384,46)	181.538.412.067,30

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *poin 5.1.4*.

5.1.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.6. 3 Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	8.947.144.700,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar	74.619.067.291,00	(23.681.886.061,20)
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	3.092.039.873,00	(4.427.841.957,00)
Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	(229.786.183,00)	(6,89)
Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	5.464.466.519,00	6.832.894.036,48
Koreksi Ekuitas atas Lainnya	0,00	(59.092,00)
Jumlah	91.892.932.200,00	(21.276.893.080,61)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024

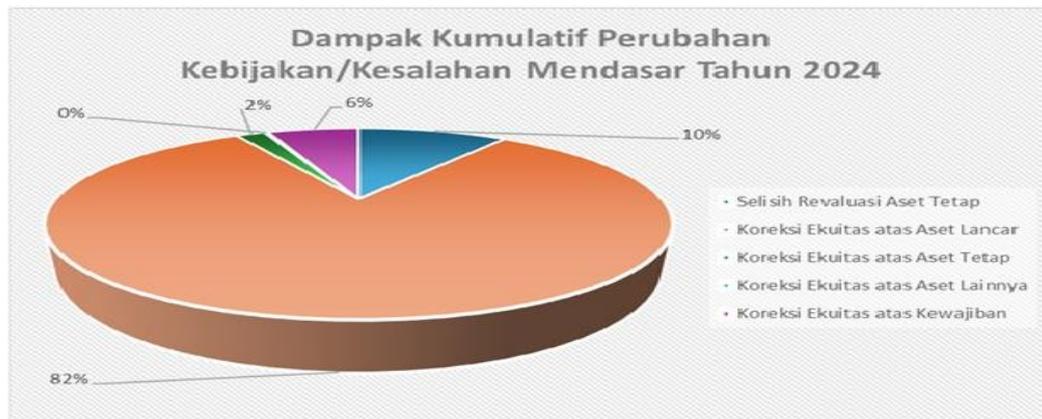
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Selisih revaluasi Aset Tetap berupa penambahan nilai tanah meliputi Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal, Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan, Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, Tanah Perkebunan, dan Tanah untuk Jalan;
2. Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar yang disebabkan adanya Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

meliputi Piutang Dana Transfer Umum-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi, DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty dan DBH SDA Minyak Bumi serta Pengakuan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2023;

3. Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap yang disebabkan adanya koreksi saldo awal dan penerimaan hibah aset tetap tahun-tahun sebelumnya meliputi Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer, Hibah Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku dan Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai;
4. Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya yang disebabkan adanya penghapusan aset lainnya barang yang diserahkan tahun sebelumnya yang merupakan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah;
5. Koreksi Ekuitas atas Kewajiban yang disebabkan adanya Penyelesaian Lebih dan Kurang Bayar Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan pengurangan utang belanja tahun sebelumnya meliputi Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH CHT, DBH PBB, DBH SDA Gas Bumi, DBH SDA PSDH, DBH SDA Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent, DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty, DBH SDA Perikanan, Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Pelayanan Umum.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Neraca Per 31 Desember 2024 digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Grafik 5. 4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024

5.1.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.1.6. 4 Nilai Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas Akhir	2.364.975.871.561,82	2.278.260.790.746,28
Jumlah	2.364.975.871.561,82	2.278.260.790.746,28

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2024



Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada penjelasan atas pos-pos Neraca pada *point 5.1.3*.

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

- A. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap penyelesaian ganti kerugian daerah, BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah menetapkan pembentukan MPPKD sesuai Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/18.C/BPKAD/2024 tentang Manjelis Pertimbangan Penyelesaian Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 dan pembentukan TPKD sesuai Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/18.D/BPKAD/2024 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 untuk mendukung proses penyelesaian kerugian daerah sesuai tupoksi masing-masing.
- B. Sampai dengan Semester II TA.2024, kasus kerugian daerah sebanyak 1.755 kasus sebesar Rp.32.333.902.172,50. Dari Jumlah tersebut, sebanyak 380 kasus sebesar Rp.1.986.341.807,25 telah mendapatkan pembebasan, sebanyak 928 kasus sebesar Rp.5.081.300.433,74 telah dilunasi, serta sebanyak 193 kasus sebesar Rp.15.147.744.003,57 telah diangsur sehingga sisa kerugian yang belum dipulihkan sebesar Rp.10.118.515.927,94 dengan rincian sebagai berikut:
1. Kasus kerugian daerah yang telah ditetapkan sebanyak 483 kasus sebesar Rp.2.669.519.577,75 Dari jumlah tersebut, 380 kasus sebesar Rp.1.986.341.807,25 telah mendapatkan pembebasan, 59 kasus sebesar Rp.73.238.396,00 telah dilunasi dan 40 kasus sebesar Rp.376.083.390,50 telah diangsur, sehingga sisa kerugian yang belum dipulihkan sebesar Rp.233.855.984,00;
 2. Kasus kerugian daerah dalam proses penetapan sebanyak 25 kasus sebesar Rp.689.790.937,00. Dari jumlah tersebut, 7 kasus sebesar Rp.11.288.600,00 telah dilunasi dan 7 kasus sebesar Rp.91.833.357,00 telah diangsur, sehingga sisa kerugian yang belum dipulihkan sebesar Rp.586.668.980,00; dan
 3. Proses penyelesaian kerugian daerah yang masih berupa informasi sebanyak 1.247 kasus sebesar Rp.28.974.591.657,75. Dari jumlah tersebut, 862 kasus sebesar Rp.4.996.773.437,74 telah dilunasi dan 146 kasus sebesar Rp.14.679.827.256,07 telah diangsur, sehingga sisa kerugian yang belum dipulihkan sebesar Rp.9.297.990.963,94.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki aset dalam bentuk situs dan benda bersejarah yang merupakan cagar budaya yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2.1. 1 Cagar Budaya Kabupaten Tojo Una-Una

No	Uraian	Lokasi
1	Makam Raja Srimanurung	Desa Benteng Kec. Togean
2	Makam Suami Raja Srimanurung bernama Lologani	Desa Benteng Kec. Togean
3	Makam Kapitalau atau Manjawali	Desa Benteng Kec. Togean



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Lokasi
4	Batu Senjata Masa Kerajaan Raja Srimanurung	Desa Benteng Kec. Togean
5	Tempat Permandian Raja Sri Manurung	Desa Benteng Kec. Togean
6	Makam Pimpinan Ketua Adat Suku Bobongko	Desa Benteng Kec. Togean
7	Makam Saribuah Anak dari Raja Srimanurung	Desa Benteng Kec. Togean
8	Makam Pasau dan Laborahima	Desa Binanguna Kec. Una-Una
9	Rumah Adat	Desa Binanguna Kec. Una-Una
10	Mesjid Tua Una-Una	Desa Binanguna Kec. Una-Una
11	Kubah Mesjid Tua Una-Una	Desa Binanguna Kec. Una-Una
12	Batu Lungkong Tempat Jatuhnya Pesawat Bomber Wreek B24	Desa Lebiti Kec. Togean
13	Goa Tua Lolangke	Desa Tombiano Kec. Tojo Barat
14	Tiang Jembatan Masolongi Buatan Belanda	Desa Tojo Kec. Tojo
15	Raja Makam Tanjumbulu	Kel. Ampana Kec. Ampana Kota



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kabupaten Tojo Una-Una awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Poso. Kabupaten ini terbentuk pada tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tojo UnaUna. Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terletak pada 121^o 05' 25" – 123^o 06' 17 " BT dan 0^o 06' 56" – 2^o 01' 41" LS. Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una meliputi dataran dan kepulauan. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yaitu :

Utara : Provinsi Sulawesi Utara
Selatan : Kabupaten Morowali
Barat : Kabupaten Banggai
Timur : Kabupaten Poso

Ditinjau dari posisinya dipermukaan bumi, wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terletak dipesisir pantai dan perairan teluk tomini. Kawasan meliputi daratan, hutan dan lembah pegunungan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian pada umumnya berada 500m dari permukaan laut. Secara geologis wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terletak pada lipatan Fennema dan Tineba yang terbentang dibagian barat pegunungan Tokolekaju dibagian barat daya, deretan pegunungan verbeek dibagian tenggara, dan pegunungan lumut dibagian timur laut.

Kabupaten Tojo Una-Una memiliki luas wilayah sebesar 5.721,51 km². Kabupaten Tojo Una-Una terbagi kedalam 12 kecamatan dengan pusat pemerintahan terletak dikota Ampaña. 12 kecamatan pada Kabupaten Tojo Una-Una terdiri atas:

Tabel 6. 1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una

Kecamatan District	2019	2020	2021	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tojo Barat	13	13	13	13	13
Tojo	16	16	16	16	16
Ulubongka	18	18	18	18	18
Ampaña Tete	20	20	20	20	20
Ampaña Kota	10	10	10	10	10
Ratolino	10	10	10	10	10
Una-Una	11	11	11	11	11
Batudaka	9	9	9	9	9
Togean	16	16	16	16	16
Walea Kepulauan	9	9	9	9	9
Walea Besar	8	8	8	8	8
Talatako	6	6	6	6	6
Tojo Una-Una	146	146	146	146	146

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tojo Una-una



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan daratan luas. Kecamatan yang terletak didaratan mencapai 4.958,18 km² sedangkan kecamatan yang terletak dikepulauan hanya 13.34 persen dari total wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

Salah satu yang menjadi daya tarik wisata Kabupaten Tojo Una-Una yaitu keindahan Kepulauan Togean. Kawasan wisata dikepulauan Togean memiliki keanekaragaman biota laut yang indah dan sangat terkenal hingga ke mancanegara. Dikawasan ini para wisatawan dapat menikmati indahnya pemandangan bawah laut yang menakjubkan dan sebagainya.

Susunan Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif Kabupaten Tojo Una-Una saat ini adalah sebagai berikut:

Lembaga Eksekutif

1. Bupati : **ILHAM, SH**
2. Wakil Bupati : **SURYA, S.SOS.,M.Si**
3. Sekretaris Daerah : **ALFIAN MATAJENG, S.Pd.,MAP**

Lembaga Legislatif

- Ketua DPRD : **GUSNAR A. SULEMAN, SE.,MM**
 Wakil Ketua DPRD : **1. RIZAL PANJILI, SE.,MAP**
2. JAFAR MUHAMAD AMIN

Jumlah pegawai per 31 Desember 2024 sebanyak 3.637 orang yang disajikan berikut:

Tabel 6. 2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2024

Golongan	Eselon					Tenaga Fungsional			Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	V	Pendidikan	Kesehatan	Lainnya		
Golongan IV/E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/C	0	19	0	0	0	9	8	0	0	36
Golongan IV/B	0	4	32	0	0	123	16	4	3	182
Golongan IV/A	0	2	80	23	0	135	24	6	10	280
SUB JUMLAH	0	25	112	23	0	267	48	10	13	498
Golongan III/D	0	0	29	248	0	376	187	22	64	926
Golongan III/C	0	0	0	136	0	253	97	13	85	584
Golongan III/B	0	0	0	53	0	312	135	38	130	668
Golongan III/A	0	0	0	7	0	152	74	6	259	498
SUB JUMLAH	0	0	29	444	0	1093	493	79	538	2676
Golongan II/D	0	0	0	0	0	28	37	11	119	195
Golongan II/C	0	0	0	0	0	16	6	6	105	133
Golongan II/B	0	0	0	0	0	2	4	1	88	95
Golongan II/A	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
SUB JUMLAH	0	0	0	0	0	46	47	18	337	448
Golongan I/D	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Golongan I/C	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Golongan I/B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan I/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
TOTAL	0	25	141	467	0	1406	588	107	903	3637

Catatan : Pejabat negara masuk dalam kolom Golongan IV/E Eselon I



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan, semoga CaLK ini membantu mempermudah dan memperjelas pemahaman pembaca laporan keuangan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024.

BUPATI TOJO UNA-UNA

ILHAM